

**Bungai Rampai Pemikiran Akademisi**

# **Potret Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Menghadapi Tantangan Pandemi Covid-19**

**Editor:**

**Dr.Ertien R.Nawangsari, M.Si**

**Arimurti Kriswibowo, M.Si**



**Penerbit Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
UPN "Veteran" Jawa Timur**



# **Potret Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi tantangan Pandemi Covid -19**

**Tim Penyusun:** B Widodo, FP Nurani, A Saufi, RP Yudha, E Kusumastuti, R Puspitasari, D Suhartini, YD Nuraini, I Ghozali, S Zuhri, L Arif, I Sumiati, ZA Achmad  
**Editor:** Ertien Rining Nawangsari, Arimurti Kriswibowo

e-ISBN : 978-623-92037-2-6  
Terbitan Pertama, Juli 2020

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh :  
Penerbit Program Studi Administrasi Publik  
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar  
Kota Surabaya, Jawa Timur  
Email : penerbit.adne@gmail.com

## **Atribusi Internasional Creative Common BY 4.0**

Hak Cipta pada para penulis dan penerbit; para pencipta membagikan sebagian hak penggunaan atas ciptaannya. Anda diperbolehkan untuk Berbagi — menyalin dan menyebarkan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun; Adaptasi — mengubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial dengan tetap tunduk pada kaidah Atribusi dimana Anda harus mencantumkan nama dan sumber yang sesuai, mencantumkan tautan, dan menyatakan bahwa telah ada perubahan yang dilakukan (jika dilakukan adaptasi). Anda dapat melakukan hal ini dengan cara yang sesuai, namun tidak mengisyaratkan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan Anda.

## KATA PENGANTAR

Saat ini dunia sedang menghadapi pandemi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 (virus Corona) dan infeksi yang disebut COVID-19. Infeksi virus ini awalnya ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan telah menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia. Di awal kemunculannya, virus ini mendapat beragam respons yang muncul dari masyarakat Indonesia. Sebagian mulai berhati-hati dan menerapkan pola hidup sehat, tetapi lebih banyak yang tidak peduli. Yang semuanya berdampak terhadap partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat laju penyebaran Covid-19.

Setelah diberlakukannya kebijakan tentang PSBB (pembatasan Sosial Berskala Besar) dan mulai diperlonggar dengan penerapan transisi new normal atau kebiasaan baru mau tidak mau harus dilakukan sebagai langkah beradaptasi dengan kondisi sekarang yakni, pandemi Covid-19. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan mengurangi aktifitas diluar rumah, baik bekerja maupun berinteraksi sosial yang mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan.

Maka dalam buku ini akan disampaikan beberapa tulisan yang memberikan deskripsi tentang kondisi masyarakat sebagai dampak dari kebijakan pemerintah. Buku ini terdiri dari 11 essay. Bagian Awal buku tentang Pangan **Essay pertama**, Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Petani Di Era New Normal . Yang memberikan potret terjaganya sektor pertanian dengan output hasil pertanian amat menentukan dalam hal menjaga ketahanan pangan, kedaulatan pangan dan keamanan pangan. **Essay Kedua**, Isu Keamanan Pangan pada gelombang Pandemi Covid-19, memberikan deskripsi tentang Bahan pangan, makanan maupun minuman belum terbukti dapat menjadi media penyebaran COVID-19. Kesadaran dalam meningkatkan kewaspadaan saat membeli dan mengkonsumsi bahan pangan dapat menghindarkan resiko penyebaran COVID-19.

Bagian Kedua buku tentang masyarakat. Pada **Esai yang Ketiga**, Keadilan Energi, Kesejahteraan Nelayan, dan New Normal, memberikan potret tentang bagi nelayan di wilayah terdampak dan berkurangnya pasokan energi BBM menjadi terhenti disebabkan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat menurunnya tingkat hasil tangkapan nelayan. **Essay yang Keempat** adalah Potret Masyarakat Rural Bertahan dalam Pandemi Covid-19 Tulungagung yang memaparkan bagaimana dinamika masyarakat rural dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19. **Essay yang kelima** adalah Tantangan Masyarakat Kawasan Wisata Air dalam Menghadapi New Normal (Sebuah kajian pada wisata Pemandian Umbul Ponggok, Polanharjo, Klaten) yaitu mendeskripsikan tentang destinasi wisata yang terdampak pandemi covid-19 adalah wisata Umbul Ponggok , yakni wisata pemandian air peninggalan Belanda. **Essay yang ke enam**, Menghadapi Tantangan New Normal Di Indonesia” ditinjau dari Segi Sosial Masyarakat Indonesia .dimana melihat tentang bagaimanapun, mau tidak mau kita akan hidup berdampingan dengan Covid-19, kita sudah tau penyebabnya, cara penularannya, cara mencegahnya. **Essay yang ketujuh** tentang Menghadapi Tantangan New Normal Di Tinjau Dari Perspektif Agama Islam, dimana umat muslim akan terdorong untuk selalu melaksanakan tindakan yang normal dan bermanfaat bagi orang lain,

Bagian Ketiga Buku tentang Kebijakan yaitu, **essay ke delapan**, tentang Efektivitas Kebijakan Menghadapi Era New Normal Dalam Masa Pandemi Covid-19 : Tinjauan Dalam Perspektif Masyarakat, di mana pemerintah perlu melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap semua langkah dan hasil penanganan pandemi covid-19 ini oleh semua Gugus Tugas dan semua stakeholders yang terkait. **Essay ke sembilan**, tentang New Normal Pasca Corona Virus Deseaster 2019 (COVID-19) di Indoensia. Tentang bagaimana kebijakan Adaptasi kehidupan baru memberikan keleluasaan dalam mobilisasi khususnya dalam roda ekonomi yang harus terus di dongkrak kembali ke arah yang seimbang

Bagian Akhir Buku tentang Sudut Pandang Lain yaitu essay yang kesepuluh adalah bagaimana Peran Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Manusia Seutuhnya . Perlunya kesetaraan gender, baik dalam akses pekerjaan, pendidikan, partisipasi dalam kehidupan keluarga dan karir. Fenomena yang berkembang dimasyarakat bahwa perempuan juga bisa sebagai pencari nafkah, perempuan mampu berkarir sebagai pimpinan manajerial dan berpolitik. Sedangkan **essay ke sebelas adalah** Mediamorphosis: Understanding New Media by Roger Fidler, Thousand Oaks, California: Pine Forge Press (2003) adalah tentang sebuahresensi buku dimana suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh para akademisi, praktisi media, dan masyarakat umum yang menyadari tentang semakin pentingnya peranan media komunikasi pada masa mendatang. Buku ini berisi tentang prediksi dan kenyataan perubahan teknologi media dan teknologi komunikasi yang digunakan manusia.

Buku ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka yang bisa memperkuat pemahaman kita dari berbagai segi dampak terjadinya pandemi ini dan memberikan makna dalam khasanah pustaka. Semoga bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, Juli 2020

Tim Editor



## DAFTAR ISI

<b>Pengantar Editorial.....</b>	
<b>Daftar Isi .....</b>	

### **Konten**

1. Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Petani di Era <i>New Normal</i> .....	1
2. Isu Keamanan Pangan pada Gelombang Pandemi Covid-19 .....	11
3. Keadilan Energi, Kesejahteraan Nelayan, dan <i>New Normal</i> .....	17
4. Tulungagung : Potret Masyarakat Rural Bertahan dalam Pandemi Covid19 .....	27
5. Tantangan Masyarakat Kawasan Wisata Air dalam Menghadapi <i>New Normal</i> .....	37
6. Menghadapi Tantangan <i>New Normal</i> di Indonesia: Ditinjau dari Segi Sosial Masyarakat Indonesia .....	41
7. Menghadapi Tantangan <i>New Normal</i> ditinjau dari Perspektif Agama Islam .....	49
8. Efektivitas Kebijakan Menghadapi Era <i>New Normal</i> dalam Masa Pandemi Covid-19 .....	55
9. Peran Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Manusia Seutuhnya .....	65
10. Mediamorphosis: Understanding <i>New Media</i> By Roger Fidler.....	71
<b>Biodata Para Penulis .....</b>	<b>79</b>



# MEMPERKUAT DAYA TAHAN EKONOMI PETANI DI ERA NEW NORMAL

Budiman Widodo

---

**Pengutipan:** Widodo, B. (2020). Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Petani Di Era New Normal. In Kriswibowo, A. & Nawangsari E. R. (Eds.), *Potret Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi tantangan Pandemi Covid-19*. Surabaya: Penerbit Prodi Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur.

---

## Pendahuluan

Sejak Kasus COVID-19 muncul diakhir tahun 2019 yang hingga kini telah melanda 215 Negara di hampir seluruh Negara di dunia dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir kapan tanpa kepastian waktu yang disepakati oleh para pakar pandemi, bahkan secara ekstrim ada yang berpendapat COVID-19 akan selalu dan tidak akan pernah berakhir. Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menghadapi dan melawan COVID-19. Baik dari sisi medis dengan upaya menemukan vaksin dan obat (COVID-19), yang diprediksi memakan waktu minimal 2 tahun, padahal penularan jenis virus ini sangat masih dan telah memakan korban jiwa hingga 7,2 juta terinfeksi, 400.000 ribu meninggal dunia. Dan yang menjadi perhatian seluruh dunia adalah dampak sosial ekonomi yang dirasakan jauh lebih berat menekan kehidupan masyarakat.

Beberapa Negara menempuh jalan tengah dengan merelaksasi dengan konsep kebijakan pelonggaran sosial dengan pertimbangan menjaga kegiatan perekonomian masyarakat dengan konsekuensi keselamatan kesehatan menjadi taruhannya, yang lebih populer dengan Kebijakan New Normal, dengan tekanan pada aspek protokol kesehatan, meliputi jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Pada aspek jaga jarak baik fisik maupun sosial (menghindari kerumunan). Menjadi hal cukup sulit mengingat sifat dan tradisi masyarakat Indonesia yang cenderung berkelompok dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi, karena manusia sebagai makhluk sosial ingin selalu bersosialisasi dan tidak dapat diisolasi. Dalam kontak kebijakan penanganan COVID-19, pemerintah di kebanyakan dunia menerapkan standar ganda antara menjaga keselamatan kesehatan, sekaligus tetap menjaga kegiatan roda perekonomian tetap berjalan, kebijakan yang cukup dilematis harus dilakukan oleh kebanyakan Negara di dunia termasuk Indonesia. Menurut Ari Kuncoro, kebijakan yang dilakukan dalam menangani COVID-19 melalui tiga fase, fase pertama adalah penyelamatan manusia dan tenaga medis, fase kedua adalah perlindungan sosial terhadap kelompok sosial dan rentan terhadap PHK, dan fase ketiga adalah memperkuat habitat ekonomi agar COVID-19 tidak menjelma menjadi krisis ekonomi. (Kompas 9 Juni 2020 hal:6)

Prediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan terjun bebas di tahun 2020 ini, skenario pertumbuhan buruk berada pada angka minus 5 - 7,6%. Negara-negara ekonomi maju seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, telah meyakini pertumbuhan ekonomi minus bisa di bayangkan bagaimana negara-negara berkembang dan terbelakang akan semakin mengalami kesulitan ekonomi yang terburuk dengan peningkatan angka kemiskinan dan kelaparan. Dalam menyikapi kondisi ini ( dalam menyikapi COVID- 19) negara-negara di dunia telah terpecah menjadi dua kelompok, dimana muncul kelompok Negara- negara yang menganggap remeh COVID- 19 seperti Brazil, yang menganggap COVID- 19 adalah masalah kecil, Perancis sudah membuka area-area publik yang dipadati oleh banyak umum, pertimbangan kelompok negara-negara seperti tersebut diatas dilandasi oleh

pemikiran- pemikiran bagaimna caranya untuk segera bisa keluar dari krisis ekonomi dengan mengabaikan protokol kesehatan. Penerapan kelonggaran pembatasan sosial yang diterapkan enam negara seperti, Korea Selatan, Iran, China, Amerika Serikat, Jerman bahkan Jepang telah memunculkan kekhawatiran munculnya gelombang kedua COVID-19. Munculnya *Conflict of Interest* mewarnai pendapatan masa depan penanganan COVID-19, padahal kekompakan menjadi kunci sukses penanganan COVID- 19.

Model pendekatan keseimbangan menjadi pilihan kebijakan penanganan COVID-19 oleh kebanyakan negara didunia. Pilihan kebijakan ini dipilih karena membiarkan keterpurukan ekonomi tanpa ada langkah nyata akan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang jauh lebih parah, prediksi Bank dunia akan terjadi kontraksi 6 – 7,6% pertumbuhan minus ekonomi dunia. Sejauh mana daya tahan negara-negara dunia dalam untuk bisa bertahan ditengah-tengah merosotnya ekonomi dunia, menjadi fokus perhatian dunia : strategi untuk tetap bisa bertahan, bukanlah perkara mudah, ekonomi negara-negara maju seperti Jepang, China, Amerika Serikat dan negara-negara ekonomi maju sekalipun mengalami kesulitan dalam menjaga kestabilan perekonomian dunia. Manajemen krisis untuk mengatasi persoalan ekonomi dunia ditengah-tengah COVID-19 betul-betul merupakan tantangan dan ujian berat bagi negara-negara dunia saat ini. Dibutuhkan kerjasama yang solid untuk bisa keluar dari krisis saat ini. Disisi lain dibutuhkan inovasi untuk bisa keluar dari krisis saat ini disamping untuk terus dapat menjaga keselamatan jiwa. Dua hal beresial yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Untuk bisa keluar dari krisis keselamatan jiwa dan ekonomi sekaligus merupakan agenda yang banyak dilakukan oleh negara-negara didunia saat ini. Indonesia dimana sektor pertanian masih dapat menompang kehidupan disaat krisis seperti saat ini, pilihan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi Nasional meskipun ekonomi petani terguncang, namun daya tahan mereka cukup bisa diandalkan. Perhatian terhadap desa mutlak di perlukan mengingat dalam memnuhi kebutuhan pangan, petani merupakan ujung tombak dalam pemenuhan sebagian besar kebutuhan pangan. Dibutuhkan stimulus untuk menyelamatkan petani. Pada saat- saat awal munculnya COVID- 19 dengan episentrum di perkotaan diharapkan Desa tidak tertular COVID- 19, dengan pola kebijakan sosial berskala besar (PSBB) maupun tidak mudik. Kebijakan ini dapat meminimalisir penularan COVID-19 dipedesaan, meskipun juga sulit membendung penyebaran penularan COVID-19. Namun bagaimana pun desa diandalkan untuk mengatasi dampak COVID-19. Dari sisi ekonomi dan penularan COVID-19, Pemerintah mengalokasikan dana desa bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin atau keluarga yang kehilangan mata pencahariaan akibat pandemi. Serta progam padat karya tunai didesa hingga kini sudah 6,6 juta menerima Bantuan Langsung Tunai ( Kompas 10 Juni 2020 hlm:10)

Tidak seperti aktivitas kehidupan diperkotaan, yang menerapkan *Work From Home (WFH)*. Kehidupan dipedesaan khususnya petani tidak harus bekerja dengan aktivitas dilapangan untuk menggarap lahan pertaniannya, adalah suatu yang mustahil petani hanya tinggal diam dirumah saja, mereka tetap bekerja diluar dilahan pertaniannya untuk tetap bekerja. Secara medis petani relatif tidak terganggu keselamatan jiwa dan kesehatan di era COVID 19, karena sifat dan karakter pekerjaan petani tidak membutuhkan sosial distancing seperti tuntutan protokol kesehatan karena “space” pekerjaan mereka sangat terbuka dengan jarak yang cukup luas. Petani tetap bekerja dan

berproduksi sesuai kapasitas masing-masing. Dengan demikian petani tetap menghasilkan produksi pertanian sebesar volume hasil seperti sedia kala.

Persoalan muncul ketika hasil produksi petani tidak dapat terdistribusikan atau terjadi penurunan permintaan hasil produk peraturan untuk jenis tertentu. Hambatan faktor distribusi disebabkan faktor transportasi dan permintaan pasar menyebabkan hasil panen mereka tidak maksimal, bahkan terjadi penurunan pendapatan. Tren penurunan harga komoditas pertanian merupakan hal yang tidak bisa dihindari, padahal produksi tetap terus berjalan, bahkan terjadi “over suplay” disaat terjadi panen raya yang biasanya diikuti oleh penurunan harga komoditas yang berakibat turunnya tingkat kesejahteraan petani.

Intervensi pemerintah disaat COVID 19 di pedesaan, harus segera dilakukan tanpa harus menunggu petani menjerit karena hasil produk mererka tidak bisa terserap dipasar. Intervensi harus dilakukan mulai dari sejak penyediaan pupuk, bibit dan sarana produksi pertanian untuk menjaga jangan sampai logistik bahan pangan terganggu. Hasil penelitian yang dilakukan Institut Petanian Bogor terhadap situasi ekonomi dan pangan di Indonesia akibat COVID 19 menunjukkan hasil produksi padi bisa negatif 4,92-10,4 persen akibat pandemi COVID 19 tanpa stimulus dari pemerintah. Selanjutnya intervensi pada level out-put dimana disaat musim panen tidak terjadi penurunan harga yang tajam, sehingga mengakibatkan petani rugi dimana harus menanggung ongkos produksi yang cukup tinggi, dengan hasil produksi bisa terjadi di bawah ongkos produksi. Di era pandemi COVID 19, hambatan yang muncul adalah adanya faktor distribusi yang tidak lancar, padahal meski terjadi penurunan permintaan sebetulnya diperkotaan saat pandemi COVID 19 masih butuh barang-barang produk pertanian pedesaan. Daya tahan petani dalam menghadapi krisis ekonomi sebetulnya lebih baik dibandingkan masyarakat perkotaan. Pada tataran pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar petani lebih handal, tapi mereka juga harus terkoneksi dengan ekonomi perkotaan yang butuh ekonomi mahal, seperti transportasi, listrik, biaya sekolah, dan biaya sekunder lainnya, meski untuk kebutuhan primer relatif aman. Penurunan pendapatan petani di era pandemi COVID 19 relatif lebih rendah dibandingkan pada Skala Nasional bahkan Internasional. Menurut riset tim peneliti dari IPB Bogor menyebutkan penurunan pendapatan petani maksimal minus 3,9 persen, bahkan bisa tumbuh 0,63 persen bila ada intervensi dari pemerintah yang tepat sasaran dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana stok bahan pangan bisa dipenuhi, dengan memprioritaskan sektor hulu (petani dan lahannya) mendapat in-put dari pemerintah.

Menjaga petani dan lahannya tetap eksis di era pandemi COVID 19, dengan meningkatkan daya beli petani menjadi prioritas, merupakan momentum yang tepat saat ini. Strategi menggelontorkan dana bantuan ke pedesaan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketahanan pangan, dan memperkuat basis perekonomian pedesaan maupun Nasional di era “New Normal”.

Penelitian ini adalah jenis survey dengan metode pengambilan data lewat media baik surat kabar, TV dan medsosb maupun pengambilan data primer lewat wawancara langsung secara daring. Selanjutnya analisis data secara kualitatif. Sampel mengambil berita-berita utama dari surat kabar dan beberapa kasus yang ada kaitannya dengan penerapan masa New Normal.

## **Pembahasan**

Kenyataan Indonesia adalah Negara Agraris dimana wilayah dan penduduk sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, ditambah beras merupakan bahan makanan pokok, lengkaplah sudah penduduk Indonesia yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertanian. Namun sejarah menunjukkan keperpihakan kepada petani boleh dikatakan sangat minim, petani selalu dalam posisi marginal. Petani di Indonesia telah berabad-abad dicengkeram oleh sistem feodalisme (kerajaan), dimana petani hanya dianggap sebagai abdi, alat produksi seperti tanah adalah milik Raja dan para bangsawan, bahkan tenaga petani juga menjadi bagian dari penguasa yang dapat dikerahkan untuk kepentingan penguasa. Rakyat hanya menggarap dan mempunyai hak menggunakan tidak berhak memiliki atau menguasai (Noer Fauzi: 1999 hal : 15-16). Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1970 an, dimana menurut data sensus penduduk 80% penduduk tinggal dipedesaan. Namun sejak tahun 1990 penduduk yang bekerja disektor pertanian mengalami penurunan tinggal 62,80% (BPS: 1980 & 1990). Tren penurunan ini terus berlanjut sejalan dengan perubahan pembangunan industri di kota-kota besar, banyak petani yang merelakukan urbanisasi sebagai akibat proses pembangunan yang bias sektoral dan memarginalkan petani berkembang dengan cepat (Khudori : 2004) dan banyak terjadi oleh fungsi lahan pertanian ke non pertanian, selama periode 2006-2010 mengalami alih fungsi lahan pertanian sebesar 81.176 meter, (BPN : 2010). Turunnya jumlah lahan pertanian, memaksa sebagian penduduk desa perkotaan mencari pekerjaan sebagai buruh dipabrik-pabrik yang ada di perkotaan.

Tren penurunan penyerapan tenaga kerja disektor pertanian, memunculkan inovasi sektor pekerjaan diluar pertanian (non-farm), berupa industri kecil dipedesaan (Effendi: 1996, Abdulah: 1995 dan Ken Suratiyadi : 1994). Dari hasil survey yang di lakukan, tumbuh industri kecil dipedesaan, seperti kerajinan alat rumah tangga di dusun Tumang (Budiman: 1999), kerajinan alat rumah tangga dari bambu di desa Jatikuwung Kecamatan Jumantoro, Kabupaten Karanganyar (Budiman 2015) dan kerajinan alat rumah tangga dari kayu di Secang Kab. Magelang (Budiman: 2020). Dari hasil wawancara dengan para perajin berbahan baku kayu, untuk produksi berupa irus dan entong (bahasa jawa), kemudian di jadikan barang souvenir pernikahan, dengan adanya COVID-19 ini mereka berhenti produksi, karena lesunya permintaan untuk keperluan pernikahan, para pengrajin souvenir ini sudah terkoneksi dengan ekonomi perkotaan, dan memenuhi kebutuhan orang- orang kota. Sejalan dengan tumbuhnya sebagian besar aktivitas perekonomian perkotaan maka mereka menjadi penganggur. Menurut (Ratchlif : 1988, Chinloy (1998) mengatakan, bahwa naiknya ekonomi tanah perkotaan di Indonesia sebagai kombinasi elemen ekonomi perkotaan pada tatanan mikro dan makro. Masuknya matarantai produk industri kecil desa ke kota sejalan dengan permutaran pasar di kota dipenuhi oleh pasokan hasil usaha kerajinan dipedesaan. Hal ini paralel dengan menyempitnya lahan pertanian dipedesaan yang menyebabkan tumbuhnya industry kecil dipedesaan.

Pada awal-awal meredupnya sektor pertanian dibarengi inovasi bekerja diluar sektor pertanian dengan masuk industry kecil/rumah tangga, maka tenaga kerja pedesaan ..dan terserap disektor perkotaan tanpa harus pergi ke kota dan bahkan sebagian masih menggarap lahan pertanian, baik sebagai buruh tani maupun menggarap lahan milik sendiri dalam skala kecil (< 0,2 ha). Dari hasil pengamatan dilapangan, seperti yang terjadi pada Desa Secang Kabupaten Magelang, tidak semua lahan pertanian mereka

tinggalkan. Hanya petani beralih ketanaman keras jangka panjang, seperti menanam pohon kayu, sengon, yang membutuhkan waktu 5 tahun panen ( wawancara dengan Bapak Yono petani di Desa Secang Kabupaten Magelang, tanggal 26 Juni 2020 ) sbb :

“ Tanah saya karena lokasinya agak jauh dari tempat tinggal, saya tanami pohon sengon dengan harapan saya 5 tahun lagi bisa panen untuk memenuhi kebutuhan, sehari-hari saya bekerja sebagai tukang amplas pada industri kecil pembuatan souvenir ”

Disamping itu ada sebagian pengrajin yang membiarkan lahan pertaniannya tidak produktif atau diserahkan kepada buruh/penggarap dengan sistem bagi hasil atau bahkan merelakan hasil produksi pertaniannya kepada penggarap, hanya menerima ala kadarnya dari penggarap. Fokus pada pekerjaan disektor industri kecil/rumah tangga, bukan merupakan kerugian atau salah pilih, keuntungan ganda karena tetap bekerja dilokasi/dirumah menjadikan petani relative lebih sejahtera. Problem muncul ketika permintaan pasar produk kerajinan mengalami penurunan atau bahkan tidak ada permintaan sama sekali. Pilihan kembali menggarap lahan pertaniannya menjadi solusi saat ini.

Kembali menekuni sektor pertanian bukanlah perkara mudah, disamping hasil yang lebih rendah maupun pengeluaran ongkos pertanian yang cukup mahal ditempat factor iklim yang tidak menentu menjadi pilihan sulit disaat pandemi COVID-19 saat ini. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya harga komoditas pertanian yang juga mengalami penurunan harga, akibat faktor distribusi yang mengalami hambatan, maupun turunnya harga akibat permintaan pasar yang mengalami penurunan. Seperti petani sayur dilereng Gunung Merapi, Desa Senden Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Hasil wawancara dengan petani di Desa tersebut, bapak Jumar mengatakan :

“Hasil panen bawang mereka saat pandemic COVID-19 ini mengalami penurunan yang sangat tajam, kondisi saat ini harga pada kisaran Rp. 10.000/kg ditingkat petani, padahal saat normal bisa mencapai kisaran antara Rp. 17.000- Rp. 18.000/kg.”

Turunnya permintaan produk pertanian berupa sayuran dan yang lain, dipengaruhi oleh permintaan yang turun drastis dari hotel-hotel besar yang ada dikota yang hampir tidak ada pesanan sama sekali. Berarti disini telah terjadi ikatan matarantai yang begitu kuat antara komoditas produk pertanian (Desa) dengan perekonomian kota yang merupakan konsumen terbesar, disamping juga factor hambatan transportasi, pada saat pemberlakuan kebijakan pembatasan social berskala besar di kota- kota besar.

Memasuki Era “New Normal” dimana sudah mulai ada kegiatan perekonomian di perkotaan khususnya, maka langkah strategis untuk fokus pada kegiatan perekonomian dipedesaan harus segera dilakukan. Stimulus-stimulus melalui paket kebijakan pertumbuhan Ekonomi Nasional ..diharapkan mampu menggerakkan ekonomi pedesaan, sekaligus dapat menjaga pasokan bahan pangan. Prediksi pengamat bila 6 bulan kedepan COVID-19 belum berakhir akan berakrobat pada krisis pangan, bisa diantisipasi sejak saat ini. Fenomena “Ruralisasi” dimana dana dan orang kota masuk ke desa harus dimaknai sebagai momentum untuk menghidupkan ekonomi pedesaan.

## **Back To Nature**

Kembali ke alam merupakan paradigam yang cocok dalam situasi COVID-19 menuju “New Normal”, konsep sambil menyelam minum air pas untuk melakukan aktivitas perekonomian dipedesaan. Disatu sisi melakukan pelestarian lingkungan sekaligus memanfaatkan momentum menarik investasi ke desa dengan sentuhan skill, penyuluhan dan teknologi tepat guna untuk menggarap potensi Desa. Pasar lokal yang selama ini kosong mulai dilirik sebagai potensi bisnis yang memiliki prospek lebih bagus. Pada Era modernisasi yang dimulai pada awal tahun 70 an dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi memanfaatkan booming minyak, sudah saatnya untuk mereorientasi kembali ke perdesaan. Banyaknya penduduk usia muda yang meninggalkan aktivitas pertanian menuju ke kota, kini mulai berfikir untuk kembali didesa (ruralisasi). Terhubungnya desa/kota melalui teknologi informasi dan transportasi menjadi mudah untuk mengembangkan Desa dengan segala potensinya. Hasil wawancara dengan ..pemuda asal Desa Tanduk Kecamatan Ampel Boyolali yang bekerja di bengkel mobil mengatakan :

“Karena bengkel BOS-POM dimana ia ikut bekerja sepi dan penghasilan tidak menentu, maka ia memutuskan kembali ke Desa membantu atau meneruskan menggarap lahan pertanian di Desa dengan menanam jenis tanaman herbal seperti jahe merah untuk konsumsi kesehatan.”

Pergeseran paradigma dari organisasi ke ruralisasi saat ini menjadi alternatif pilihan. Proses adaptasi tidaklah mudah untuk dilakukan. Hambatan yang sama ketika proses awal urbanisasi dimana skill dan pengetahuan menjadi kendala utama untuk melakukan urbanisasi, akan terjadi pula pada saat awal melakukan “Ruralisasi” atau yang terjadi pada petani saat beralih potensi menjadi pengrajin pada industri rumah tangga, dimana mengalami keterpurukan karena sepi nya permintaan dkota, kembali menekuni usaha tani.

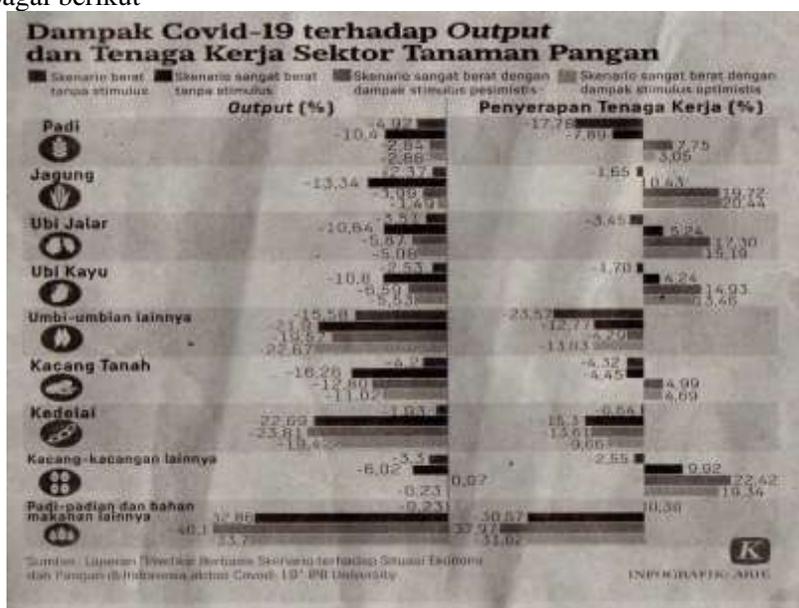
Proses Ruralisasi tidak mudah dilakukan karena faktor keterbatasan lahan pertanian di samping sektor pertanian kurang bergengsi: merubah “mindset” petani menjadi pekerjaan yang memiliki status sosial yang cukup baik harus dilakukan. Trobosan dengan melakukan Inovasi pertanian memiliki prospek yang cukup baik di era “New Normal” akan sia-sia, karena tidak ada yang memprediksi kapan COVID- 19 berakhir padahal kehidupan harus terus berjalan. Sebetulnya di era “ New Normal” petani tidak banyak mengalami hambatan, karena mereka tetap berproduksi dan bekerja. Tidak dapat melakukan Work From Home (WFH). Pekerjaaa petani realif aman dari COVID-19 mereka tetap bekerja dengan anggapan COVID-19 tidak menyerang pada petani secara langsung, bahkan cukup sehat karena bekerja dibawah sinar matahari seperti wawancara yang dilakukan melalui medsos dengan bapak Sapriyadi asal Desa Winong Kecamatan Kota Boyolali sebagai berikut :

“ Setiap hari dimusim tanam ini saya melakukan perjaan bertani setelah pensiun pekerjaan bersihkan kandang sapi, memupuk tanaman dikebun, sampai memelihara tanaman saya lakukan tanpa ada rasa khawatir akan COVID-19.”

### Jenis Tanaman Komoditas

Secara umum petani di Indonesia menghasilkan bahan pangan meliputi padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai jenis tanaman ini tergantung dengan faktor tingkat kesuburan tanah untuk kecocokan jenis tanaman sebagai diatas. Dalam penelitian ini memfokuskan pada konteks bagaimana petani mensikapi pademi COVID-19 terhadap keberlangsungan usaha tani mereka. Hasil produksi petani kedepan diharapkan dapat mengatasi persoalan pangan dimasa pandemi COVID-19. Petani merupakan ujung tombak dalam penyediaan pangan. Selama ini di era normal petani pada posisi marginal, akankan petani di era New Normal tetap bisa aksis atau bahkan lebih sejahtera, sehingga mereka tetap tertarik dibidang pertanian. Dalam perannya menjalankan tiga fungsi menjaga kecukupan pangan, ketahanan pangan dan keamanan pangan ( Rakaryo, Suti. E 2011). Pilihan terhadap jenis tanaman disamping ditentukan faktor tanah, petani juga memiliki kecerdasan dalam memilih jenis tanaman apa yang menguntungkan. Orientasi pasar menjadi dasar pilihan dalam menentukan jenis tanaman yang akan dilakukan. Meski disadari turunnya permintaan pasar membuat harga terjun bebas dan mengancam keberlangsungan usaha tani mereka.

Dari hasil penelitian tim penelitian IPB University diprediksikan dampak terhadap output sebagai berikut



Sumber. Laporan “Prediksi Berbasis Skenario terhadap Situasi Ekonomi dan Pangan di Indonesia akibat Covid-19” IPB University

Melihat prediksi diatas Ekonomi petani terguncang. Untuk itu intervensi pemerintah perlu dilakukan untuk menjaga semangat petani agar tidak meninggalkan pertanian. Stimulus harus diberikan kepada petani untuk mengurangi dampak ekonomi agar tidak kehilangan kesejahteraannya. Di era COVID-19 ini dampak terhadap pendapatan yang berakibat naiknya angka pengangguran yang menyebabkan kemiskinan, menjadi fokus perubahan kebijakan pemerintah soal ini. Di era new normal, perlu trobosan inovasi diperdesaan dengan memanfaatkan momentum saat ini, petani bisa

mengambil kesempatan untuk mengisi pasar lokal yang ditinggalkan pasar global akibat COVID-19. Berkurangnya pasukan import bahan pangan termasuk buah-buahan dan sayuran merupakan peluang bisnis untuk mengangkat pendapatan petani tentu saja harus dibarengi peningkatan kualitas hasil produksi pertanian lokal. Petani kecil berperan penting mengembangkan keanekaragaman hayati pangan di Indonesia.

Diharapkan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) akan terjadi seiring dengan naiknya peran petani dalam perekonomian Nasional, melalui usaha tani dipedesaan. Produk pertanian dipedesaan secara psikologis dapat turut serta menjaga ketahanan dan keamanan pangan Nasional. Kekhawatiran terjadinya kekurangan pangan tidak akan terjadi. Petani harus dijaga daya belinya melalui peningkatan kesejahteraan dengan pemberian stimulus baik langsung maupun tidak langsung agar keberlangsungan usaha tani mereka terjaga. Disamping itu hak petani mesti dilindungi sesuai perjanjian antar Nasional tentang sumber daya genetik tumbuhan untuk pangan dan pertanian. Petani berhak mendapat pengakuan atas kontribusinya. ( Diskusi daring pangan, hak-hak petani dan keanekaragaman benih sebagai strategi adaptasi perubahan-perubahan iklim).

### **Kesimpulan**

COVID-19 menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang usaha tani dipedesaan. Kebijakan pemerintah dengan menjaga keseimbangan antara keselamatan jiwa, kesehatan dengan tetap berjalannya perekonomian, memunculkan adanya era “New Normal”. Pilihan kebijakan ini diambil untuk bisa menghidupkan aktivitas ekonomi dengan protokol kesehatan yang harus dipenuhi, meski sulit untuk diterapkan secara ideal, pertimbangan lain dalam menjaga perekonomian nasional, adalah menjaga agar dampak yang ditimbulkan akibat COVID 19 tidak sampai terjadi adanya krisis pangan. Kebijakan pro perdesaan ( Pertanian) dilakukan dengan memberikan stimulus kepada petani harus dilakukan. Agar petani meningkat pendapatannya dan memperoleh pengalaman atas kontribusinya.

Selama ini dalam keadaan normal petani dalam posisi marjinal, demikian juga pada saat pandemi COVID-19. Nilai tukar petani juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun demikian daya tahan petani relative lebih baik dibandingkan masyarakat perkotaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Usaha untuk mempertahankan daya beli petani, agar mereka tetap bisa berkontribusi terhadap pangan nasional, memerlukan kebijakan real dari pemerintah. Pengelontoran aliran dana ke desa diharapkan mampu mendorong ekonomi perdesaan.

Pada prinsipnya protokol kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 , dengan sosial distance tidak begitu berpengaruh terhadap pekerjaan petani, menginggat usaha tani rata-rata memiliki “space” yang terbuka dan luas, bahkan cenderung secara alami dapat meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Maka dalam prakteknya selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui konsep Work From Home (WFH) tidak berlaku bagi petani. Petani tetap bekerja memproduksi bahan pangan. Persoalan muncul ketika distribusi dengan memperpendek mata rantai ke konsumen secara daring dan mendorong masuk pasar modal yang ditinggalkan oleh pasar global melalui produl-produk impor. Momentum ini dipandang cukup menguntungkan bagi petani, diharapkan kesejahteraan mereka meningkat, dan daya beli menjadi lebih tinggi.

**Referensi**

- Abdulah, Irwan, Marcelinus Molo, Wolfgang Clauss, 1995, Kesempatan Kerja dan perdagangan dipedesaan, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, UGM.
- Biro Pusat Statistik 1993, Jumlah dan Prosentase Penduduk miskin tingkat Nasional dan Provinsi, Jakarta, BPS
- Efendi, Tadjuddin Noer, dan Hellmut Weber, 1993. Industrialisasi dipedesaan Jawa. Kerja sama PPK- UGM Yogyakarta dan Friedrid Ebert Stiftung. Jakarta : Geothe Institute
- Fauzi, Noer, 1999, Petani dan Penguasa dinamika perjalanan politik Agraria Indonesia, Insist press, KPA dan pustaka pelajar, Yogyakarta
- Irianto, Gatot. 2014, Menuju Indonesia berdaulat Pangan, Gramedia- Kompa, Jakarta.
- Mardikanto, Fotok, 2009, Membangun Pertanian Modern, Sebelas Maret University, Press, Surakarta
- Rahayu, Siti, E, 2011, Kebijakan Harga dan Kesejahteraan Petani, UNS. PRESS, Surakarta
- Suratiyah, Ken, Harani dan Nurleni, 1994, Marginalisasi Pekerja Wanita di Pedesaan, Yogyakarta, PPK-UGM
- Webnar, Diskusi daring pangan dan hak-hak petani dan keanekaragaman benih sebagai strategi adaptasi perubahan iklim, RABU, 1 Juli 2020



# ISU KEAMANAN PANGAN PADA GELOMBANG PANDEMIK COVID-19

## Fesdila Putri Nurani

---

**Pengutipan:** Nurani, F. P. (2020). Isu Keamanan Pangan Pada Gelombang Pandemi Covid-19. In Kriswibowo, A. & Nawangsari E. R. (Eds.), *Potret Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi tantangan Pandemi Covid-19*. Surabaya: Penerbit Prodi Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur.

---

### Pangan dan Keamanan Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang utama. Indonesia, sebagai negara yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati, telah merumuskan definisi pangan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, yaitu “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”. Dalam hal ini, segala upaya dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia telah dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Secara umum, pangan terdiri dari pangan nabati dan hewani. Pada dasarnya, baik pangan nabati dan hewani dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Secara umum, pemenuhan karbohidrat masyarakat Indonesia diperoleh dari kelompok biji-bijian serta umbi-umbian. Pemenuhan kebutuhan protein berasal dari sumber nabati maupun hewani, yakni kacang-kacangan, daging, susu maupun telur. Sumber lemak yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia berasal dari lemak nabati yakni minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak jagung, lemak sapi, minyak babi maupun produk turunan lainnya seperti margarin dan juga mentega. Vitamin dan mineral dapat dipenuhi dengan konsumsi harian yang bersumber dari sayur-sayuran maupun buah-buahan.

Jauh sebelum ini, focus utama dalam pengolahan pangan adalah pada pengembangan atau inovasi pangan dalam rangka pemenuhan pangan nasional serta diversifikasi produk, khususnya produk berbahan pangan local. Namun, seiring dinamika yang terjadi, keamanan pangan menjadi salah satu topik yang diperhatikan dalam proses pengolahan dan penyiapan makanan maupun minuman. Keamanan pangan sendiri, khususnya pangan olahan, masih menjadi perhatian guna mencegah adanya resiko bahaya yang dapat menimpa konsumen yang mengkonsumsi pangan olahan.

“Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”. Setidaknya itulah bunyi dari Pasal 1 (2) mengenai definisi dari keamanan pangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga hal yang mungkin berpotensi terhadap keamanan pangan, yakni cemaran biologis, kimia dan fisik.

Cemaran biologis, kimia maupun fisik dapat timbul selama proses pengolahan pangan. Berbagai jenis cemaran tersebut juga dapat ditemukan dari bahan baku atau bahan mentah pangan. Satu hal yang harus diingatk, bahwasanya bahan pangan adalah bahan

yang kompleks serta bersifat *perishable* atau mudah rusak karena memiliki banyak sekali kandungan gizi, seperti karbohidrat, protein, lemak dan lainnya, yang juga dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak. Selain itu, cemaran kimiawi yang timbul selama proses pengolahan pangan juga memiliki potensi yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Cemaran kimiawi bisa timbul dari produksi toksin oleh mikroorganisme tertentu selama proses pengolahan atau berasal dari bahan kimia yang ditambahkan atau digunakan dalam proses pengolahan pangan. Berbeda dengan cemaran biologis maupun kimiawi, cemaran fisik relative dapat dicegah dan ditangani. Cemaran fisik pada bahan pangan bisa berasal dari berbagai sumber, biasanya berupa tanah, kerikil, pasir, plastic, maupun logam. Pencegahan cemaran fisik dapat dilakukan dengan upaya pencucian, pemisahan, ataupun dengan alat *metal detector* yang khusus dapat mendeteksi adanya logam pada suatu bahan.

Kemamanan pangan erat kaitannya dengan upaya Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) atau yang dikenal juga dengan GMP (*Good Manufacturing Process*). Pengertian dari CPPB adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi. Titik berat dari CPPB adalah penyediaan pangan yang layak dan aman, dimana pangan tersebut tampak normal, bersih, tidak menjijikkan serta tidak mengandung bahan yang merugikan kesehatan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian pada cara produksi pangan yang baik antara lain lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, suplai air, hygiene dan sanitasi fasilitas, pengendalian hama, hygiene dan kesehatan karyawan, pengendalian proses, label pangan, penyimpanan, penarikan hingga dokumentasi.

Aspek pertama yang menjadi perhatian adalah lingkungan produksi. Untuk memproduksi pangan yang aman, hendaknya lingkungan produksi diupayakan tetap bersih, bebas hama, bebas dari sumber pencemaran lainnya. Lingkungan produksi seharusnya tidak berada di tengah pemukiman yang kumuh dan kotor sehingga tidak berpotensi mengundang serangga atau hama yang dapat mencemari makanan. Bangunan dan fasilitas produksi sebaiknya bebas dari berbagai cemaran serta mudah dibersihkan, begitu jugsan dengan peralatan produksi. Air yang digunakan dalam proses produksi haruslah air bersih dan memiliki kualitas air minum. Hygiene dan sanitasi fasilitas harus diperhatikan untuk mencegah kontaminasi silang, khususnya dari karyawan. Salah satu hal mengenai hygiene dan sanitasi fasilitas adalah tersedianya jamban yang cukup serta kebersihan toilet. Kondisi fasilitas yang kotor dan tidak layak seringkali mengundang sumber penyakit yang secara tidak langsung dapat mencemari produk pangan maupun karyawan.

Hama yang seringkali ditemui pada lokasi produksi pangan adalah lalat serta tikus. Bahan pangan secara alami akan mengundang hama apabila tidak ditangani dengan baik. Untuk mencegah adanya hama, maka kebersihan lokasi produksi maupun peralatan harus senantiasa dijaga, selain itu, dapat dilakukan pemasangan *pest control* atau *insect killer* pada lokasi-lokasi tertentu di sekitar lokasi produksi. Hygiene dan kesehatan karyawan juga harus diperhatikan selama proses produksi berlangsung. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan terjadinya kontaminasi silang dari karyawan pada produk pangan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah apabila karyawan mengalami gejala sakit, sebaiknya diberikan ijin untuk beristirahat di rumah. Selain itu, karyawan juga selaku dihimbau untuk senantiasa menjaga kebersihan pribadi selama melakukan proses produksi.

Pengendalian proses meliputi bahan baku yang digunakan, komposisi, cara produksi, kemasan yang digunakan hingga pelabelan. Pengendalian proses berguna agar produk yang dihasilkan memiliki keseragaman karakteristik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelabelan yang dilakukan juga harus memenuhi aspek-aspek yang diwajibkan untuk dicantumkan, antara lain:

1. Nama produk
2. Daftar komposisi bahan
3. Berat bersih
4. Nama dan alamat produsen
5. Tanggal, bulan tahun kadaluwarsa
6. Nomor sertifikat PIRT atau ijin edar BPOM

Proses penyimpanan yang dilakukan harus baik sehingga kualitas produk tetap terjaga, serta tetap terjamin keamanannya. Pada proses produksi, harus ada seorang penanggung jawab yang mengawasi jalannya proses produksi serta mengendalikannya sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jalur distribusi dan penarikan juga harus diperhatikan terutama jika terjadi suatu kasus keracunan produk. Produk yang terindikasi cacat dan menimbulkan resiko bahaya bagi konsumen harus segera ditarik dari peredaran agar tidak menyebabkan meluasnya kasus. Pencatatan dokumen pada setiap tahap kegiatan juga perlu untuk dilakukan untuk memudahkan penelusuran masalah. Pelatihan karyawan khususnya mengenai hygiene, sanitasi dan kesehatan karyawan perlu untuk dijadwalkan agar setiap karyawan memiliki tanggung jawab menjaga seluruh proses produksi serta produk terjaga keamanannya.

### **Keamanan Pangan di Masa Pandemi**

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan oleh adanya kasus penyakit baru yang disebabkan oleh virus Corona SARS-Cov-2, yaitu COVID-19, yang ditemukan untuk pertama kalinya di daerah Wuhan, Tiongkok. Dilaporkan sebelumnya, virus ini dibawa oleh beberapa jenis hewan, salah satunya kelelawar dan menyerang system pernapasan manusia dengan beberapa gejala khas seperti demam, batuk, sesak napas, diare, dan Nampak seperti gejala flu pada umumnya. Pada 11 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) menetapkan musibah ini sebagai pandemic setelah meluasnya kasus yang terjadi. Setelah terjadinya kasus yang pertama dan berakibat pada kematian, penelitian mengenai perkembangan virus Corona dilakukan, terutama untuk mencari obat maupun vaksinnya.

Sebelum COVID-19 menyebar, beberapa tahun sebelumnya juga pernah terjadi wabah serupa yang disebabkan oleh virus SARS-Cov dan MERS. Penyebaran SARS-Cov, MERS, maupun SARS-Cov-2 selama ini diketahui melalui perantara hewan tertentu. Penyebaran lainnya adalah melalui orang yang terinfeksi pada orang lainnya. Beberapa variable yang diperhatikan secara luas pada pola penyebaran orang ke orang adalah adanya kemungkinan system imun yang lemah serta diketahui memiliki penyakit bawaan atau komorbid seperti diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, asma dan penyakit lainnya. Pola penyebaran COVID-19 melalui media lainnya, terutama makanan, masih terus dipelajari.

Menurut EFSA (*European Food Safety Authority*) (2020) dan juga FDA (*Food and Drug Administration*) Amerika Serikat (2020), menilik pada kasus yang disebabkan oleh SARS-Cov maupun MERS, tidak ditemukan adanya pola transmisi melalui makanan,

begitu juga pada SARS-Cov-2. Namun demikian, adanya transmisi dari bahan pangan dapat terjadi apabila seseorang yang terinfeksi SARS-Cov-2 menyentuh makanan, kemudian orang lainnya menyentuh makanan yang sama dan secara tidak sengaja menyentuh area mata maupun mulut atau bagian wajah. Selain itu, transmisi juga diketahui dapat terjadi pada bahan pangan mentah yang dibekukan. Sebagai pembandingan, SARS-Cov dan MERS diketahui dapat bertahan pada kondisi beku selama 2 tahun.

B POM selaku badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia, menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat demi menghindari penyebaran virus SARS-Cov-2 yang menyebabkan COVID-19, baik saat membeli bahan pangan maupun mengonsumsi makanan, utamanya perilaku saat menyantap makanan bersama dengan keluarga atau orang lain. US FDA sendiri telah menerbitkan poster pedoman mengenai cara belanja yang aman selama masa pandemic ini, antara lain:

1. Buat catatan khusus bahan pangan yang akan dibeli serta stock bahan pangan untuk 1-2 minggu sekaligus,
2. Gunakan masker saat berbelanja keluar rumah
3. Bawa tissue basah untuk mengelap pegangan kereta belanja atau keranjang belanja. Jika membawa kantong belanja yang dapat dipakai berulang, pastikan untuk segera dicuci dengan sabun sebelum digunakan kembali
4. Tetap jaga jarak aman 1,5-2 m dengan pembeli lainnya dan hindari untuk menyentuh area wajah.
5. Segera cuci tangan dengan air hangat dan sabun selama 20 detik setelah kembali ke rumah
6. Walaupun belum terbukti COVID-19 dapat menyebar melalui kemasan pangan, usahakan bersihkan bagian luar kemasan pangan menggunakan tissue basah sebelum dikonsumsi
7. Cuci buah dan sayur yang akan dikonsumsi dengan air mengalir, untuk makanan kaleng, usahakan untuk membersihkan bagian *lid* sebelum dibuka
8. Saat akan membekukan daging atau ayam, atau menyimpan buah dan sayur, lakukan dalam 2 jam
9. Bersihkan secara berkala peralatan maupun area dapur menggunakan cairan desinfektan
10. Selalu ingat 4 tahap keamanan pangan: bersihkan, pisahkan, masak, dan bekukan.

Pedoman yang dikeluarkan oleh US FDA tersebut merupakan upaya pencegahan transmisi virus SARS-Cov-2 pada bahan pangan dan juga untuk mencegah penyebaran yang lebih luas lagi pada masyarakat luas. Kemudian, bagaimana dengan industry pangan maupun penjamah makanan?

Pada dasarnya, belum terbukti bahwa makanan dapat menjadi media penyebaran COVID-19, walau demikian, perlu diingat bahwa virus SARS-Covid-2 dapat bertahan pada permukaan benda, termasuk bahan pangan. Langkah yang harus dilakukan oleh penjamah makanan, penyedia layanan boga ataupun pelaku industry pangan adalah dengan meningkatkan system keamanan pangan pada saat proses pengolahan hingga distribusi. Hal yang paling mungkin dilakukan adalah dengan menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) sekaligus menerapkan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Dalam menghadapi masa pandemic ini, peningkatan kesadaran karyawan atas

adanya bahaya baik pada karyawan itu sendiri maupun terhadap produk sangat penting untuk dilakukan. Penggunaan masker wajah, sarung tangan plastic maupun penutup kepala sangat disarankan dalam skla industry apapun guna mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan pada produk. Peninjauan kembali system pengemasan dan distribusi juga perlu dilakukan mengingat adanya potensi bahaya walaupun skalanya sangat kecil. Carribean Public Health Agency (CARPHA) (2020) menjelaskan beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan oleh pihak penyedia makanan dan minuman dalam melakukan aktivitasnya, antara lain:

1. Higiene Pekerja
  - a. Penjamah makanan harus selalu menepapkan *good personal hygiene*, khususnya cuci tangan.
  - b. Penjamah makanan harus selalu cuci tangan dengan sabun selama kurang lebih 20 detik baik sebelum maupun setelah menyentuh makanan. Jika tersedia sarung tangan, lebih baik menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk meminimalkan adanya resiko kontaminasi silang.
  - c. Penjamah makanan harus selalu menggunakan masker, dan apabila bersin atau batuk dianjurkan untuk menutup dengan bagian dalam siku.
2. Penyiapan makanan/minuman
  - a. Jumlah staf yang berada pada ruangan penyiapan makanan/minuman harus dibatasi dalam satu waktu
  - b. Setiap pekerja harus menerapkan protocol *social distancing*
  - c. Kegiatan pembersihan dan sanitasi ruangan harus dilakukan berkala baik pada awal masuk hingga pulang untuk mencegah perpindahan virus ke dalam area kerja
  - d. Setiap pekerja yang menggunakan peralatan diharuskan untuk mencuci tangan baik pada awal shift, setelah keluar dari toilet, saat hendak makan maupun setelah makan, maupun pada aktivitas lainnya yang berpotensi menyebabkan adanya perpindahan virus
  - e. Alat Pelindung Diri (APD) berupa sarung tangan, masker, penutup kepala harus diganti setiap beberapa waktu
  - f. Sebaiknya tidak menyajikan makan mentah, untuk bahan daging sebaiknya dimasak hingga matang
  - g. Untuk bahan sayur dan buah, sebaiknya dicuci dengan air mengalir dan dilakukan sanitasi
3. Kegiatan *Cleaning* dan Sanitasi
  - a. Pada bagian yang sering tersentuh oleh pekerja, hendaknya sering dilakukan pembersihan
  - b. Peralatan yang digunakan harus secara rutin dicuci dan dibersihkan

## **Kesimpulan**

Bahan pangan, makanan maupun minuman belum terbukti dapat menjadi media penyebaran COVID-19. Kesadaran dalam meningkatkan kewaspadaan saat membeli dan mengkonsumsi bahan pangan dapat menghindarkan resiko penyebaran COVID-19. Kelengkapan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan dan penutup rambut dapat menghindarkan resiko kontaminasi silang. Penerapan CPPB sekaligus penerapan protocol

kesehatan dapat menjadi langkah efektif dalam menjalankan aktivitas produksi makanan dan minuman bagi pelaku industry pangan.

### **Referensi**

- Coronavirus: No Evidence that Food is a Source or Transmission Route. <https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route> diakses 23 Juli 2020
- Food Safety and the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) | FDA. <https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19> diakses 23 Juli 2020
- Interim Guidance on Food Safety during the COVID-19 Pandemic (Coronavirus Disease) in the Caribbean. <https://www.carpha.org/Portals/0/Documents/Technical%20Guidance/COVID-19%20Guidelines%20for%20Food%20Safety> diakses 23 Juli 2020
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.5.1639 Tahun 2003 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

## KEADILAN ENERGI, KESEJAHTERAAN NELAYAN, DAN NEW NORMAL

Ahmad Saufi

---

**Pengutipan:** Saufi, A. (2020). Keadilan Energi, Kesejahteraan Nelayan, Dan New Normal. In Kriswibowo, A. & Nawangsari E. R. (Eds.), Potret Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi tantangan Pandemi Covid-19. Surabaya: Penerbit Prodi Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur.

---

Keadilan Energi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah menghadirkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi setiap warga negara dalam satu wilayah kesatuan dengan konsep satu harga. Pemerintah mengusung misi ini, atas dasar persamaan hak dan menghilangkan kesenjangan dan perbedaan harga antara masyarakat luar Jawa, Madura, dan Bali dengan ongkos distribusi dan margin yang dibebankan kepada konsumen. Terlebih, masyarakat yang berada dikawasan pesisir, wilayah kepulauan dengan pekerjaan baik sebagai nelayan maupun buruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan adalah kata sifat yang menunjuk suatu perbuatan, perlakuan yang mengandung adil. Sedangkan menurut Aristoteles sebagaimana dikutip oleh J.H. Rapar (1991), bahwa negara harus memiliki cita-cita mulia untuk kebaikan bersama seluruh masyarakat. Kebaikan ini berbanding lurus dengan seberapa besar mamfaat dari kebijakan yang diproduksi negara yang memuat tentang prinsip keadilan dan kebenaran. Teori keadilan versi Aristoteles ini adalah sebagai bentuk persamaan atas hak-hak individu di dalam masyarakat secara universal.

Pandangan lain datang dari seorang profesor Universitas Harvard Amerika Serikat, John Rawls (1971) di dalam bukunya yang berjudul *Theory of Justice*. Ia menyebut keadilan sebagai keadilan (*justice as fairness*). Konsep keadilan, menurutnya dapat dilakukan oleh individu dalam suatu komunitas dan atau organisasi besar yang melibatkan negara sebagai pembuat kebijakan dan berlaku adil dalam kebijakannya untuk pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakatnya. Dalam konteks ini, tentu yang menjadi perhatian kita adalah sebuah potret peran negara untuk menghadirkan keadilan dalam pemenuhan energi dimasyarakat. Mengapa pemerintah begitu penting untuk menciptakan keadilan energi pada semua warganya? Ikhtiar nyata Pemerintah untuk mewujudkan keadilan energi tersebut menjadi cerminan dan refleksi dari Undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Produk hukum menjadi penting dan merupakan konsensus kebijakan sebagai pintu gerbang bagi negara membuktikan besarnya dan hadirnya peran vital untuk memenuhi kebutuhan energi di masyarakat. Presiden Joko Widodo di awal masa kepemimpinannya menegaskan komitmen kuat untuk menyelenggarakan keadilan energi dengan membuat Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan bakar minyak sebagai dasar awal. Dalam peraturan tersebut pada pasal 2 disebutkan bahwa jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur terdiri atas: a). Jenis BBM Tertentu; b). Jenis BBM Khusus Penugasan; dan c). Jenis BBM Umum.

Selanjutnya pada Pasal 3 (1) disebutkan tentang jenis BBM Tertentu yang dimaksudkan adalah terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Sementara itu, diaturan berikutnya pada ayat 2 untuk jenis BBM Khusus Penugasan

merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Sedangkan pada pasal yang sama ayat 3, yakni wilayah penugasan yang dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali. Adapun pada ayat 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tentang jenis BBM Umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan.

Peraturan Presiden tersebut diatas sangat jelas dan tegas, namun diperlukan aturan secara detil maka inisiatif melahirkan aturan teknis yang mengatur secara rinci tentang sisi operasional dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Setelah mengkaji secara mendalam selama 2 tahun, terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan Secara Nasional. Percepatan BBM Satu Harga dengan perwujudan harga jual eceran yang sama di seluruh Indonesia, memiliki tantangan tersendiri melihat kondisi geografis yang beragam serta tingkat akses yang tergolong daerah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal) dan wilayah Indonesia bagian timur.

Mengapa daerah kepulauan menjadi prioritas? Pasca keluarnya Permen tentang percepatan BBM satu harga, pemerintah di tahun 2017 telah melakukan pemetaan awal dan merumuskan daerah yang merupakan titik lokasi penyebaran. Pemerintah memiliki prioritas utama pada daerah-daerah Kepulauan yang jauh dari akses jangkauan penggunaan energi, walaupun tingkat konsumsi masyarakat akan energi BBM masih relatif sedikit. Namun, kehadiran negara haruslah nyata atas pemenuhan hak warga atas kebutuhan energi untuk keberlangsungan kehidupan dan dirasakan oleh masyarakat terutama yang berprofesi sebagai nelayan atau buruh yang berprofesi di sektor perikanan yang menempati pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Menurut sumber dari [esdm.go.id](http://esdm.go.id) (2017), BBM Satu Harga: Wujud Nyata Pemerataan Energi di Indonesia, menyebutkan Daerah yang dianggap sangat mendesak dan memerlukan intervensi segera adalah Provinsi Kalimantan dan Sumatera yang tersebar di Krayan Kalimantan Utara, Long Apari Kalimantan Timur, Siberut Tengah Sumatera Barat, dan Pulau-Pulau Batu Sumatera Utara. Selain itu wilayah prioritas berikutnya adalah Papua, Papua Barat, serta Morotai Utara Maluku Utara, wilayah Tanjung Pengamas Nusa Tenggara Barat (NTB) dan juga Waingapu Nusa Tenggara Timur (NTT). Daerah-daerah ini sangat potensial untuk dikembangkan dan pemenuhan kebutuhan konsumsi BBM sangat menunjang keberlangsungan aktifitas usaha kelautan dan perikanan tangkap dan budidaya.

Potensi yang dimiliki Provinsi NTT sangat unik, jika kita melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, dimana panjang garis pantai  $\pm$  5.700 km dan luas laut mencapai 15.141.773,10 ha. Uniknya lagi terdapat 42.685 rumah tangga yang bergerak disektor perikanan, dan 808 Desa/kelurahan berada di garis Pantai. Potensi sumber daya alam yang mendukung dengan banyaknya Terumbu Karang dan Hutan Mangrove untuk dikembangkan dan dimamfaatkan sebagai potensi meningkatkan perekonomian penduduk sekitar Pantai yang berjumlah 1.105.438 jiwa dan 194.684 orang diantaranya berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan Pulau Raas Jawa Timur dan Kepulauan Karimunjawa Jawa Tengah merupakan dua daerah yang masuk dalam daerah prioritas dengan lumbung potensi perikanan

Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH-Migas), capaian selama periode 2017 - 2019 mencapai target sesuai peta jalan yang diinginkan, yakni sebanyak 170 lembaga penyalur yang sudah terbangun masing-masing oleh PT. Pertamina (Persero) sejumlah 160 dan sisanya 10 lembaga penyalur menjadi kewenangan PT. AKR Corporindo, Tbk. Kementerian ESDM sebagai regulator bertugas membagi kewenangan secara proporsional kepada PT. Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. AKR Corporindo, Tbk sebagai pihak swasta untuk lebih lanjut mengatur teknis pembangunan lembaga penyalur yang telah sesuai dengan surat keputusan (SK) Direktur Jenderal Migas nomor 09.K/10/DJM.O/2017 dengan target terbangunnya lembaga penyalur yang terbesar di 148 Kabupaten/Kota.

Pemerintah telah mengamanatkan kepada BPH Migas sesuai Undang-undang No. 22 Tahun 2001 sebagai suatu badan independen yaitu Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. (Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002). Hadirnya BPH Migas berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan menjamin ketersediaan distribusi di seluruh wilayah Indonesia dan meningkatkan pemamfaatannya. Adapun tugas yang diberikan adalah mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM terkhusus pada pengawalan secara intensif pada program BBM satu Harga.

Berdasarkan SK Dirjen Migas 0008.K/15/DJM.O/2020 dan SK Kepala BPH Migas Nomor 01/P3JBT-P3JBKP, pemerintah mencanangkan kembali pembangunan lembaga penyalur diangka yang fantastis tapi tetap realistis dengan target pada tahun 2020 sebanyak 83 titik penyalur yang terbesar di 20 Provinsi, 70 Kabupaten dan 83 Kecamatan dan tetap prioritas pada daerah kepulauan yang sulit dijangkau. Berdasarkan data yang bersumber dari bphmigas (2020), sebanyak 330 titik penyalur menjadi target pembangunan hingga tahun 2024, sehingga total keseluruhan berjumlah 500 titik.

Secara objektif, jika melihat kondisi infrastuktur energi dan keberadaanya untuk pemamfaatan sumber-sumber minyak yang berada ditempat produksi minyak (kilang) sudah berumur puluhan tahun sejak tahun 1922 berdirinya di Balikpapan dan 1935 di Plaju. Menurut data dari kementerian ESDM, kondisi geografis Pulau Jawa yang luasnya hanya 128.297 km<sup>2</sup> memiliki 58 persen total kapasitas kilang Indonesia dan tersebar pada 3 tempat yakni Kilang Balongan di Indramayu, Kilang Cilacap, dan Kilang Cepu, sehingga ongkos distribusi di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat relatif kecil. Sedangkan Pulau Papua yang luasnya 459.412 km<sup>2</sup> hanya memiliki satu kilang yang berada di Kabupaten Sorong yaitu Kilang Kasim dengan kapasitas 1 persen total kapasitas kilang Indonesia. Selebihnya ada kilang minyak di Balikpapan Kalimantan Timur, serta Dumai dan Plaju di Wilayah Sumatera. Dalam konteks ini, tentunya negara dapat mengambil perannya menghadirkan pemerataan, membuat aturan dan menjalankan keadilan energi bukan hanya dinilai pada tingkat produksi dan konsumsi yang dominan di Pulau Jawa, namun lebih terfokus pada prinsip persamaan hak warga negara secara merata. Masalah berikutnya sebagaimana yang dijelaskan diatas adalah kilang yang sudah berumur tua sehingga berkurangnya kemampuan produksi.

Menurut riset Consumer News and Business Channel (CNBC) Indonesia, yang bersumber dari cnbc (2018), konsumsi BBM dalam negeri pada tahun 2016 mencapai 1.62 juta barel per hari (BPH). Sementara itu, menurut data British Petroleum, kapasitas kilang di Indonesia hanya berjumlah 1.16 juta BPH dan kemampuan produksi sekitar 885 ribu

BPH. Namun stok BBM masih saja defisit sehingga pemerintah tidak punya opsi lain dengan harus melakukan kebijakan impor yang berlangsung sejak tahun 1997. Opsi berikutnya tentu membangun kilang baru dengan sumber dan bertambahnya kemampuan volume produksi, namun tidaklah mudah perlu waktu dan membutuhkan investasi yang besar.

Titik-titik kilang minyak tersebut, digunakan sebagai tempat untuk pendistribusian BBM dalam satu provinsi. Sementara itu, masih terbatasnya aksesibilitas dan tantangan infrastruktur yang beragam antar wilayah atau trans provinsi membuat ongkos distribusi menjadi tinggi. Potret tersebut bisa dilihat dari jauhnya jarak antar Kabupaten di Provinsi Papua. Belum lagi kesulitan jarak tempuh sehingga angkutan penyaluran BBM dalam jumlah besar yang dilakukan lembaga penyalur dari terminal bahan bakar minyak (TBBM), lebih rasional memilih menggunakan transportasi air dan sungai dengan waktu tempuh yang panjang sehingga perlu waktu lama untuk sampai kelokasi tujuan. Potret kekinian, masyarakat yang berada di Kabupaten Asmat Papua, Kabupaten Nias Sumatera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, dan Kepulauan Maya Karimata Kalimantan Barat, telah menikmati BBM dengan harga yang sama.

Masyarakat yang berada di wilayah 3T tersebut telah menikmati BBM jenis Premium dengan harga Rp 6.450/liter dan BBM jenis Solar dengan harga Rp 5.150/ liter ditingkat penyalur atau Agen Premium & Minyak Solar (APMS). Angka ini jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya yang bisa mencapai angka puluhan hingga ratusan ribu per liternya. Kebijakan ini merupakan pilihan rasional yang diambil pemerintah dan bersifat progresif untuk melihat permasalahan secara menyeluruh dan solutif. Kebijakan ini juga dinilai sangat humanis dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila yakni sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua masyarakat yang berada di wilayah pegunungan seperti papua, dan wilayah pesisir hingga kepulauan mendapat keadilan yang sama dalam mendapatkan hak sebagai warga negara yakni menggunakan energi sumberdaya mineral dari kekayaan sumber daya mineral dari bumi Indonesia.

Langkah pemerintah ini memiliki efek berganda (*double impact*) sebagai daya ungkit besar dalam menumbuhkan perekonomian warga dan menaikkan tingkat kesejahteraan di wilayah Pesisir dan Kepulauan sehingga pembangunan bisa merata dan seimbang. Mengutip apa yang disampaikan Lasswell dan Kaplan dalam *Encyclopedia of Policy Studies* (1950), bahwa kebijakan publik adalah sebuah program pencapaian tujuan, disertai nilai-nilai yang terukur dan terarah dengan perspektifnya. Sedangkan Anderson dalam *Public Policy Making* (1984), menyebut kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga negara dan pejabat-pejabat pemerintah. Tujuan kebijakan yang dibuat pemerintah adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum melalui peraturan yang baik dan tepat. Tujuan yang baik tersebut mengandung nilai-nilai publik yang berkaitan dengan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*) yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan komunitasnya baik fisik maupun non-fisik.

Dampak positif berikutnya dari kebijakan ini adalah bisa menekan biaya transportasi dan biaya logistik menjadi lebih murah, sehingga harga barang akan ikut turun dan distribusi barang mencapai daerah akan lebih cepat dan mudah. Sehingga perekonomian akan tumbuh dengan baik dan pasar jauh dari kata lesu. Keberpihakan pemerintah dalam memberikan keadilan energi tersebut sangat berdampak juga pada

nelayan. Tentunya harga BBM yang diterima dengan harga yang sama, tentu juga harus diikuti langkah-langkah yang konsisten untuk menjaga ketersediaan pasokan dan distribusinya sehingga ada kesinambungan yang bersifat jangka panjang. Kebijakan ini juga harus bersinergi dan memperhatikan prinsip-prinsip kolaborasi antar badan/lembaga kementerian terkait agar bisa membangun komunikasi secara terbuka, jujur dan saling membantu dan tidak adanya dominasi sektoral yang berakibat pada pengabaian atas nilai-nilai publik.

Masa pandemi *coronavirus disease* (covid-19) yang menyerang dunia global terlebih Indonesia, sangat berdampak pada kehidupan masyarakat dan kebijakan yang dibuat pemerintah harus mengarah pada perbaikan disegala bidang. Berdasarkan data John Hopkins University, pada Minggu 19 Juli 2020, Indonesia mencatatkan penambahan kasus baru sebanyak 1.639 orang sehingga totalnya mencapai 86.521 kasus. Angka tersebut menempatkan Indonesia di urutan 25 terbanyak di dunia, berada diatas China dengan 85.314 kasus. Covid-19 membawa pengaruh yang sangat berarti terutama bagi nelayan diwilayah terdampak dan berkurangnya pasokan energi BBM menjadi terhenti disebabkan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat menurunnya tingkat hasil tangkapan nelayan. Namun demikian, pemerintah harus membangun format baru dan kebijakan yang mempercepat pemulihan ekonomi pesisir dan kepulauan bagi nelayan. Pendekatan sosial budaya dan ekonomi harus menjadi kunci pembangunan perekonomian nelayan dan pemberdayaan serta kelembagaan nelayan.

### **Masyarakat Nelayan, Kapan Sejahtera?**

Rokhmin Dahuri dalam orasi ilmiah pengukuhan sebagai guru besar bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2010 mengatakan bahwa Indonesia dikenal sebagai benua maritim karena merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia. Indonesia adalah negara laut utama yang dikelilingi pulau-pulau, bukan negara kepulauan yang dikelilingi lautan. Wilayah lautnya mencapai 5,8 juta km merupakan wilayah laut terbesar di dunia, dengan garis pantai 95.181 kilometer, seharusnya menjadi sumberdaya alam yang potensial bagi kemakmuran rakyatnya terutama yang tinggal di pesisir. Ironisnya, tingkat kemiskinan masyarakat pesisirnya masih sangat mengkhawatirkan dengan tingkat *poverty headcount index* (PHI) mencapai 32,4%. Angka tersebut sangatlah tinggi.

Dalam konteks kemiskinan, seperti yang disampaikan John Friedman (1979), adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial yang dimaksud Friedman adalah meliputi unsur pertama, modal produktif atas asset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan, seperti *income* dan kredit yang memadai. Ketiga, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. Keempat, *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Dan kelima, adalah informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan dalam konteks ini tentu masyarakat nelayan.

Menyambung apa yang disampaikan diatas, Robert Chambers, sebagaimana yang dikutip oleh Loekman Soetrisno (1995), terdapat dua hal yang menjadi penting dalam konteks kemiskinan, yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan, yang sering mengakibatkan orang miskin menjadi lebih miskin. Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin akan

mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat seperti pada masa pandemi covid-19. Potret tersebut dapat dilihat pada nelayan yang secara mandiri memiliki kapal dan ongkos operasional yang berasal dari individu nelayan sendiri. Nelayan mengalami kesulitan membeli BBM, dan menjadi masa yang sungguh sulit memperoleh hasil yang maksimal baik untuk dikonsumsi maupun dijual. Hal ini diperparah dengan tidak adanya cadangan finansial untuk keperluan yang mendesak. Potret yang sama juga dialami oleh nelayan buruh, mereka bekerja dengan pemilik usaha perikanan, yang membuat semakin tidak berdaya dan pengusaha dan pemilik modal mendominasi hasil produksi nelayan tersebut.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2017, nelayan Indonesia berjumlah 2,7 Juta orang. Angka tersebut mengalami penurunan, bahkan setiap tahun rumah tangga nelayan semakin berkurang karena minat menjadi nelayan rendah dan banyak yang alih profesi kepada pekerjaan yang lebih menjanjikan untuk keberlangsungan hidup keluarga. Nelayan dengan jumlah yang semakin berkurang, dan bahkan didominasi oleh masyarakat kelas bawah dengan sumber daya ekonomi terbatas telah menyumbang 25 persen angka kemiskinan secara nasional. Walaupun satu sisi, sektor ini merupakan salah satu sektor yang menyumbang pendapatan negara tertinggi. Namun, persoalan teknis dan ruang lingkup yang kecil masih membayangi nelayan dan menjadi faktor ketidakberdayaan ekonomi sehingga sulit dan memerlukan waktu yang lama dalam proses pemulihan kemiskinan tersebut. Sebagian besar nelayan masih bersifat tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang masih kuat dan belum terstruktur dengan mafan. Selain itu kemampuan daya beli teknologi dan penggunaan operasional dalam mendukung usaha nelayan masih tergolong sangat rendah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Maju Jilid Pertama, Susi Pudjiastuti mengatakan faktor berkurangnya jumlah nelayan di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir diakibatkan karena pengambilan ikan dalam jumlah besar oleh beberapa negara seperti Vietnam, Malaysia, China, serta Filipina secara ilegal. Pencurian ikan yang secara ilegal dilakukan tersebut menyebabkan daya pantul yang kuat akan faktor menguatkan kemiskinan di masyarakat nelayan sehingga alih pekerjaan baru menjadi solusi yang tak terpikirkan. Faktor lainnya adalah nilai jual hasil tangkapan nelayan di Indonesia tergolong masih rendah. Sangat miris kemudian, jika profesi nelayan dengan kondisi yang dibiarkan semakin parah. Bagaimana kebijakan yang tepat sebagai jalan keluar dalam mengelola lautan dengan potensi jutaan sumberdaya ikan dan sumber lainnya dari ekosistem laut?

Potret kepemimpinan pada era Susi Pudjiastuti bisa jadikan praktik baik (*good practice*) pengelolaan nelayan dan perikanan, yang dianggap sangat peduli kepada nelayan lokal. Buktinya pembatasan kapal asing bahkan sampai pada sanksi berat berupa penenggelaman kapal sering terjadi dilaut Indonesia. Hadirnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), dianggap sebagai angin segar bagi nelayan. Penggunaan alat tangkap juga diatur agar pemerintah serius berpihak kepada nelayan lokal dan tradisional maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Harimau (*Trawl*), Pukat Tarik, dan Pukat Hela di Perairan Indonesia. Selain itu, untuk menopang kebijakan yang superior tersebut, dibentuk tim untuk memperkuat

pengawasan kebijakan dengan membentuk tim Satuan Tugas *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF).

Indonesia sungguh sangat serius dan menghiptonis dunia internasional dengan seruan bernas menteri Susi Pudjiastuti kala itu pada pertemuan tingkat tinggi (*high level panel*) ekonomi kelautan di Oslo, Norwegia. Seruan kebijakan pelarangan alih muatan di tengah laut (*transshipment*) dengan diperkuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/Permen-KP/2014. *Transshipment* dianggap sangat tepat dan sebagai strategi Indonesia untuk mengunci kapal dan memutus permainan dilaut seperti mendistribusikan ikan dan mengganti anak buah kapal (ABK) di tengah laut. Dengan cara begitu, tangkapan ikan nelayan lokal naik drastis hingga lebih dari dua juta ton per tahun Bahkan nilai tukar nelayan juga naik sehingga berdampak pada kesejahteraan nelayan yang meningkat.

Secara detail, jika dilihat kehidupan nelayan dan perannya untuk meningkatkan penghasilan negara merupakan hal yang sangat kompleks. Undang-undang nomor 7 tahun 2016, khususnya tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, bila dipahami secara mendalam kebijakan tersebut mengandung setidaknya beberapa asas diantaranya adanya sebuah kedaulatan, kemandirian, efisiensi-berkeadilan, keberlanjutan, kesejahteraan, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam hal pemberdayaan sangat jelas diatur dalam undang-undang ini, yakni pada pasal 45 yang memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga nelayan. Selain itu sarana pemberdayaan dapat dilakukan berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pembentukan kelembagaan berupa kelompok nelayan dan aksesibilitas akan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi.

Apakah ada jalan keluar lainnya untuk menggapai impian Indonesia sebagai negara maritim dunia yang berdaulat? Jawabnya, tentunya ada dan sangat bisa. Menurut United Nations Development Programs (UNDP) tahun 2017, kekayaan laut Indonesia mencapai sebesar 2,5 triliun dolar Amerika pertahun dan baru dapat dimanfaatkan sebesar 7 persen karena masih terbatasnya kemampuan dalam penggunaan teknologi. Pemerintah pada tahun 2019 kembali menggulirkan program yang bertajuk "*Satu Juta Nelayan Berdaulat*" dengan tujuan meningkatkan kedaulatan ekonomi nelayan Indonesia melalui dukungan teknologi informasi.

Dalam mendukung program tersebut, pemerintah menciptakan aplikasi berbasis android bernama Fish On yaitu teknologi informasi yang memuat fitur tentang informasi pencurian ikan, pengawetan ikan, penjualan ikan, dan komunikasi pencatatan hasil tangkapan ikan. Tersedia juga *panic button* untuk permintaan bantuan dalam kondisi darurat, fitur pembayaran elektronik dan fitur belanja kebutuhan sehari hari. Dengan berkerjasama dengan pihak terkait, komunitas nelayan dilatih dan diberdayakan dalam menggunakan dan mengoperasikan aplikasi tersebut. Aplikasi lainnya yang dikembangkan yakni Fish Net, berguna mendeteksi keberadaan ikan sehingga dalam waktu yang cepat bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak. Terdapat juga aplikasi *e-logbook*, yang bermamfaat sebagai pendataan dan pencatatan ikan oleh nelayan domestik. Hal ini sebagai pendataan yang bertujuan untuk transparansi dan keterbukaan atas penerimaan perpajakan perikanan ke negara.

Apakah implementasi dari program ini, efektif dan mampu meningkatkan pemahaman dasar nelayan lokal yang masih rendah tingkat pendidikannya? Tentu secara peningkatan produksi nelayan akan tinggi, tapi disisi lain misi pemberdayaan dan pembentukan kelembagaan nelayan masih jauh dari respon positif. Hal ini tentunya sangat

berbanding lurus dengan upaya kelompok masyarakat meningkatkan kualitas hidup nelayan menjadi lebih baik dan pemerintah diharapkan peka dalam membangun sistem nelayan secara berkesinambungan. Pemerintah satu sisi mendukung dan menjaga sumberdaya laut sebagai potensi penerimaan negara yang sangat besar, namun juga sisi terpenting bagaimana keberpihakan atas sumberdaya manusia yakni nelayan yang harus dijaga dan diberdayakan agar potensi besar dimamfaatkan untuk mendongkrak pendapatan masyarakat miskin.

Pembangunan basis masyarakat nelayan harus bertumpu pada nelayan itu sendiri, bukan pada pembangunan globalisasi dan kapitalisasi yang sengaja meningkatkan produksi demi kepentingan ekspor dan peningkatan devisa negara tapi malah masyarakat terjebak pada kubangan kemiskinan dan jauh dari kata sejahtera. Upaya-upaya kritis pemerintah untuk memusatkan perhatian kepada masyarakat nelayan tentu tidak mudah sekedar hanya program tanpa keberlanjutan.

Meminjam apa yang disampaikan Korten (1982), bahwa asumsi dasar dari pembangunan yang berpusat pada rakyat menginginkan pembangunan yang tidak berorientasi pada produksi dan kebutuhan dasar semata, akan tetapi akan berorientasi pada potensi manusia. Melalui potensi manusia maka kemampuan pengembangan diri sesuai dengan keinginan dapat diharapkan. Orientasi pembangunan yang berpusat pada rakyat memiliki tiga dasar pemikiran, yakni Pertama, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijaksanaan pemerintah pada penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga dan komunitas. Kedua, mengembangkan struktur organisasi yang berfungsi dengan baik. Ketiga, mengembangkan sistem produksi konsumsi yang diorganisir secara teritorial yang berlandaskan pada pemilikan dan pengendalian lokal.

Dalam konteks pembangunan masyarakat nelayan, pembangunan harus mengarah dan terpusat pada masyarakat sebagai aktor yang didalam perannya memegang kendali sumber daya, menetapkan tujuan dan mampu menjalankan proses dalam keberlangsungan kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada masyarakat akan menghargai dan mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal. Karenanya penting untuk mendukung terciptanya kelembagaan organisasi masyarakat nelayan dan pemberdayaan atas komunitas-komunitas yang telah terbentuk oleh pemerintah maupun organisasi ahli diluar pemerintah.

### **Tantangan New Normal**

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa dan 61,36% di antaranya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan. Potret kemiskinan ini merupakan tantangan kedepan pemerintah, dimana dampak pandemi covid-19 terhadap sumber-sumber penghasilan rumah tangga masyarakat. Bagaimana upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi rumah tangga dan sumber-sumber baru yang bisa dikembangkan? Seperti yang telah disampaikan diatas, kunci pembangunan masyarakat bertumpu pada konsep pemberdayaan dan dengan itu akan kuat kelembagaan masyarakat dalam konteks masyarakat nelayan. Menghadapi era kenormalan baru, pemerintah harus menerapkan format dan pola-pola baru berkenaan dengan kelembagaan masyarakat nelayan dalam penggunaan informasi teknologi, hal ini akan memperkuat keberdayaan masyarakat secara linear dengan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini tentunya masih linear dengan konsep yang ditawarkan oleh Ginanjar Kartasasmita, dalam upaya memberdayakan rakyat, dilakukan melalui tiga cara, yaitu Pertama, membangun dan menciptakan potensi masyarakat untuk berkembang. Kedua, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dengan mengkonsolidasikan ide dan gagasan menjadi langkah nyata, menyediakan infrastruktur fisik dan non-fisik dan kemampuan akses masyarakat arus bawah. Dan ketiga adalah memberdayakan rakyat dan menjadikan masyarakat sebagai tumpuan kuat pada aspek sosio-ekonomi.

Masyarakat harus ikut dalam proses pembangunan dan dalam upaya itu tentunya lembaga pemerintah ditingkat bawah yakni pemerintah Desa berperan penting dalam upaya melakukan pendidikan-pendidikan inklusif bagi masyarakat sesuai kearifan lokal diberbagai daerah. Pendidikan sebagai sebuah upaya nyata dan keberlangsungannya secara jangka panjang agar masyarakat mampu mengangkat dirinya sendiri secara mandiri untuk sejahtera. Pendidikan terhadap masyarakat Desa, juga telah menjadi amanat dalam Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 yang didalamnya memuat pemberdayaan dan pembentukan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Desa. Masyarakat dan pemerintah Desa, harus memulai sebuah program yang baru dan beragam inovasi sebagai jalan keluar dari pancemi covid-19 dan menghadapi era normal baru. Penting bagi Pemerintah Desa membuka diri untuk mengali sumber-sumber penghasilan baru yang dimanfaatkan masyarakat dengan membangun dan merumuskan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk menjaring potensi ekonomi lokal dan dikembangkan untuk kemandirian warga setempat. Masyarakat juga harus bergerak mandiri dengan membentuk koperasi usaha nelayan atau sejenisnya sebagai upaya bersama membangun kekuatan finansial dan modal tersebut berguna sebagai pengembangan unit usaha terpadu pengelolaan hasil produksi berikutnya.



# TULUNGAGUNG: POTRET MASYARAKAT RURAL BERTAHAN DALAM PANDEMI COVID-19

Reza Praditya Yudha

---

**Pengutipan:** Yudha, R. P. (2020). Tulungagung : Potret Masyarakat Rural Bertahan Dalam Pandemi Covid-19. In Kriswibowo, A. & Nawangsari E. R. (Eds.), Potret Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi tantangan Pandemi Covid-19. Surabaya: Penerbit Prodi Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur.

---

*Artikel ini memaparkan dinamika masyarakat rural dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19. Penulis berargumen bahwa media merelasikan kehidupan masyarakat rural pada isu global Covid-19. Penulis melakukan pengamatan di Tulungagung dan menggunakan konsep mediatisasi untuk melihat jalinan masyarakat dengan media. Penulis menemukan adanya keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan digital yang menyebabkan terjadinya mediatisasi langsung dan tidak langsung. Diantara berbagai media komunikasi, media sosial memiliki peran besar dalam membentuk wacana, praktik komunikasi, dan merubah aktivitas sosial pada masyarakat rural di masa pandemi.*

## Pendahuluan

Isu Covid-19 menyebar melalui media massa dan media sosial secara global, hingga pelosok daerah. Salah satu wilayah rural di Jawa Timur yang beberapa kali menjadi pemberitaan terkait isu Covid-19 adalah Tulungagung. Tulungagung mengidentifikasi pasien pertama pada 29 Maret<sup>1</sup> dan sempat berada pada puncak penambahan kasus tertinggi di pertengahan Juni<sup>2</sup>, namun kemudian menunjukkan penurunan angka hingga hanya dua pasien dalam penanganan per 12 Juli 2020<sup>3</sup>. Sebaliknya, Jawa Timur mengumumkan adanya enam pasien pertama yang positif pada 17 Maret 2020<sup>4</sup> dan menempati peringkat tertinggi kasus Covid-19 di Indonesia sejak 26 Juni 2020<sup>5</sup> hingga saat ini (12 Juli 2020).

Selain kontras dalam hal kurva pasien Covid-19, Tulungagung juga menunjukkan beberapa dinamika sosial yang berbanding terbalik dengan berita krisis pandemi Covid-19. Salah satu contoh adalah keterpurukan ekonomi global akibat pandemi, yang justru menyisakan keuntungan bagi sekelompok pengusaha konveksi di Tulungagung. Selama ini, industri konveksi adalah kompetensi inti (Kurniawan, 2018) perekonomian masyarakat Tulungagung.

Sebelum pandemi, konveksi yang berskala kecil dan menengah di Tulungagung memproduksi seragam sekolah, mukena, pakaian dalam, atau pakaian bayi. Pada saat pandemi, beberapa pasar ditutup dan angka penjualan menurun. Bertepatan dengan himbuan pemakaian masker, pemilik konveksi beralih memproduksi masker kain. Beberapa penduduk juga memasarkan masker secara pribadi melalui media sosial. Mereka kemudian mendapat banyak keuntungan karena tingginya permintaan masker. Sebagai

---

<sup>1</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/1420113/pasien-pertama-covid-19-tulungagung-semuh>

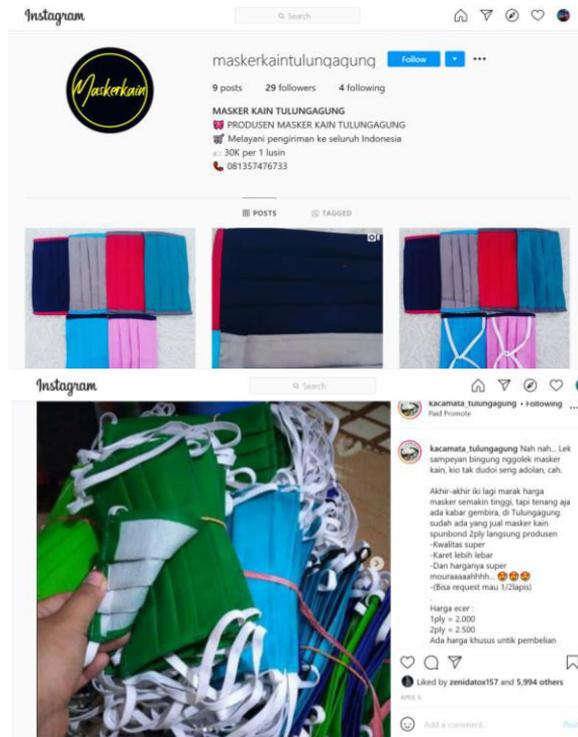
<sup>2</sup> <https://surabaya.liputan6.com/read/4280113/terjadi-lonjakan-kasus-covid-19-terbanyak-selama-pandemi-di-tulungagung>

<sup>3</sup> <http://dinkestulungagung.net/datainformasi/covid19-trend-di-kab-tulungagung/>

<sup>4</sup> <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/gubernur-afirmasi-enam-kasus-positif-covid-19-pertama-di-jatim/>

<sup>5</sup> <https://jeo.kompas.com/update-pergerakan-data-harian-covid-19-di-indonesia>

gambaran, salah satu konveksi dengan tujuh pegawai, sebelum pandemi memiliki laba Rp. 150 ribu per hari (hasil wawancara). Saat pandemi, keuntungan meningkat hingga Rp. 2 juta per hari dengan produksi 8 ribu lembar masker kain dan penambahan empat pegawai. Bukan hanya untuk pasar lokal, pemerintah daerah kemudian juga mengekspor masker untuk membantu tenaga kerja Indonesia di luar negeri<sup>6</sup>, terutama yang berasal dari Tulungagung<sup>7</sup>.



Gambar di atas merupakan contoh pemasaran masker secara pribadi melalui media sosial. Apa yang terjadi di Tulungagung belum tentu berlangsung di daerah lain. Berbagai aspek sosial, terutama media, melatarbelakangi dan berkontribusi pada dinamika masyarakat Tulungagung. Untuk itu, artikel ini memaparkan bagaimana situasi, aspek, dan para aktor sosial di Tulungagung berelasi di masa pandemi. Penulis berharap, artikel ini dapat memberi gambaran dan memperkaya wawasan pada studi komunikasi, budaya, dan media.

## Pembahasan

WHO (2020) dan pemerintah<sup>8</sup> menetapkan aturan pembatasan sosial dan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus. Sarjana menyatakan penggunaan media selama masa pandemi meningkat (Fuch, 2020), karena masyarakat mengganti bentuk interaksi dari tatap muka langsung menjadi dimediasi. Sarjana menyatakan keberadaan media adalah esensial dalam interaksi (Subramanian, 2017), terutama ketika masyarakat

<sup>6</sup> <https://republika.co.id/berita/q5lkja327/pemkab-tulungagung-kirim-masker-ke-bmi-di-hongkong>

<sup>7</sup> Tulungagung adalah salah satu daerah asal tenaga kerja Indonesia terbesar di Jawa Timur (Romdiati, 2012)

<sup>8</sup> [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176085/PP\\_Nomor\\_21\\_Tahun\\_2020.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176085/PP_Nomor_21_Tahun_2020.pdf)

memiliki relevansi sosial namun tidak mempunyai pengalaman langsung (Adoni & Mane, 1984). Hal inilah yang terjadi pada pemberitaan Covid-19. Pada awal WHO mengidentifikasi dan menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global (WHO, 2020), masyarakat Tulungagung tidak mengalami langsung. Namun, masyarakat dapat mengetahui informasi penyebaran Covid-19 di berbagai negara melalui media sosial, situs internet, atau media massa.

Sarjana mengamati fungsi media yang semakin komprehensif (Schulz, 2004). Artinya, media bukan hanya menjadi perantara pesan, melainkan juga telah mengganti fungsi berbagai lembaga sosial (Stromback, 2008) hingga menciptakan *mediatisasi* (Lundby, 2014; Krotz & Hepp, 2013). Penulis memahami mediatisasi sebagai sebuah proses perubahan sosial dan kultural yang berhubungan timbal balik dengan perkembangan media dan praktik komunikasi (Hepp, Hjarvard, & Lundby, 2010). Dengan kata lain, mediatisasi memerlukan jalinan media-media komunikasi (transmedia) (Jansson, 2013) agar dapat berintegrasi dengan berbagai institusi dan aktor dalam masyarakat. Sarjana mediatisasi melihat kebaruan suatu teknologi media tidak lantas menghilangkan media lama (Hepp, 2014). Melainkan, terjadi konvergensi (Jenkins, 2001) sehingga terbentuk media yang *hybrid* (Sveningsson, Lövheim, & Bergquist, 2003) yang membuat batas dan karakter media massa konvensional tidak lagi jelas dengan media komunikasi lain, bahkan seperti media sosial yang bersifat pribadi.

Pada situasi termediatisasi, media mampu membentuk wacana dan komunikasi masyarakat (Lilleker, 2008). Namun demikian, transformasi masyarakat tetap melibatkan aspek sosial lain seperti ekonomi, politik, atau budaya. Sehingga, sarjana mengatakan bahwa mediatisasi adalah sebuah *metaproses* (Krotz, 2007); yaitu sebuah perubahan yang membutuhkan waktu panjang dan melibatkan berbagai aktor atau elemen sosial dalam masyarakat.

Penulis berargumen bahwa konsep mediatisasi tepat untuk mengurai dinamika masyarakat, karena dapat melihat peran vital media dalam kehidupan tanpa menghilangkan atau mereduksi aspek-aspek sosial lain (Lundby, 2014). Dalam studi media, beberapa sarjana juga berargumen bahwa keberadaan, makna, dan penggunaan media berkaitan dengan situasi sosial dan budaya (Silverstone, 1994). Itulah sebabnya, respon atau reaksi pengguna akan berbeda ketika menerima sebuah informasi yang disajikan oleh media (Halls, 1980).

### **Ekosistem Media Masyarakat Tulungagung**

Penulis melihat perubahan dalam ekosistem media (Anderson, 2013) dan praktik komunikasi masyarakat Tulungagung. Jumlah wartawan dan media konvensional telah berkurang<sup>9</sup> di Tulungagung. Namun, riset menunjukkan kebutuhan bermedia masyarakat Tulungagung tetap tinggi (Ardiyanti, 2019) terutama pada komunikasi digital. Hal ini lantaran banyaknya warga yang bekerja di luar negeri dan menggunakan media sosial untuk memberi informasi, menjalankan usaha, dan memelihara relasi dengan keluarga (Pranata, 2009: 109). Artinya, masyarakat Tulungagung memiliki kebutuhan atas media, terutama media digital.

---

<sup>9</sup> <https://nasional.tempo.co/read/286326/80-persen-wartawan-di-tulungagung-tak-punya-media/full&view=ok>

Penulis juga mengamati bentuk konvergensi media massa konvensional dengan internet. Misalnya, dalam akun instagram @jtv\_tulungagung. JTV (Jawa Pos Media Televisi) sebelumnya adalah televisi swasta regional yang beroperasi di Jawa Timur. Kini, JTV telah mengintegrasikan internet dan tampil dalam bentuk TV *streaming* (<http://www.jtv.co.id/home.php>) dan instagram (@jtv\_rek). Di beberapa daerah, JTV melipat informasi lokal dan menampilkannya melalui akun publik setempat, misalnya @jtv\_tulungagung. Penulis memahami, jaringan media tersebut adalah sebagai bentuk konvergensi untuk menjaring pasar sebanyak-banyaknya. Sarjana menyatakan bahwa setiap media memiliki karakter berbeda dalam membentuk keterlibatan pengguna (Meyrowitz, 1994). Dengan konvergensi, media akan berinovasi dan menciptakan pasar. Sehingga, konvergensi juga menjadi bentuk pertahanan industri media dalam kompetisi dan tekanan biaya operasional (Sumartias & Hafizni, 2017).

Penulis mempelajari potensi yang besar atas pengguna media sosial di Tulungagung berdasarkan usia. Dengan kata lain, Tulungagung memiliki sumber daya dan menjadi pasar yang tepat atas media sosial. Data statistik (Kab. Tulungagung dalam Angka, 2020) menunjukkan bahwa dari total 1.039.284 penduduk di Tulungagung, hampir sepertiga atau 293.799 jiwa berada pada rentang usia remaja. Hal ini selaras dengan riset yang menunjukkan bahwa remaja Indonesia berusia 16-30 tahun<sup>10</sup> adalah pengguna media sosial tertinggi di Asia Tenggara (Susilo & Putranto, 2018).

Namun demikian, kebutuhan komunikasi digital yang tinggi di Tulungagung berbanding terbalik dengan ketersediaan infrastruktur internet. Tulungagung tidak tergolong maju dalam pembangunan infrastruktur internet jika dibandingkan dengan kota / kabupaten lain di sekitarnya. Pada tahun 2000, salah satu penyedia internet swasta Biznet telah membangun program hotspot gratis *Connecting Indonesia*. Sayangnya, Biznet baru menyediakan fasilitas internet gratis di Tulungagung pada Januari 2018. Saat ini, Tulungagung hanya memiliki 11 titik hotspot gratis. Sebagai perbandingan, Kabupaten/Kota Kediri yang terletak di utara Kabupaten Tulungagung telah memiliki 27 titik. Keterbatasan infrastruktur digital membuat isu pandemi menyebar di Tulungagung tidak hanya melalui media berbasis internet. Beberapa masyarakat mengetahui dari percakapan atau sosialisasi pemerintah daerah. Sarjana menjelaskan situasi sosial yang telah bertransformasi dan menggunakan media sebagai rujukan diskusi sebagai bentuk mediatisasi lemah atau mediatisasi tidak langsung (Hjarvard, 2008). Hal inilah yang terjadi di Tulungagung, terutama pada beberapa penduduk yang bekerja sebagai petani atau nelayan yang tidak terekspos media secara langsung.

Penulis melihat masyarakat Tulungagung telah berusaha memanfaatkan internet, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Tahun 2017 menjadi simpul penting perkembangan sosial di Tulungagung yang memperlihatkan relasi erat dengan internet. Pertumbuhan ekonomi paling besar di Tulungagung berubah, dari sebelumnya 8,02% dari sektor industri, menjadi 8,34% dari sektor komunikasi dan transportasi. Di tahun tersebut, masuk transportasi berbasis online yang juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (Lembaga Demografis UI, 2017). Uniknya, pioner aplikasi online nomor satu di Indonesia, Gojek, tidak eksis di Tulungagung. Justru masyarakat setempat mengembangkan ojek berbasis aplikasi mandiri, Tulungjek dan OmJek.

---

<sup>10</sup>[http://kemenpora.go.id/news/UU\\_40\\_2009.pdf](http://kemenpora.go.id/news/UU_40_2009.pdf)

Praktik komunikasi menggunakan media di Tulungagung mendukung tesis bahwa internet menjadi teknologi baru yang revolusioner (Leiner et al., 2009). Artinya, internet membuat pengguna mampu menciptakan bahkan memanipulasi informasi (Woolley & Howard, 2019). Bahkan, kemampuan algoritma internet mampu memunculkan wacana hingga sarjana mengistilahkannya sebagai *new agenda setter* (Wohn & Bowe, 2014) atau agen sosial (Hjarvard, 2015).

### **Masyarakat Tulungagung dalam Pandemi Covid-19**

Penulis merujuk pada argumen Berger & Luckmann (1966) yang menyatakan bahwa manusia senantiasa menyesuaikan, mengadopsi, dan mempraktikkan berbagai pengetahuan dalam lingkungan sehari-hari. Dengan kata lain, manusia dan berbagai elemen sosial akan selalu bergerak sesuai dengan dinamika masyarakat. Situasi sosial tiap masyarakat yang berbeda, menciptakan bentuk transformasi yang bervariasi. Pemberitaan menunjukkan produsen dan distributor masker di tempat lain mengalami kerugian (suara.com, 2020), kontras dengan keuntungan pengusaha masker di Tulungagung. Penulis berargumen, apa yang terjadi di Tulungagung adalah akumulasi dari situasi sosial dan historis masyarakat setempat. Masyarakat Tulungagung telah terbiasa dengan industri konveksi, memiliki banyak tenaga kerja, tersedia toko kain dan alat konveksi, adanya kebutuhan, serta jaringan kerjasama dengan grosir / pasar yang telah dibangun turun-temurun. Hal-hal tersebut belum tentu ditemukan oleh produsen atau distributor masker di wilayah lain.

Peneliti juga mengamati karakter orang Tulungagung yang adaptif, kompak, dan mandiri. Nilai adaptasi tercermin dalam sikap masyarakat Tulungagung yang berkenan menerima, mempelajari, dan menyesuaikan transformasi sosial. Contohnya pada keberadaan TulungJek dan OmJek, serta perubahan produksi konveksi menjadi masker. Kemudian nilai kekompakan, terefleksi pada upaya masyarakat untuk berdikari dalam kekurangan dan bekerja bersama – sama memanfaatkan keterbatasan yang ada. Hal ini sebagaimana nampak pada keberhasilan sektor komunikasi dan transportasi dalam meningkatkan perekonomian, di tengah infrastruktur internet yang terbatas. Sementara itu, langkah pemilik TulungJek dan OmJek untuk menciptakan dan mendayagunakan masyarakat lokal juga menjadi bentuk kekompakan. Di masa pandemi, kekompakan masyarakat terwujud dalam kegiatan penyemprotan disinfektan oleh GP Anzor ke klenteng dan wihara<sup>11</sup>. Artinya, kekompakan masyarakat Tulungagung telah melampaui perbedaan agama. Padahal, selama ini agama menjadi isu sensitif yang potensial menimbulkan konflik sosial di Indonesia (Lim, 2017) Sedangkan karakter mandiri, selain ditunjukkan oleh tindakan masyarakat untuk memasarkan masker secara pribadi melalui media sosial, juga terlihat dari praktik warga secara berkelompok. Misalnya, warga membuat gerbang desinfektan<sup>12</sup> untuk mensterilisasi kendaraan yang masuk pemukiman secara swadaya.

Satu fenomena menarik lain di masa pandemi adalah bentuk integrasi internet pada tradisi *megengan*. *Megengan* adalah salah satu tradisi muslim di Tulungagung yang

<sup>11</sup> <https://jatimtimes.com/baca/211499/20200325/175900/gp-ansor-tulungagung-semprot-kelenteng-dan-wihara-dengan-disinfektan>

<sup>12</sup> <https://surabaya.tribunnews.com/2020/03/25/cara-warga-jepun-permai-tulungagung-antisipasi-virus-corona-bikin-gerbang-sterilisasi-mandiri>



19. Keragaman informasi yang ditampilkan media, terutama media berbasis internet, akan membuat pengguna semakin dipenuhi dengan berbagai informasi (Couldry, 2009). Sehingga, pengguna harus memiliki kesadaran untuk memilih, memverifikasi, dan mengadopsi informasi yang sesuai dengan budaya dan situasi sosialnya untuk mendapatkan dampak positif dari internet. Jika tidak, informasi internet akan berpotensi pada kesalahpahaman bahkan konflik sosial (Gohdes, 2018).

## Kesimpulan

Di era mediatisasi, komunikasi publik tidak hanya diperantarai oleh media massa seperti televisi, koran, atau radio. Berbagai medium telah menjadi media komunikasi yang mampu menghubungkan berbagai aktor sosial, baik individu, institusi, bahkan masyarakat global. Internet menjadi teknologi yang membuat berbagai medium tersebut membentuk jalinan. Sehingga, sebuah informasi dapat sampai pada masyarakat melalui media yang berbeda, seperti media sosial, website, atau aplikasi berbagi pesan.

Dalam artikel ini, jalinan media membuat masyarakat rural relevan dengan isu global Covid-19. Meskipun masyarakat memiliki keterbatasan infrastruktur dan teknologi digital, namun mereka berada dalam lingkungan yang telah bertransformasi dan menggunakan media sebagai rujukan diskusi publik. Sebagai sebuah kesatuan jaringan sosial, masyarakat akan mendapatkan dampak dari isu global. Namun demikian, masing-masing masyarakat akan memiliki mekanisme sosial berbeda dalam menerima, menafsirkan, dan mempraktikkan isu-isu tersebut. Termasuk, cara masyarakat Tulungagung dalam menyikapi isu dan peraturan pemerintah akan berbeda dengan masyarakat di daerah lain.

Pemahaman atas sebuah masyarakat membutuhkan pengamatan yang mendalam, kontekstual, dan spesifik. Penulis berharap artikel dan riset selanjutnya akan mengeksplorasi kompleksitas sosial dan kemajemukan budaya yang berelasi dengan kesenjangan digital di Indonesia. Kekhasan budaya dan situasi sosial di Indonesia akan memberi warna tersendiri untuk melengkapi studi-studi sosial dari perspektif Barat.

## Referensi :

- Adoni, H., & Mane, S. (1984). "Media and the social construction of Reality : Toward an Integration of Theory and Research". *Communication Research*, 11 (3), 323–340.
- Anderson, C.W. (2013). *Media Ecosystems : Some Notes Toward a Genealogy of the Term and an Application of it to Journalism Research*. [https://pdfs.semanticscholar.org/a8e4/edef4a7d1c65ae15254deb0756e402fc4914.pdf?\\_ga=2.98743325.2037002176.1594754907-865543496.1579069071](https://pdfs.semanticscholar.org/a8e4/edef4a7d1c65ae15254deb0756e402fc4914.pdf?_ga=2.98743325.2037002176.1594754907-865543496.1579069071).
- Ardiyanti, Devi. 2019. "Dampak Dana Remitansi Tenaga Kerja Indonesia Bagi Kemandirian Ekonomi Keluarga dan Perekonomian Masyarakat Purworejo Ngunut Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam". (Skripsi IAIN Tulungagung)
- Berger, P. L. and T. Luckmann. (1966), *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Garden City, NY: Anchor Books.
- Couldry, Nick. (2009). "My Media Studies: Thoughts from Nick Couldry" *Television & New Media*. No. 1, 40–41.
- Susilo, Daniel & Putranto, T. D. (2018), "Indonesian Youth on Social Media: Study on Content Analysis". *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. <https://doi.org/10.2991/sshr-17.2018.15>

- Fuchs, C. (2020). Everyday Life and Everyday Communication in Coronavirus Capitalism. *tripleC*, 18(1), 375-399.
- Gohdes, A. R. (2018). Studying the Internet and Violent conflict. *Conflict Management and Peace Science*, 35(1), 89–106. <https://doi.org/10.1177/0738894217733878>
- Hall, S. (1980). Encoding/decoding. *Culture, Media, Language*, 128-138. (diunduh dari [http://www.hu.mtu.edu/~jdslack/readings/CSReadings/Hall\\_Encoding-n-Decoding.pdf](http://www.hu.mtu.edu/~jdslack/readings/CSReadings/Hall_Encoding-n-Decoding.pdf) ).
- Hepp, A., Hjarvard, S., & Lundby, K. (2010). “Mediatization – Empirical Perspectives: An Introduction to a Special Issue”. *Communications*, 35(3), 223-228. <https://doi.org/10.1515/comm.2010.012>
- Hjarvard, S. (2008). The Mediatization of Society, *Nordicom Review*, 29(2), 102-131. doi: <https://doi.org/10.1515/nor-2017-0181>
- Jenkins, H. (2001). “Convergence? I Diverge.” MIT Technology Review. Online at <http://www.technologyreview.com/article/401042/convergence-i-diverge/>
- Krotz, F. (2007). “The Meta-process of Mediatization as a Conceptual Frame”. *Global Media and Communication*, 3(3), 256-260 <https://doi.org/10.1177/17427665070030030103>
- Kurniawan, Mochaman Arif. (2018). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Industri Kecil Konveksi (Studi Kasus di Kelompok Usaha Bersama Konveksi Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 6/No. 1
- Leiner, Barry M, et. al. (2009). “A Brief History of the Internet”. *SIGCOMM Comput. Commun. Rev.* 39, 5 (October 2009), 22–31. DOI:<https://doi.org/10.1145/1629607.1629613>
- Lilleker, D. (2008). *Key Concepts in Political Communications*. SAGE London.
- Lim, M. (2017). “Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the rise of Tribal Nationalism in Indonesia”. *Critical Asian Studies*. 49 (3), 411-427.
- Meyrowitz, J. (1994). *Medium Theory in Communication Theory Today*. Cambridge: Polity Press.
- Silverstone, Roger. (1994). *Television and everyday life*. London ; New York : Routledge
- Subramanian, K. (2017). “Influence of Social Media in Interpersonal Communication”. *International Journal of Scientific Progress and Research*. Vol 38, No 109 (70-75).
- Sumartias, S., & Hafizni, M. (2017). Convergence Trends in the Television Media Industry - A Case Study on the Implementation of Media Convergence in Metro TV Jakarta. *KnE Social Sciences*, 2(4), 83-89. <https://doi.org/10.18502/kss.v2i4.871>
- Sveningsson, M., Lövheim, M., & Bergquist, M. (2003). *Att fånga Nätet: Kvalitativa Metoder för Internetforskning (Capturing the Web: Qualitative Methods for Internet Research)*. Lund: Studentlitteratur.
- Wohn, D. Y., Bowe, B. J. (2014). “Crystallization : How social media facilitates social construction of reality”. *Proceedings of the companion publication of the 17th ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work & Social Computing*. Baltimore, MD, 261–264.
- Woolley, S., & Howard, P. (Eds.). (2018). *Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media*. Oxford University Press. <https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780190931407.001.0001/oso-9780190931407>.

**Lain-lain :**

1. <https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19>
2. <https://tulungagungkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NjNkNDk1NjJjNjQ5OGY0OWE2MjAwNzNh&xzmn=aHR0cHM6Ly90dWx1bmdhZ3VuZ2thYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMC8wNC8yNy82M2Q0OTU2MmM2NDk4ZjQ5YTYyMDA3M2Eva2FidXBhdGVuLXR1bHVuZ2FndW5nLWRhbGFtLWFuZ2thLTIwMjAuaHRtbA%3D%3D&twoadfnearfeauf=MjAyMC0wNy0xNCAxMjoxNToyMw%3D%3D>
3. <https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19#:~:text=WHO%20announced%20COVID%2D19,on%2011%20March%202020.>
4. <https://www.suara.com/news/2020/05/02/131917/pedagang-jual-rugi-masker-bedah-150-ribu-per-boks-malah-diamuk-warganet>
5. Wawancara dengan Mahmudah, pemilik Zakia Konveksi Tulungagung, Desa Kedungsuko 10 Juli 2020.



# TANTANGAN MASYARAKAT KAWASAN WISATA AIR DALAM MENGHADAPI *NEW NORMAL*

## Sebuah Kajian Pada Wisata Pemandian Umbul Ponggok, Polanharjo, Klaten

Erwin Kusumastuti

---

**Pengutipan:** Kusumastuti, E. (2020). Tantangan Masyarakat Kawasan Wisata Air Dalam Menghadapi *New Normal* (Sebuah Kajian Pada Wisata Pemandian Umbul Ponggok, Polanharjo, Klaten). In Kriswibowo, A. & Nawangsari E. R. (Eds.), *Potret Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi tantangan Pandemi Covid-19*. Surabaya: Penerbit Prodi Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur.

---

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan keindahan alamnya, termasuk di dalamnya potensi wisata. Sejak tahun 2017, branding iklan *Wonderful Indonesia* mengantarkan pesona pariwisata Indonesia sebagai produk unggulan yang kompetitif di Negara ASEAN. Sehingga pariwisata Indonesia dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian negara. Namun dalam waktu lima bulan terakhir semenjak pandemic covid-19 melanda lebih dari 200 negara telah membawa banyak perubahan dalam berbagai sendi kehidupan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terpuruk dan nyaris tumbang karena pandemi Covid 19. Virus Corona yang banyak memakan korban memaksa setiap orang untuk melakukan pencegahan sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran penyakit mematikan ini. Hal ini akhirnya membuat banyak orang yang enggan untuk keluar rumah. Dampak besar covid-19 pada sektor pariwisata adalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Tidak hanya perhotelan, restoran maupun *event organizer* (EO), tetapi jutaan pekerjaan terkait semua sektor pariwisata terkena dampaknya.

Wishnutama berkata bahwa, “Ada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), kemudian penduduk daerah yang andalan pariwisata daerahnya. Lalu pekerjaan *supplier* dan berbagai pekerjaan terkait pariwisata lainnya juga terkena dampak”. Untuk saat ini, pemerintah sedang berupaya menyiapkan berbagai langkah mengurangi virus corona, terlebih pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif<sup>1</sup>. Sektor pariwisata mengalami pemerosotan pendapatan secara drastis. Banyak destinasi wisata yang rugi besar-besaran karena tidak dapat beroperasi lagi saat beberapa daerah menerapkan *lockdown*.

*Lockdown* menjadi langkah yang dilakukan beberapa daerah untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Beberapa daerah ada pula yang menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Namun sekarang beberapa daerah telah melonggarkan PSBB. Ini menandakan sudah berakhirnya *lockdown* dan mulai memasuki masa *new normal* meskipun pandemi belum berlalu. Lalu bagaimanakah kesiapan industri pariwisata untuk menata sistemnya kembali di saat beberapa daerah mulai memberlakukan *new normal*?

Sejatinya membuka kembali sektor pariwisata di tengah pandemi covid-19 yang belum 100% tuntas ini memang beresiko tinggi. Ada banyak hal yang harus diperhatikan,

---

<sup>1</sup> Ivana Solemede, Trivena Tamaneha dkk., *Strategi Pemulihan Pariwisata Budaya di Provinsi Makuku (Suatu Kajian Analisis di Masa Transisi Kenormalan Baru)*, Noumena Jurnal Ilmu social Keagamaan. Ambon: Institut Agama Kristen Negeri Ambon

mulai dari protokol kesehatan, akomodasi, infrastruktur maupun fasilitas yang ada di tempat dan di sekitar pariwisata tersebut. Bahkan dalam pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Mei 2020 pun mengatakan akan ada aturan yang ketat di masa *new normal* pandemi covid-19 agar semua kegiatan tetap produktif dan aman, termasuk di antaranya kegiatan pariwisata.

*New normal* bukan berarti *back to normal*, kembali seperti sedia kala. Akan tetapi *new normal* adalah kehidupan pasca pandemi dengan beragam protokol kesehatan demi mencegah terjadinya gelombang kedua virus covid-19. *New normal* diberlakukan agar sendi perekonomian tetap berjalan, tidak lumpuh. Sehingga roda kehidupan tetap bisa menyala. Memang kita tidak bisa memilih antara ekonomi dan kesehatan. Sebab keduanya harus tetap ada dan beriringan agar berjalan selaras. Namun jelang *new normal*, sejumlah tempat wisata di Klaten masih dilarang beroperasi. Sebagai contohnya yaitu kawasan wisata air di daerah Klaten<sup>2</sup>, Jateng. Banyak wisata air di daerah Klaten Jawa Tengah, seperti; Umbul Ponggok, Umbul Sigedang, Umbul Besuki, Umbul Manten, Umbul Brintik, Umbul Pelem, Umbul Nilo, Umbul Manten, Umbul Kapilaler, Umbul Siblarak, Umbul Mata Air Cokro, Waterr Gong, Ponggok Ciblon Si Umbul Banyu Mili, Umbul Jolotunda, River Tubing Puser dan masih banyak lainnya..

Sri Nugroho, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) dalam wawancara radar Solo mengatakan: “Kita masih menunggu tindak lanjut dan regulasi pemerintah pusat terkait pembukaan objek wisata. Jangan dikira setelah *new normal*, objek wisata bisa langsung dibuka begitu saja. Diperlukan SOP (*Standard Operational Procedure*)”<sup>3</sup>. Ada 33 objek wisata di Klaten yang dikelola pemkab (Pemerintah Kabupaten) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ditutup sejak Maret 2020. Sontak hal ini menjadikan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata mengalami penurunan secara drastis.

Salah satu destinasi wisata yang terdampak pandemi covid-19 adalah wisata Umbul Ponggok<sup>4</sup>, yakni wisata pemandian air peninggalan Belanda. Wisata Air Umbul Ponggok harus menelan buah simalakama terlebih saat sudah memasuki *new normal* seperti sekarang ini. Bagaimana tidak, jika mereka memilih untuk tetap *lockdown* tentunya akan berdampak pada pendapatan kas desa dan juga warga setempat, namun jika melakukan *new normal* akan menghadapi tantangan yang berat.

---

<sup>2</sup> Klaten memang dikenal sebagai salah satu daerah yang banyak memiliki wisata air, pemandian, kolam renang dan waterboom. Khususnya di daerah Jatinom, Ponggok dan Cokro. Sebab daerah-daerah tersebut memiliki sumber mata air yang jernih. Bahkan sebagian mata air di Klaten di ambil oleh beberapa produsen air mineral.

<sup>3</sup> <https://radarsolo.jawapos.com>. Diakses pada 23 Juli 2020, jam 21.30 WIB

<sup>4</sup> Umbul Ponggok merupakan wisata air yang terletak di desa Ponggok, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Umbul Ponggok merupakan mata air yang dimanfaatkan sebagai objek wisata, pemandian dan snorkeling. Kolam Umbul Ponggok berukuran panjang 70 meter lebar 40 meter dan tinggi mencapai 1,5-2 meter dari permukaan air. Mata air yang terletak di dasar kolam dan terus mengalir menjadikan Umbul Ponggok selalu terlihat jernih. Pada dasar kolam terdapat ikan dan bebatuan yang mempercantik untuk tempat snorkeling, diving dan foto di dasar air. Lebih detail lihat tesis Erwin Kusumastuti, *Strategi dan Praktek Kerukunan Beragama dalam Perspektif Pendidikan Multikultural (Studi di Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten)*., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016.

Pasalnya mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena wajib menerapkan protokol kesehatan covid-19 untuk memberi rasa aman bagi wisatawan dan masyarakat sekitar tempat wisata. Disamping itu jumlah wisatawan belum stabil seperti biasanya karena wajib menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Para wisatawan tentu juga akan cenderung untuk mempertimbangkan faktor higienis dan keamanan. Mereka tentu tidak hanya mempertimbangkan mengenai kepuasan tetapi juga keamanan kesehatan. Namun ketika protokol kesehatan diberlakukan di daerah wisata tentu akan memakan *budget* yang besar tidak hanya untuk penyedia wisata tetapi juga pelaku wisata itu sendiri.

Belum lagi akan mengalami kendala ketika melakukan pembatasan baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Dari segi internal misalnya pembatasan jumlah pengunjung, durasi jam buka tempat wisata, jumlah petugas kesehatan dan lain-lain. Dari segi eksternal misalnya wisatawan lenggah untuk kesiapan APD (Alat Pelindung Diri/menggunakan masker), jaga jarak satu dengan lainnya, pemakaian *hand sanitizer* dan lain-lain. Pemerintah desa menyadari tidak akan mudah memberlakukan pembatasan di daerah wisata. Yang lebih berat lagi, misalnya ada yang reaktif dari *klaster* Umbul Ponggok, maka untuk mengembalikan citra baik dan kepercayaan masyarakat tentu tidak mudah.

Pemerintah desa dan masyarakat setempat tentunya menginginkan keberlangsungan di lingkungan tempat tinggal mereka yang aman dan terhindar dari covid-19. Untuk saat ini masih banyak pertimbangan ketika akan memulai *new normal* di daerah wisata. Akan tetapi ketika sudah ada surat edaran dari dinas yang membolehkan untuk pembukaan tempat wisata, maka pemerintah desa akan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Seperti menyiapkan dan meverifikasi SOP (*Standard Operational Procedure*) *Clean, Health and Safety* dengan baik dan benar sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan dan masyarakat saat memasuki era *new normal*.

Kepala Desa Ponggok, Junaidi Mulyono, mengatakan tak buru-buru untuk membuka objek wisata. Beliau sedang menunggu surat edaran dari dinas pariwisata. Saat ini beliau sedang mematangkan protokol pencegahan penularan covid-19 agar penyedia dan pelaku wisata sama-sama aman dan terhindar dari virus covid-19. "Kita sedang menunggu surat edaran dinas pariwisata. Kalau memang pemerintah sudah membolehkan tempat wisata dibuka kita siapkan standarisasi protokol kesehatan covid-19", kata Junaidi Mulyono.

Kepala Desa Ponggok beserta jajarannya tengah menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menyambut *new normal*. Kunjungan ke kantor desa, tempat wisata, kuliner, standart penanganan covid-19 akan di disiplinkan. Sebagai persiapan, destinasi wisata yang ada akan ditata sesuai dengan standar kebutuhan, keamanan dan kenyamanan wisatawan. Seperti kita ketahui bersama dalam wawancara KR Jogja (Kedaulatan Rakyat Jogja) bahwa wisata Umbul Ponggok ini mengalami kerugian hampir 4 milyar saat pandemi covid-19.<sup>5</sup>

Memang Umbul Ponggok sebagai salah satu penggerak ekonomi bagi masyarakat setempat. Mayoritas warga mengandalkan Umbul Ponggok sebagai sumber mata

---

<sup>5</sup> <https://www.krjogja.com>. Diakses pada 23 Juli 2020, jam 22.30 WIB

pencapaian<sup>6</sup>, sehingga ketika tetap diberlakukan *lockdown* tentu akan sangat terasa dampaknya. Meskipun pemerintah desa Ponggok juga telah menyediakan bantuan sembako kepada setiap KK (Kepala keluarga) di masa pandemi ini, berupa beras 10 kg, mie instan 10 biji, telur 1 kg, minyak goreng 2 liter, kecap dan gula pasir 2 kg setiap bulannya. Akan tetapi hal itu belum mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga pada masyarakat setempat.

Salah satu pedagang di tempat wisata Umbul Ponggok mengaku sudah empat bulan tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Padahal sebelum pandemi, tiap akhir pekan bisa meraup omset 1-2 juta. Untung saja masih mendapat bantuan dari pemerintah desa dan bantuan sosial dari pemerintah pusat, “Kata Imroah, salah satu pedagang di tempat wisata Umbul Ponggok”. Namun demikian sekali lagi mereka tidak bisa memilih antara ekonomi dan kesehatan. Tentunya keduanya sangat penting dan harus berjalan selaras. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran baik bagi para penyedia wisata dan pelaku wisata itu tersendiri. harus bisa menyesuaikan, terlebih pasca pemulihan covid-19.

Semua tentu berharap saat sudah ada surat edaran dari pusat yang memperbolehkan pembukaan tempat wisata, bisa di terapkan dan di disiplinkan protokol kesehatan covid-19. Saat ini kita memang berada dalam keadaan yang penuh dengan keterpaksaan. Keterpaksaan untuk disiplin selalu menggunakan masker saat keluar rumah, keterpaksaan untuk sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun, memakai *hand sanitizer*, keterpaksaan untuk jaga jarak, bahkan keterpaksaan untuk mengalami perekonomian yang sedang kurang baik. Namun dengan keterpaksaan ini diharapkan bisa di ambil hikmah ketika sudah memasuki *pasca new normal* nanti bahkan saat perekonomian sudah membaik untuk tetap bisa menjaga dan peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga secara disiplin dan baik, pun demikian juga bagi sektor pariwisata.

---

<sup>6</sup> Erwin Kusumastuti, *Strategi dan Praktek Kerukunan Beragama dalam Perspektif Pendidikan Multikultural (Studi di Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten).*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016.

# **“MENGHADAPI TANTANGAN NEW NORMAL DI INDONESIA” DITINJAU DARI SEGI SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA**

**Ratna Puspitasari**

---

**Pengutipan:** Puspitasari, R. (2020). “Menghadapi Tantangan New Normal Di Indonesia” Ditinjau Dari Segi Sosial Masyarakat Indonesia. In Kriswibowo, A. & Nawangsari E. R. (Eds.), *Potret Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi tantangan Pandemi Covid-19*. Surabaya: Penerbit Prodi Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur.

---

## **Covid 19 dan penyebarannya di dunia, ASEAN dan Indonesia.**

Akhir Desember 2019 dunia dikejutkan oleh wabah penyakit yang mematikan yang kemudian dikenal dengan covid-19. Awal kemunculan covid-19 ini diduga berasal dari Provinsi Hubei, China pada tanggal 17 November 2019. Dokter di China baru menyadari bahwa mereka tengah menghadapi penyakit baru pada akhir Desember 2019. Sementara itu para ilmuwan telah mencoba memetakan pola penularan awal Covid-19 sejak epidemik dilaporkan di kota Wuhan pada pertengahan Januari 2020. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.

Coronavirus adalah keluarga besar virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, mulai dari gejala ringan sampai berat. Sampai saat ini (*Juni 2020-red*) belum ditemukan obat dan vaksin untuk virus ini, hal ini yang menjadikan virus Corona sebagai penyakit yang ditakuti dan mematikan, walaupun angka kesembuhan dari penyakit ini semakin tinggi (banyak yang dapat disembuhkan).

Gejala yang paling umum dari penyakit ini diantaranya adalah; demam, batuk kering dan kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum diantaranya: rasa tidak nyaman dan nyeri otot, nyeri tenggorokan, menggigil, sakit tenggorokan, mual, diare, konjungtivitis (mata merah), sakit kepala, hidung tersumbat atau pilek, hilangnya indra perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki.

Sedangkan gejala serius dari paparan virus ini adalah: kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi, tapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Karena itu, ada kebijakan karantina 14 hari pada seseorang yang diduga terpapar virus ini. Covid 19 dapat ditularkan atau menyebar melalui: percikan air liur pengidap (batuk, bersin), bersentuhan dengan orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang barang yang terpapar virus corona.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terpapar virus corona diantaranya adalah: sering mencuci tangan, apalagi bila menyentuh benda-benda yang diduga sering bersentuhan dengan orang lain, menghindari menyentuh bagian muka, mulut dan hidung dalam keadaan tangan kotor (belum dicuci), hindari menyentuh hewan atau unggas liar, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda-benda yang sering digunakan, tutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit, hindari keluar rumah bila tidak ada kepentingan yang mendesak, menggunakan masker saat terpaksa harus keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.

Hampir semua orang dapat tertular virus ini. Tetapi bayi dan anak kecil, orang dengan kekebalan tubuh yang lemah, orang yang sudah lanjut usia, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti asma, diabetes, penyakit jantung) lebih rentan terhadap serangan virus ini. Disamping itu orang yang tinggal atau berkunjung di daerah atau Negara yang rawan virus corona juga beresiko tertular penyakit ini.

Selain mematikan dan belum ditemukan obat dan vaksin untuk virus corona, penyebaran dan penularan virus ini sangat cepat, hampir semua negara didunia sudah terpapar virus ini, termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk mencegah penularan Covid-19, salah satunya dengan memberlakukan *lockdown*. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Daftar 5 negara dengan jumlah kasus Corona terbanyak di dunia  
29 Juni 2020

No	Negara	Kasus	Meninggal	Sembuh
1	Amerika serikat	2.637.077	128.437	1.093.456
2	Brasil	1.345.254	57.658	733.848
3	Rusia	634.437	9.073	399.087
4	India	549.197	16.487	321.774
5	Inggris	311.151	43.550	Data tidak tersedia

Sumber: worldometers, Tribun Mataram, 29 juni 2020

Total jumlah kasus Corona dunia yang terdiri dari 216 negara, jumlah total kasus virus Corona sebanyak 10.235.353 kasus. Meninggal 504.060 kasus. Sembuh 5.546.934 orang. Hingga kini jumlah kasus aktif sebanyak 4.184.359 kasus dengan 4.126.408 dengan kondisi ringan dan 57.951 kasus dengan kondisi serius. (sumber: worldometers, Kompas). Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, walaupun banyak kasus pasien dapat disembuhkan, tetapi jumlah penderita covid dunia masih tinggi.

Sejak Covid 19 ditemukan, hingga saat ini, penularan virus ini terus bertambah, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kasus Covid 19 dunia, meskipun sebagian Negara telah melakukan *lockdown*, hal ini dimungkinkan karena banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Banyak masyarakat yang masih memandang sebelah mata virus ini. Meskipun ada juga Negara yang dapat menekan penyebaran Covid 19, kesuksesan Negara- Negara untuk menekan bahkan menghentikan penularan Covid karena mereka menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah melakukan pengujian virus secara massif
2. Cakupan pengujian secara luas.
3. Melakukan transparansi penyebaran serta penambahan kasus secara berkala
4. Menerapkan aturan wajib karantina di rumah terhadap warganya. Pemerintah tak segan menindak pelanggar yang nekat keluar rumah dengan memberikan dakwaan pidana.
5. Layanan kesehatan nasional yang kuat dengan tingkat pengujian yang luas dan murah

6. Beragam inovasi layanan kesehatan juga dilakukan selain di rumah sakit. Konsultasi melalui telepon hingga layanan pengujian drive-through meminimalisir kontak antara pasien dengan petugas medis.
7. Aturan untuk menjaga jarak dan membatasi aktivitas di luar ruangan dilakukan dengan tegas dan sanksi.

Dari kesuksesan Negara-negara yang dapat menekan penularan Covid-19 kunci utama adalah: memperlakukan pandemi ini sebagai keadaan darurat, yang butuh penanganan secara darurat pula, selain itu ketegasan pemerintah, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang tinggi ikut andil mensukseskan penurunan angka penyebaran virus ini.

Daftar 5 negara dengan jumlah kasus Corona terbanyak di ASEAN  
28 Juni 2020

N0	Negara	Kasus	Meninggal	sembuh
1	Indonesia	54.010	2.754	22.936
2	Singapura	43.459	26	37.163
3	Filipina	35.455	1.244	9.686
4	Malaysia	8.634	121	8.318
5	Thailand	3.162	58	3.053

Sumber: Kompas 29 Juni 2020

Dari data diatas diketahui Indonesia merupakan Negara di Asia Tenggara (ASEAN) dengan kasus tertinggi sebanyak 54.010 kasus dan jumlah pasien meninggal tertinggi 2.754 orang. Sedang negara dengan kasus terendah adalah Laos dengan 19 kasus, 19 sembuh.

Daftar 5 kota di Indonesia dengan jumlah penambahan kasus baru Corona  
Tertinggi 29 Juni 2020

N0	Negara	Kasus baru	Kasus positif	Meninggal	sembuh
1	Jawa Timur	297	11.795	896	4.012
2	Jawa Tengah	198	3.851	304	1.686
3	Sulawesi selatan	188	4.995	164	1.770
4	DKI Jakarta	125	11.080	636	6.118
5	Kalimantan tengah	47	881	53	384

Sumber: @jatimpemprov, Diskes: jateng, Sulsel, DKI Jakarta, Kalteng

Data per 29 Juni 2020 jumlah kasus Covid 19 di Indonesia bertambah 1.082 menjadi 55.092 kasus. Pasien sembuh 23.800, pasien meninggal 2.805 orang. (Metro TV). Dari data diatas, meskipun Indonesia menetapkan kebijakan PSBB, tetapi jumlah kasus covid 19 semakin bertambah di beberapa kota. Meskipun angka kesembuhan terus meningkat dan jauh lebih banyak dari yang meninggal, tetapi hal ini tidak bisa menjadi acuan pemerintah untuk mengendorkan kebijakan yang dapat mencegah meyebarinya virus ini.

Beberapa hal yang menyebabkan lambatnya pencegahan covid di Indonesia diantaranya adalah:

1. Pemerintah tidak siap data yang cepat dan tepat.
2. Kebijakan yang tidak konsisten, yang seringkali bertentangan antara satu kementerian dengan kementerian yang lain.
3. Tidak transparan.

4. kurang melibatkan ilmuwan dalam proses pembuatan kebijakan terkait covid-19.
5. partisipasi masyarakat atau kepedulian masyarakat sangat kurang.

### **Kebijakan menekan penyebaran Covid 19 di Indonesia.**

Untuk menekan penyebaran Covid 19, Negara-negara di dunia melakukan berbagai langkah dan kebijakan, beberapa Negara melakukan kebijakan *lockdown*, yaitu, penghentian aktivitas masyarakat dengan menjamin segala biaya hidup rakyat oleh negara. Sementara di Indonesia, karena pertimbangan keuangan negara dan faktor-faktor lainnya maka pemerintah mula-mula menganjurkan untuk karantina, atau dirumah saja, kebijakan *social distancing* atau bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah selama 14 hari untuk memutus penyebaran Covid 19, dan diperpanjang bila dirasa perlu.

Kebijakan dirumah saja yang telah ditetapkan pemerintah kurang berhasil, karena hanya sebatas himbauan, sehingga tidak ada sanksi bagi yang melanggar. Masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas diluar rumah tanpa menggunakan alat pelindung diri. Selain itu banyak masyarakat yang masih menganggap Covid bukanlah penyakit yang serius dan mematikan. Mereka enggan menggunakan masker dengan alasan tidak nyaman, masih sering kumpul-kumpul di café atau warung-warung kopi, tanpa mengindahkan himbauan pemerintah, budaya mudik lebaranpun masih dilakukan walau pemerintah sudah melarang, dipasar-pasar tradisional, orang masih berjejalan, disadari atau tidak, perpindahan uang sebagai satu-satunya pembayaran yang sah dari orang ke orang sangat rentan menularkan virus ini.

Semakin banyaknya masyarakat yang tertular Covid 19 dan kurangnya tenaga medis serta kurangnya daya tampung rumah sakit untuk pasien Covid 19, membuat pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk mencegah dan menghentikan penyebaran Covid-19. PSBB merupakan pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi virus corona. Pelaksanaan PSBB tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dua kriteria yang harus dipenuhi agar suatu wilayah atau daerah dapat menetapkan PSBB adalah: Pertama, jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Sementara kriteria kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain.

PSBB ini akan diterapkan selama masa inkubasi terpanjang, 14 hari. Namun, tidak menutup kemungkinan diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Untuk dapat menetapkan PSBB, pimpinan suatu daerah mengajukan pada Menti kesehatan. Hal inilah yang dirasa kurang cepat penanganan covid di Indonesia. Berbeda dengan anjuran dirumah saja yang tidak ada sanksinya, pada PSBB Sanksi untuk Pelanggar ditetapkan berupa tindakan hukum dan sanksi sosial, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Kebijakan PSBB di Indonesia, walaupun sudah ada sanksi ternyata belum juga efektif, terbukti dengan terus meningkatnya jumlah penderita covid 19. Kurang berhasilnya PSBB disebabkan antara lain:

1. Penerapan PSBB tidak dilakukan secara serentak. Baik di Ibu Kota DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan wilayah lainnya.
2. Kebijakan kepala daerah dalam menjalankan PSBB berbeda-beda. Akibatnya, koordinasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya belum optimal.
3. Hubungan dengan pemerintah pusat terutama dengan Menhub yang tak kunjung menyეთop alat transportasi dan lain-lain.
4. Pemerintah tidak tegas memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mengikuti aturan PSBB. Sehingga masih banyak perusahaan di sektor industri yang beraktivitas normal. Sanksi yang diberikan pada masyarakat juga kurang adil, hal ini berkenaan dengan sanksi yang melanggar protokol kesehatan bila memiliki uang dapat membayar denda, sedangkan yang tidak mendapat sanksi sosial, menyapu jalan dan lain-lain.
5. Ego sektoral kementerian dan lembaga pemerintah menjadi penyebab PSBB tak berjalan semestinya. Misalnya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian. Ketiga lembaga tersebut masing-masing mengeluarkan aturan yang saling bertentangan.
6. Kurangnya kontribusi dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan penularan Covid 19. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang kurang peduli dengan kesehatannya dan orang disekitarnya dengan tetap melanggar pola hidup sehat, seperti tidak menggunakan masker di tempat umum.

Covid 19 benar-benar memukul telak segala sendi kehidupan masyarakat, hampir semua orang terkena dampak dari virus mematikan ini, baik secara sosial, budaya dan ekonomi. Dengan adanya Covid-19 ini banyak kehidupan sosial masyarakat yang berubah drastis, banyaknya orang miskin baru, banyaknya kejahatan akibat tekanan ekonomi, banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, banyaknya perusahaan yang tidak mampu menahan serangan Covid berdampak banyaknya PHK dan menciptakan ribuan pengangguran, kebijakan PSBB, membuat sebagian perusahaan kolaps, mati suri bahkan banyak yang gulung tikar. Sementara Negara tidak mampu membiayai atau menutup kebutuhan hidup masyarakat. Memang ada bantuan bagi yang terdampak, tetapi, sifat dari bantuan adalah hanya sekedar membantu, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Hal inilah yang membuat sebahagian masyarakat tetap beraktivitas diluar rumah, demi menutup kebutuhan sehari-hari.

Secara sosial budaya, dampak dari Covid adalah orang cenderung menutup diri, beribadah dirumah, beraktivitas sebagian besar dari rumah, dengan adanya Covid melahirkan budaya baru di Indonesia, yaitu budaya bersih, bersih diri, bersih lingkungan, munculnya kembali budaya gotong royong, budaya bersalaman mulai ditinggalkan, mungkin hal ini bisa dipertahankan bukankah korea dan Jepang cukup membungkukkan badan untuk menghormati, tanpa bersentuhan, dengan adanya Covid, orang cenderung enggan bertatap muka, hal ini melahirkan inovasi dan masyarakat jadi melek teknologi dengan komunikasi yang dapat dilakukan dari rumah saja (*vidcall*).

### *New Normal*

Dengan adanya PSBB, diakui atau tidak merubah tatanan hampir disegala sektor kehidupan, baik negara maupun masyarakat, banyaknya PHK, serta hilangnya lahan mata pencaharian masyarakat, anggaran keuangan negara yang terbatas, menimbulkan guncangan ekonomi yang cukup parah yang memaksa negara mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan perekonomian dan meringankan beban masyarakat. Hal inilah yang membawa pemerintah Indonesia pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan *new normal* sebagai respon realistis terhadap dampak dari Covid-19 dan untuk menata kembali perekonomian nasional dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Definisi *new normal* adalah skenario untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Tatanan baru perlu ada sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona. Tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang kemudian disebut sebagai *new normal*.

Prinsip utama dari rencana *new normal* adalah adaptasi dengan pola hidup yang akan menuntun pada terciptanya kehidupan dan perilaku baru masyarakat hingga vaksin Covid-19 ditemukan. Lebih lanjut, implementasi kebijakan *new normal* akan dikawal oleh penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Beberapa indikator dari WHO dalam rangka skenario *new normal* sebagai berikut:

1. Tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan.
2. Menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespons untuk pelayanan Covid-19.
3. *Surveilans* yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki Covid-19 atau tidak sehingga dilakukan tes masif.

Sementara di Indonesia tes masif termasuk yang rendah di dunia, baru mencapai 743 per 1 juta. Dibeberapa kota juga terjadi peningkatan penularan covid-19, tetapi tetap memaksakan diri untuk melakukan *new normal* karena alasan ekonomi dan keterbatasan anggaran Negara atau pemerintah daerah.

Hal-hal krusial yang harus diperhatikan sebelum kebijakan *new normal* diterapkan, diantaranya adalah:

1. Penetapan objektif yang hendak dicapai. Objektif merupakan alasan dasar mengapa sebuah kebijakan dikeluarkan. Secara eksplisit, penerapan kebijakan *new normal* ini memiliki relevansi kuat dengan upaya pemerintah untuk menggerakkan sektor perekonomian nasional yang laju pertumbuhannya di kuartal pertama 2020 hanya berada pada level 2,97%.
2. *Social acceptance* atau tingkat penerimaan masyarakat. Masyarakat sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) harus benar-benar memahami objektif dari kebijakan ini untuk mendorong kepatuhan dan mereduksi resistensi dalam implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, transparansi data dan informasi melalui skema sosialisasi terbuka adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah. Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa model kebijakan inilah yang paling tepat untuk situasi dan kondisi yang ada.
3. Ketiga, dibutuhkannya instrumen regulatif untuk mengawal kebijakan. Saat ini, salah satu instrumen regulatif yang sudah disusun adalah protokol kesehatan

Kemenkes RI yang tertuang dalam Keputusan Menkes mengenai panduan bekerja dalam situasi *new normal*.

4. Implementasi kebijakan membutuhkan mekanisme identifikasi masalah dan aksi korektif jikalau ada risiko-risiko yang muncul. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan analisis risiko sedini mungkin. Salah satu risiko yang paling dihindari dalam pengambilan inisiatif kebijakan *new normal* oleh negara-negara di dunia adalah terjadinya pelonjakan kasus positif COVID-19. (Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A, *Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024*)

Ditinjau dari segi sosial, baik sosial ekonomi dan budaya, *new normal* adalah langkah yang masuk akal, dan akan melahirkan tatanan baru bagi masyarakat, karena tidak mungkin masyarakat hanya berdiam diri sedang kebutuhan hidup harus dipenuhi.

Tantangan *new normal* di Indonesia adalah: bagaimana pemerintah dapat menaikkan laju pertumbuhan ekonomi, yang berimbas pada terciptanya lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya mengembalikan perekonomian Negara, tetapi dengan mengurangi atau menghentikan penularan Covid-19, sehingga masyarakat dapat *survive* dan dapat hidup berdampingan dengan Covid-19 sementara perekonomian berjalan normal. Hal ini tidaklah mudah, merubah kebiasaan atau budaya masyarakat tidaklah semudah membalik telapak tangan, belum adanya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat sangat mempengaruhi kebijakan ini. Budaya antre yang kadang sulit untuk diterapkan, membuat orang berdesak-desakan ditengah kebijakan *social distancing*.

Agar berjalan sesuai yang diharapkan maka, penerapan *new normal* harus benar-benar dijalankan secara ketat dan tegas, jangan sampai budaya hukum yang tidak adil diterapkan, sebagai contoh, bagi yang melanggar tidak ada kompromi, semua mendapat sanksi yang sama, selama ini terkesan hukum tidak adil, bagi yang memiliki uang bisa membayar denda, sedang yang tidak, mendapat hukuman. Masyarakat juga dibudayakan untuk mematuhi aturan, menumbuhkan budaya malu bila melanggar, membiasakan diri untuk hidup sehat dan bersih, masyarakat juga diharapkan turut andil dan *care* sehingga berani menegur bagi yang melanggar, selama ini terkesan masyarakat malas dan membiarkan bila ada orang yang melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Untuk pasar tradisional perlu ditata ulang pengaturannya, mengapa pasar tradisional? Karena segala kebutuhan pokok masyarakat dapat dijumpai disini dengan harga yang relative lebih murah, sehingga masyarakat masih tertarik untuk belanja di pasar tradisional, selain itu lebih sulit menata pasar tradisional dari pada mall dan supermarket. Bukankah dari dulu sudah ada wacana untuk merapikan pasar tradisional sehingga tidak kalah dengan super market? Hal ini tidak mustahil dilakukan, karena kita tidak pernah tau sampai kapan virus ini akan hidup berdampingan dengan kita, gunakan *E money* atau pembayaran non tunai yang lain, untuk bertransaksi baik di pasar tradisional maupun mall dan supermarket, bukankah dulu begitu gencarnya BI mendorong masyarakat untuk meninggalkan uang tunai dan beralih pada pembayaran non tunai. Selain menghemat anggaran negara untuk mencetak uang baru, dengan *E money* atau pembayaran non tunai lainnya kita meminimalkan penularan virus dari uang tunai yang banyak dipegang dan berpindah tangan dari orang ke orang.

Bagi pemerintah, budayakan untuk kerjasama yang baik, berkoordinasi yang baik, sehingga satu kata dalam menerapkan *new normal*, hal ini memudahkan masyarakat untuk menjalankan kebijakan tanpa ada kebingungan, dan yang tak kalah pentingnya, budayakan

menjadi teladan yang baik, sehingga masyarakat dapat mencontoh dan ikut berperan dalam pencegahan virus ini dengan suka rela.

Pada akhirnya, mau tidak mau kita akan hidup berdampingan dengan Covid-19, kita sudah tau penyebabnya, cara penularannya, cara mencegahnya, tau apakah kita termasuk yang rentan terpapar virus ini atau tidak, sehingga kita dengan kesadaran diri dan suka rela menjaga diri kita dan keluarga dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Berkaca dari kegagalan PSBB, sudah selayaknyalah pemerintah tidak mengulang kesalahan yang sama, sehingga *new normal* benar-benar bisa dijalankan dan berhasil di Indonesia.

**Referensi;**

1. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/29/082449765/update-virus-corona-dunia-29-juni-102-juta-orang-terinveksi-gelombang-ke2?page=all>.
2. Metro TV 29 Juni 2020
3. Tribun Mataram, 29 juni 2020
4. @jatimpemprov
5. Dinas kesehatan jateng, Sulsel, DKI Jakarta, Kalteng

# MENGHADAPI TANTANGAN *NEW NORMAL* DI TINJAU DARI PERSPEKTIF AGAMA ISLAM

Imam Ghozali dan Saifuddin Zuhri

---

**Pengutipan:** Ghozali, I. Zuhri, S. (2020). Menghadapi Tantangan *New normal* Di Tinjau Dari Perspektif Agama Islam. In Kriswibowo, A. & Nawangsari E. R. (Eds.), Potret Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi tantangan Pandemi Covid-19. Surabaya: Penerbit Prodi Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur.

---

Saat ini kita semua dihadapkan terjadinya wabah virus covid 19 atau di kenal juga dengan virus corona, badan kesehatan dunia atau WHO, menyatakan bahwa wabah virus ini sebagai pandemic yang menjadi masalah global. Pemerintah Indonesia pun telah menjadi virus corona ini menjadi bencana nasional. Virus corona jenis baru yang mewabah mulai akhir tahun 2019 di wuhan China ini, kini telah menyebar ke 140 lebih Negara/Wilayah di dunia. Di seluruh dunia terdata lebih dari 150 ribu kasus yang terkonfirmasi dan telah menyebabkan 5.500 orang lebih meninggal dunia. Massifnya penyebaran virus ini menyebabkan beberapa negara atau wilayah telah melakukan kegiatan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini.

Menteri Agama telah menerbitkan panduan tentang kegiatan keagamaan di rumah ibadah (masjid) pada masa *new normal* selama pandemi covid 19, sebagaimana pada surat edaran nomor: 15 tahun 2020 itu mewajibkan rumah ibadah memiliki surat keterangan aman dari covid 19, yang di benarkan untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah sehingga masa *new normal* ini harus jaga protokol kesehatan.

Kasus wabah virus corona ini adalah bagian dari bencana non alam, dalam perspektif ajaran islam, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang biasa menimpa kepada siapa saja, kapan dan di mana saja, Musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-baqarah ayat 155, yang artinya: “Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah atau bencana adalah hal niscaya yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana apapun bentuknya, sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah di lakukan oleh manusia itu sendiri, ketauhidan seorang mukmin akan menuntunkan bahwa berbagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah persoalan, karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan.

Peristiwa yang merupakan musibah merupakan takdir Allah takdir disini dimaknai dengan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi di hadapan kita. Hanya Allah saja yang mengetahui ketetapan dan ketentuan-Nya. Manusia hanya dapat mengetahuinya ketika ketetapan dan ketentuan tersebut terjadi. Adapun ketika ketetapan dan ketentuan yang akan terjadi pada manusia juga tidak mengetahuinya, hanya Allah saja yang maha Tahu. Dengan demikian manusia wajib memohon kepada Allah dan berusaha untuk menyikapinya dengan penuh kesadaran dalam rangka merubah keadaan yang dihadapinya menjadi lebih baik. Allah SWT. menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 53, yang artinya : “Yang demikian (siksaan) itu adalah karena sesungguhnya

Allah sekali-kali tidak akan merubah nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Di dalam *new normal* ini banyak sekali peraturan - peraturan yang di sampaikan oleh pemerintah terutama tentang protokol kesehatan di masa pandemik covid 19. Beberapa contoh yang ada di masjid:

1. Menyediakan tempat cuci tangan dan handsanitizer
2. Menjaga kebersihan masjid (tempat wudhu dan toilet lantai dan melakukan penyemprotan disinfektan secara teratur dan berskala setelah pelaksanaan sholat)
3. Senantiasa memberikan himbauan kepada jamaah yang bersifat edukasi seperti tidak bergrombol dan menjaga jarak.
4. Menyediakan suhu tekanan atau termometer.
5. Mengatur jarak shaf dan memberi tanda tempat jamaah melakukan shalat (minimal 1-2 meter).

Selain beberapa aturan yang diterapkan di masjid, terdapat pula hal-hal yang diharuskan diperhatikan bagi setiap jamaah sebelum berangkat ke masjid :

1. Cuci tangan dengan sabun,
2. Jamaah berwudhu dari rumah,
3. Memakai masker standard
4. Membawa sajadah atau sajadah sendiri
5. Orang tua dan orang sakit shalat dirumah.

Karena kasus virus corona yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari bencana non alam yang berupa epidemi atau wabah. Epidemi adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka sebagai bagian dari bencana. Maka kasus virus corona ini harus disikapi secara cepat dan tepat, seluruh pihak harus memiliki kepedulian untuk terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran virus ini, tentunya di antara pihak yang paling bertanggung jawab adalah pihak pemerintah, karena pemerintah lah yang mengemban amanat rakyat dalam pengaturan urusan hidup yang berkaitan dengan publik dan arena pemerintah yang memiliki wewenang untuk menggunakan dan menyalurkan segenap potensi dan sumberdaya yang diperlukan terkait dengan penanganan bencana. Apabila pemerintah mengabaikan tugas ini, maka Rasulullah SAW. mengingatkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muawiyah, Artinya : “Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban amanat kaum muslimin lain dia menghindar dari kebutuhan kekurangan dan kefakiran rakyatnya maka Allah akan menutup diri darinya ketika ke kurangan, membutuhkan dan dalam kefakiran” (H.R Abu Dawud).

Walaupun penanganan bencana itu menjadi otoritas pemerintah, kita sebagai anggota masyarakat tidak boleh bersikap masa bodoh dan berdiam diri memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang manusia harus saling tolong menolong satu sama lain tanpa mengenal latar belakang suku, ras maupun agama. Sesama manusia kita harus memiliki sikap empati kepada para korban, sehingga kita senantiasa menjauhkan diri dari sikap menghakimi dan menyalahkan korban dalam penyebaran virus corona, kita harus mampu menjadi pribadi yang bisa memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Secara bersama

kita perlu membangun kesadaran pemahaman dan sikap yang sama untuk secara aktif terlibat dalam mencegah penyebaran virus corona semakin meluas, sehingga semakin mempercepat wabah ini berakhir.

Di antara hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dan sekaligus bagian dari anggota masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat dan mempertebal keimanan kepada Allah SWT.,

Iman yang kuat akan menuntunkan kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan Allah. Seorang muslim yang istiqomah dalam iman kepada Allah maka akan ditiadakan rasa takut dalam dirinya sebagaimana firman Allah dalam surat Fushilat ayat 30, yang artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata: Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.”

Iman yang kuat akan menuntun pula pada sikap sabar. Bersabar bagi seorang muslim hakikatnya adalah kesadaran bahwa keburukan yang terjadi pada dirinya adalah rahmat dan selanjutnya dia akan berusaha untuk merubah kondisi buruk yang di hadapi sekarang untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Kebaikan yang di lakukan tidak hanya setelah musibah terjadi tetapi lebih dari seorang muslim akan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kebaikan-kebaikan jauh sebelum musibah itu terjadi.

2. Mengisolasi diri dan menahan diri untuk tidak beraktifitas dengan banyak orang.

Dalam hadits nya, Nabi Muhammad SAW. telah bersabda, yang artinya : “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah maka janganlah kalian memasukinya tapi jika ternjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu” (HR.Bukhari).

Hadist ini mengajarkan bahwa kita harus berusaha menghindari keburukan yang mungkin terjadi dari suatu wabah yang sedang berkembang di suatu wilayah mengisolasi dan menahan diri untuk tidak bertemu dengan orang banyak dan paham untuk tidak bepergian, terlebih ke daerah yang dinggap sebagai zona merah merupakan suatu pilihan yang harus diambil oleh setiap muslim. Dengan kata lain, sebagai seorang muslim dituntut untuk mampu melakukan kesiap siagaan dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi resiko bencana terutama terkait korban manusia.

3. Saling menguatkan dan tolong menolong.

Tidak ada seorang pun yang ingin tertimpa musibah terjangkau virus corona, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus corona. Untuk itulah setiap orang, terlebih seorang muslim, harus mau untuk saling menguatkan dan saling tolong menolong satu sama lain, bahu membahu bagaimana menciptakan kebaikan berupa melakukan pencegahan agar virus corona tidak mewabah ke banyak daerah atau tempat yang lain. Dan harapannya tidak memakan semakin banyak korban yang meninggal dunia. Maka diperlukan saling bertukar informasi yang valid dan benar. Bahkan bila suatu saat akan dilakukan lockdown maka setiap anggota masyarakat bisa saling memberi dan menjaga ketersediaan bahan pokok, bukan sebaliknya malah memanfaatkan

kondisi bencana untuk meraup keuntungan pribadi. Karena dalam Al-Quran tegas mengajarkan kepada kita: "...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"(Q.S Al-Maidah ayat.2).

Tiga hal yang bisa kita jadikan pendoman dalam menghadapi situasi - situasi sulit karena virus corona di masa transisi *new normal* tetaplah kita dalam iman kepada AllahSWT. Jangan panik dan terus berdoa mendekatkan diri kepada-Nya.

Dengan adanya menghadapi aturan *new normal* ini majelis ulama Indonesia (MUI) sampai saat ini masih membahas terkait *new normal* untuk menjalani pola hidup baru di tengah pandemic covid 19 dari segi kesehatan dalam perspektif islam. Wakil sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, Umat islam harus hati-hati dalam memahami istilah *new normal* baik teks maupun konteks. Menurut dia ke hati-hatian itu berdasarkan tradisi literasi umat islam mempelajari al-quran yang memiliki beda titik, baris apalagi beda huruf, sehingga mempunyai makna yang berbeda.

Tradisi ini merupakan keniscayaan bagi umat islam untuk lebih hati-hati dalam membaca kosa kata atau diksi seperti *new normal*, bisa sebaliknya jadi tidak normal, karena fakta empirik masih belum normal harus dimulai dari pemahaman yang normal. Ketika melihat situasi obyektif seperti saat ini belum normal masih memerlukan tahapan yang harus terukur, sehingga kita tidak terjebak dengan diksi yang justru membuat masyarakat bingung.

Mengutip penjelasan Diruktur Regional WHO untuk Eropa Hans Henri P.Kluge, Amirsyah menjelaskan bahwa ada lima syarat negara menerapkan *new normal*. Pertama, harus berdasarkan penurunan transmisi angka pasien covid 19. Jika transmisi belum terkendali maka *new normal* belum dapat di lakukan. Kedua, kapasitas sistem kesehatan sudah mampu mengidentifikasi dan melakukan tes *trace* dan *treat*. Ketiga, *new normal* harus tetap melakukan pengaturan yang ketat pada tempat maupun momunitas rentan, seperti lansia dan pemukiman padat. Keempat, pencegahan di tempat kerja dengan menerapkan prokol medis yang ketat. Kelima, resiko *imported case* sudah dapat dikendalikan oleh semua pemangku kepentingan dan terakhir masyarakat mempunyai kesadaran kolektif untuk ikut berperan dan terlibat terutama melaksanakan protokol kesehatan.

*New normal* dalam perspektif islam yang ramai menjadi perbincangan dalam pandangan islam yakni di mulai dari kehidupan normal. Tidak bisa jika dari kehidupan yang belum normal seperti saat ini, kehidupan normal dalam islam terhindar dari situasi darurat. Dalam aqidah fiqih menghindarkan kerusakan atau kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan atau kebaikan (*dar ul mafasid muqoddam'ala jalbil masholih*). Untuk itu dalam aspek ajaran islam menekankan kepada pencegahan melalui konsep bercuci (*thaharah*). Islam telah mengajarkan konsep bersuci lahir dan batin. Dalam kaitanya tradisi bersuci lahir dan batin merupakan awal seseorang menuju kehidupan yang normal (*new normal*) karena telah baligh dan berakal.

Maka dari itu *new normal* dalam islam yakni memelihara agama, jiwa keturunan, harta dan akal. Semua itu sebagai kewajiban menuju kehidupan *new normal* dalam pandangan islam. Islam mengatur tata kehidupan manusia normal untuk mendapatkan kebahagiaan baik hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Sehingga umat muslim akan terdorong untuk selalu melaksanakan tindakan yang normal dan bermanfaat bagi orang lain. Perbuatan yang normal menjadi awal bangkitnya sebuah masyarakat dan bangsa.

Akhir-akhir ini hampir setiap orang membicarakan *new normal* sebagai fase kelanjutan dari karantina mandiri dan beberapa protokol kesehatan lainnya. *New normal* secara faktual di lapangan sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona. Badan Bahasa sudah memberikan istilah indonesianya, yaitu kenormalan baru. Namun tampaknya masyarakat lebih senang menggunakan istilah *new normal*. Mungkin yang lebih tepat dipakai dalam era *new normal* itu al-ta'ayusy atau hidup berdampingan (bukan berdamai) dengan covid 19. Sebab menurut para ahli epidemic, corona akan tetap eksis dalam kehidupan kita, padahal roda perekonomian harus terus berjalan. Umat beragama harus bisa lagi melakukan ibadah di tempat peribadatnya. Para pegawai harus segera masuk kantor lagi. Siswa, santri dan mahasiswa harus segera kembali kelingkungan belajarnya. Semua juga orang harus kembali kepada pekerjaan rutinitasnya. Karena itulah tidak ada jalan lain, kita harus hidup berdampingan dengan covid 19 sekalipun tetap bermusuhan.

Inilah yang mendorong kita berkometmen untuk mempunyai sikap berhati-hatian di semua sektor kehidupan dengan meletakkan protokol kesehatan di atas segalanya. Beberapa waktu terakhir ini tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan telah meningkat secara signifikan sehingga ada sebagian daerah yang mulai pelanggaran PSBB (pembatasan sosial berskala besar) namun hal ini tidak boleh mengendorkan kita dalam memberlakukan protokol kesehatan.

#### **Daftar Pustaka**

- Buku panduan menteri Agama, Surat Edaran nomor. 15 tahun 2020, Tentang aturan *New normal*.  
<https://m.merdeka.com>, Pandangan MUI soal *New normal* dalam perspektif islam,  
Buku Saku Bimbingan dan Konseling, Panduan Hidup sehat di dunia Corona, oleh Konselor sekolah (Guru BK).  
Buku panduan, Tentang protokol kesehatan masjid/musallah muhammadiyah shalat berjamaah dalam masa pandemic covid 19.dari pimpinan daerah muhammadiyah kota Surabaya, 2020  
Muhammadiyah covid 19 Command Center,tentang aturan *new normal*, di terbitkan oleh MCCC Muhammadiyah PDM kota Surabaya.



# EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MENGHADAPI ERA NEW NORMAL DALAM MASA PANDEMI COVID-19 : TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT

Lukman Arif

---

**Pengutipan:** Arif, L. (2020). Efektivitas Kebijakan Menghadapi Era New Normal Dalam Masa Pandemi Covid-19 : Tinjauan Dalam Perspektif Masyarakat. In Kriswibowo, A. & Nawangsari E. R. (Eds.), Potret Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi tantangan Pandemi Covid-19. Surabaya: Penerbit Prodi Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur.

---

## Latar Belakang

Dinamika menyebarnya covid-19 di Indonesia sampai dengan essey ini dibuat (awal Juli 2020) menunjukkan trend yang meningkat tidak hanya jumlah orang yang terindikasi positif covid tetapi juga eskalasi wilayah penyebarannya juga semakin meluas. Berdasarkan data pemerintah sampai dengan hari Rabu pukul 12.00 WIB, tanggal 8 Juli 2020 terdapat penambahan 1.853 kasus baru dalam 24 jam. Penambahan kasus baru ini menyebabkan kasus covid-19 di Indonesia menjadi 68.079, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. (kompas.com)

Berdasarkan data Pemerintah yang disampaikan melalui Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, Achmad Suyanto menyampaikan dalam satu acara konferensi pers di Graha BNPB bahwa update terakhir terkait dengan kasus covid yang positif, sembuh dan meninggal. Dalam laporannya disampaikan bahwa penambahan jumlah kasus yang positif covid selalu dibarengi dengan jumlah yang sembuh dan yang meninggal. Dari tambahan positif covid yang telah dikemukakan di atas, total yang sembuh sebanyak 30.785 orang sedang yang meninggal sebanyak 3.309 data ini disampaikan pada Selasa tanggal 7 Juli 2020.(tribunnews.com)

Menyebarnya virus dan telah membawa dampak kematian membuat Pemerintah semakin gencar upaya untuk menangani wabah ini. Bahkan sejak kasus covid ini menyapa Indonesia Pemerintah sudah antisipatif sebagai upaya untuk mencegah agar Covid ini tidak meluas, segera ditangani dan diselesaikan. Komitmen Pemerintah ini nampak dari kebijakan yang dikeluarkan seperti Keputusan Presiden nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019. Dalam kebijakan ini menetapkan bahwa Corona Virus Disease 2019 ini sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan pada 31 Maret 2020 ini merupakan pernyataan politik Presiden yang belum secara konkrit menunjukkan hasil yang signifikan dalam penanganan Covid-19. Bahkan dalam perkembangan berikutnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kecenderungan yang semakin banyak dan meluas baik wilayah penyebarannya maupun dampak yang ditimbulkan. Kondisi demikian akhirnya Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu Peraturan Pemerintah RI. No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Tidak lama kemudian, selang beberapa waktu dari keluarnya PP tentang PSBB, Pemerintah melalui Presiden mengeluarkan kebijakan lagi yaitu Keputusan Presiden

(Kepres) Nomor 12 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Dengan kebijakan ini dalam perkembangannya menyangkut jumlah orang yang positif covid-19 dan eskalasi penyebaran virus itu sendiri ada kecenderungan peningkatan. Dalam perspektif kebijakan jika suatu kebijakan tidak dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi masalah yang menjadi sasaran atau tujuan dari kebijakan, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut gagal. Kebijakan yang baik (*good policy*) tidak menjamin bahwa kebijakan tersebut berhasil dalam implementasi mencapai sasaran atau tujuannya. Tetapi disadari, bahwa keberhasilan ataupun kegagalan dari sebuah kebijakan dapat diidentifikasi mulai dari kebijakannya itu sendiri, implementasinya maupun faktor lingkungan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji “mengapa kebijakan penanganan pencegahan Covid-19 ini gagal?”. Untuk menjawab masalah ini, ada empat faktor krusial yang digunakan untuk menjelaskan kegagalan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber sumber, kecenderungan-kecenderungan, atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini menurut Edward yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Empat faktor ini tidaklah berdiri sendiri melainkan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain dalam suatu proses implementasi kebijakan. Sehingga pembahasan terhadap masalah yang dikaji akan menggunakan pendekatan yang merefleksikan kompleksitas terhadap semua faktor tersebut sekaligus. Selanjutnya obyek kajian dalam tulisan ini adalah Peraturan Pemerintah RI. No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan kebijakan lainnya yang relevan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*.

### **Deskripsi Kebijakan Penanganan Pencegahan Penyebaran Covid-19.**

Sejak Covid-19 masuk ke Indonesia dengan jumlah angka penderita yang masih sangat kecil, Pemerintah telah menunjukkan rasa tanggung jawabnya untuk menangani kasus tersebut. Tanggung jawab tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan, seperti Peraturan Pemerintah RI. No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19

Kebijakan Pemerintah ini selanjutnya menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah jika mau melakukan PSBB untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu, dengan kriteria yang harus dipenuhi: a) jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan b) terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Dilihat dari faktor komunikasi; dalam implementasinya Peraturan Pemerintah ini terkomunikasikan dengan baik kepada Pemerintah Daerah yang berkepentingan dengan kebijakan ini. Untuk era saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, transmisi surat atau dokumen penting lainnya dari satu pihak ke pihak lain sangat mudah. Alat transmisi informasi atau dokumen dapat menggunakan email ataupun *platform* media yang lebih efektif dan efisien. Sehingga ketika ada kebijakan pusat yang sifatnya mendesak, maka daerah dapat segera merespon. Seperti Peraturan Pemerintah tentang PSBB yang perlu segera ditindaklanjuti oleh daerah, maka dengan kemajuan teknologi informasi saat ini kebijakan baru tersebut dapat segera diterima.

Secara substansi dari kebijakan tentang PSBB ini dapat dipahami oleh daerah sehingga mudah ditindaklanjuti. Sesuai dengan kebijakan yang ada, Pemerintah Kota Surabaya memberlakukan PSBB melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam penanganan Covid-19. Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya ini memberi makna bahwa Peraturan Pemerintah sudah terkomunikasikan dengan baik ke daerah dan secara substantif Perwali tersebut memiliki koherensi dengan kebijakan pusat.

Seperti diatur dalam PP tentang PSBB ini diantaranya mengatur mengenai "Pembatasan kegiatan di tempat umum". Ketentuan ini di dalam Peraturan Walikota Surabaya diatur secara detail, seperti bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku ketika berada di tempat umum. Artinya secara substansif kebijakan pusat tentang PSBB memuat informasi yang sangat jelas dipahami sehingga Pemerintah Daerah mampu menyusun kebijakan yang sama yang lebih rinci dan operasional. Secara garis besar substansi Perwali ini meliputi: 1) Pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan /atau institusi pendidikan lainnya; 2) Pembatasan aktivitas kerja di tempat kerja; 3) Pembatasan kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah; 4) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; 5) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya; 6) Pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang. Peraturan Walikota ini sudah mengatur wilayah pembatasan yang secara komprehensif tidak ada pengecualian baik secara institusional maupun personal dalam upaya percepatan penanganan penyebaran Covid 19 khususnya di wilayah Surabaya.

Dari faktor komunikasi kebijakan PSBB dari Peraturan Pemerintah tersebut tidak ada masalah pada tingkat institusional atau birokrasi. Dengan kata lain kondisi ini sangat positif bagi respon cepat yang diharapkan Pusat. Sedang dari faktor disposisi birokrasi, menunjukkan bahwa kebijakan pusat tidak secara normatif maupun substantif tidak ada resistensi, sehingga kondisi ini merupakan hal yang sangat kondusif bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Bagaimana selanjutnya faktor komunikasi mengenai kebijakan ini sampai kepada masyarakat? Kasus di Kota Surabaya memberi pelajaran yang menarik bagaimana Walikota Surabaya ini dengan gigihnya berupaya agar kasus Covid-19 ini dapat dibendung dan dilokalisir baik dalam jumlah orang yang terdampak maupun wilayah penyebarannya. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 yang dirubah dengan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) merupakan derivasi Peraturan Pemerintah tentang PSBB pada level lokal.

Mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Daerah dalam menjaga warganya agar terhindar dari kematian akibat covid-19 ini, maka Walikota Surabaya mendasarkan pada kebijakan yang ada mengkomunikasikan kebijakan yang dibuat secara langsung maupun pada setiap kesempatan berinteraksi dengan jajaran dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Sementara itu, terhadap segenap elemen masyarakat yang ada di Kota Surabaya, kebijakan PSBB disampaikan melalui himbauan-himbauan untuk dijalankan dan dipatuhi. Komunikasi terhadap adanya kebijakan ini juga disampaikan Walikota Surabaya Tri Rismaharini melalui rapat - rapat dengan stakeholder yang berada di wilayah Surabaya seperti perusahaan transportasi, pengusaha mall, hotel, tempat hiburan dan berbagai instansi lainnya pada rapat koordinasi pencegahan penularan covid-19. Dalam rapat-rapat tersebut Walikota Surabaya menyampaikan untuk membuat protocol

pengecanaan Covid-19 di area mereka masing-masing sehingga diharapkan pencegahannya bisa lebih efektif.(humas.surabaya.go.id)

Terhadap langkah yang dilakukan Walikota Surabaya dalam mengkomunikasikan kebijakannya, secara substantif sebagian maupun keseluruhannya tidak satupun yang ditentang ataupun ditolak. Kondisi ini disadari karena upaya penanganan pencegahan penularan covid-19 merupakan kebutuhan kolektif yang secara imperatif dan masif harus dilaksanakan.

Kebijakan PSBB oleh Pemerintah membawa konsekuensi pada kebutuhan terhadap sumber-sumber sebagai sarana yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan agar efektif. Sumber-sumber ini merupakan faktor penting yang meliputi: staf yang memadai baik dalam arti jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk menterjemahkan kebijakan dalam suatu bentuk kegiatan yang nyata dalam mencapai sasaran atau tujuan dari kebijakan. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah membentuk kelembagaan yang dinamakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu sebuah gugus tugas yang dibentuk Pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit corona virus baru di Indonesia. Gugus Tugas ini berada di bawah serta bertanggung jawab langsung pada Presiden Indonesia.(Wikipedia, 2020)

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas managerial dan atau teknis sesuai bidang dan kewenangannya dalam penanganan covid-19, baik pada level pusat maupun daerah. Kapasitas pelaksana penanganan covid-19 ini tidaklah diragukan, hal ini mengacu pada temuan hasil survei mengenai respons publik atas Covid-19 yang dilakukan Alvara Research Center yang dirilis Minggu(12/7/2020) bahwa “Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat selama pandemi Covid-19 ataupun pemerintah daerah”. Berdasarkan hasil survei, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendapat angka kepercayaan masyarakat sebesar 72,7 persen. Gubernur tiap-tiap provinsi mendapat angka kepercayaan 70,0 persen, sedangkan bupati/wali kota 67,7 persen. Angka kepercayaan terhadap pemerintah pusat paling rendah yaitu 60,2 persen. Survei juga menemukan bahwa selama pandemi Covid-19. publik paling puas terhadap informasi mengenai protokol kesehatan. Aspek tersebut mendapat angka kepuasan sebesar 73,3 persen. Kemudian, kepuasan terhadap perawatan pasien Covid-19 sebanyak 72,3 persen, dan kepuasan terhadap bantuan sosial 56,2 persen. Ada empat aspek yang mendapat tingkat kepuasan di bawah 50 persen yakni pemulihan ekonomi 48,2 persen, lalu ketegangan bagi pelanggan protokol kesehatan 47,3 persen. (Farisa, 2020)

Sementara itu sumber dalam bentuk anggaran yang digunakan dalam penanganan covid-19 sebagai konsekuensi adanya kebijakan, BNPB pada tahun 2020 ini mendapatkan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp. 3.496.314.726 (Rp. 3,4 triliun), yang terdiri dari pagu awal DSP sebesar Rp 250 miliar dengan realisasi sebesar Rp 197.041.524.790 (Rp 197 miliar), yang digunakan untuk penanganan bencana alam. Kedua, tambahan DSP untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 3.246.314.726 (Rp 3,2 triliun) dengan realisasi sebesar Rp 2.995.285.893.415 (Rp 2,9 triliun) dana siap pakai untuk penanganan COVID-19. (Putri, 2020). Pada tahun 2020 ini memang anggaran negara lebih difokuskan pada penanganan Covid-19 ini, yang diprioritaskan untuk: a)Menjamin kesehatan dan

keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis; b) Memastikan perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan; dan c) Perlindungan terhadap dunia usaha<sup>1</sup>.

Mendasarkan pada data di atas menunjukkan sumber-sumber dalam bentuk anggaran yang diperlukan peruntukannya sudah demikian jelas. Anggaran yang dikeluarkan tidak saja digunakan untuk memenuhi fasilitas yang dibutuhkan dalam penanganan covid-19 ini tetapi juga digunakan untuk menangani dampaknya bagi masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi. Di Kota Surabaya anggaran yang digunakan dalam penanganan covid-19 ini berdasarkan informasi yang bersumber dari Antara (10 juli 2020) sudah mencapai Rp.819 M. Anggaran sebesar ini berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Surabaya, dan dari pihak swasta atau CSR. Secara rinci anggaran penanganan Covid-19 di Kota Surabaya sebesar Rp. 819.521.262.040 itu berasal dari APBN sebesar Rp 552.862.025.000, APBD Provinsi Jatim sebesar Rp 49.657.000.000, APBD Surabaya sebesar Rp 136.246.514.992, CSR sampai dengan 30 Juni 2020 setara dengan Rp 60.160.162.048, ditambah pula dengan pelayanan mobil BIN dan BPNPB berupa *rapid test* dan *swab test* setara dengan Rp 20.595.560.000.

Besaran sumber-sumber yang digunakan sebagai konsekuensi logis dari upaya untuk menterjemahkan kebijakan dalam suatu implementasi nyata agar kebijakan tersebut efektif memang merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Atas kesadaran ini, tidak satupun institusi pusat maupun daerah yang berfungsi sebagai pelaksana atas kebijakan yang sudah dilahirkan kemudian tidak mendukung, apalagi menolak. Komitmen pelaksana kebijakan ini penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Karena terdapat temuan beberapa kasus kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah tapi karena tidak adanya dukungan, maka pelaksanaannya menjadi sulit. Faktor kecenderungan-kecenderungan pelaksana kebijakan juga merupakan faktor penting bagi efektifitas implementasi kebijakan. Menurut Edwards III (1980) banyak kebijakan masuk ke dalam "zona ketidakacuhan". Ada kebijakan yang efektif karena dalam implementasinya memperoleh dukungan dari pelaksana. Tetapi ada juga kebijakan yang tidak efektif karena kebijakan tersebut berbeda sudut pandangannya dengan pelaksana kebijakan sehingga dalam implementasi kebijakan tersebut mengalami distorsi dari tujuan atau saran kebijakan itu sendiri. Perbedaan pandangan implementor kebijakan ini dalam beberapa kasus dapat terjadi disebabkan adanya referensi yang berbeda ataupun mungkin adanya kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kebijakan tidak efektif.

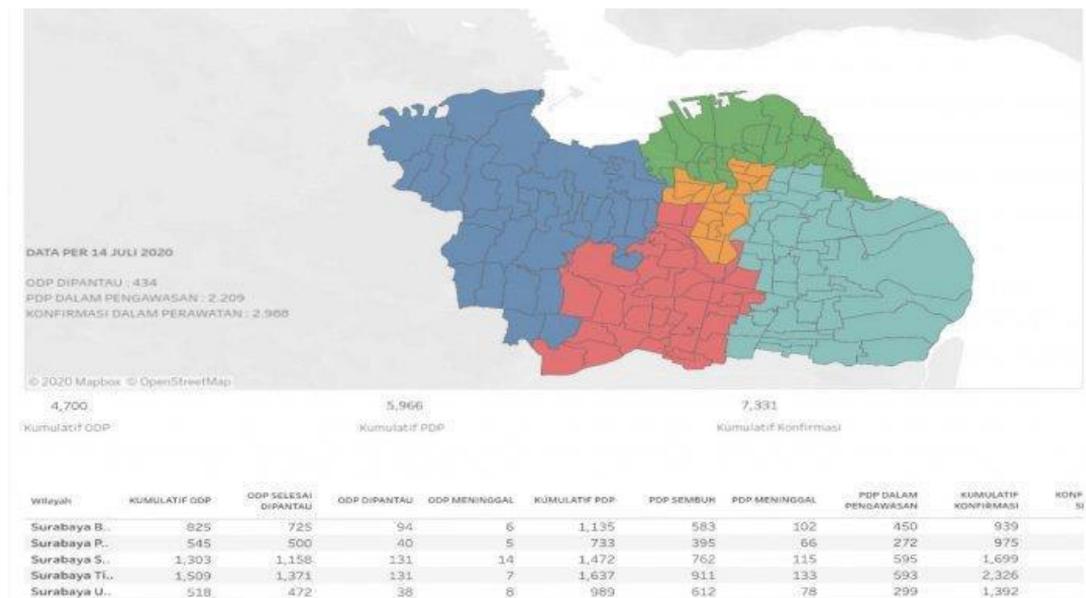
Birokrasi sebagai entitas penting yang memiliki fungsi tidak saja sebagai pembuat kebijakan tetapi sekaligus pelaksana kebijakan. Dua fungsi ini harus berjalan secara seimbang tidak hanya dominan pada fungsi pembuat kebijakan tetapi juga melaksanakan kebijakan. Termasuk dalam hal ini, keseimbangan secara struktural terhadap suatu isu atau masalah yang harus segera ditangani haruslah ada kesamaan cara pandang sehingga kebijakan daerah yang diambil memiliki koherensi dengan pusat. Dalam kasus penanganan Covid-19 ini merupakan *best practise* dari kebijakan yang sinergis antara Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya di Kota Surabaya, yaitu tidak saja dalam pengambilan keputusan tetapi juga dalam implementasi kebijakan. Sinergi ini memberi peluang bagi efektivitas kebijakan tersebut. Bagaimana efektifitas kebijakan tersebut dalam tataran pelaksanaannya?

---

<sup>1</sup> <https://kemenkeu.go.id/covid19>; diakses 15 Juli 2020

Kita lihat pada level nasional, pergerakan jumlah angka terdampak Covid-19 sampai saat masih menunjukkan kecenderungan naik. Update per Senin sore, 13 juli 2020 diumumkan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona di Indonesia, Achmad Yurianto yang mengumumkan adanya kasus penambahan jumlah pasien positif Covid-19 sebanyak 1.282 orang (Fatia, 2020). Sementara itu 3 (tiga) hari sebelumnya, berdasarkan laporan Merdeka.com; per Jumat, 10 juli 2020 pikul 12.00 WIB, jumlah pasien yang dinyatakan positif bertambah 1.611 orang, sehingga total keseluruhan menjadi 72.347 orang. Pasien yang sudah dinyatakan sembuh ada 33.529 orang. Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) pada saat yang bersamaan mencapai 38.705. Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) total 13.882 pasien.

Sementara itu, kasus Covid-19 di Kota Surabaya tidak pernah kunjung menurun selama PSBB diberlakukan. Pemberitaan Jawapos.com disampaikan bahwa pada tanggal 9 Mei 2020 jumlah pasien positif corona mencapai 592 orang. Sebelum PSBB diterapkan pada 28 April, tercatat ada 372 kasus. Jadi selama PSBB diberlakukan terjadi penambahan 220 kasus. Kondisi ini menjadi dasar dibukanya PSBB jilid 2 dan bahkan Kota Surabaya sampai memberlakukan PSBB jilid 3 yang berakhir pada tanggal 8 juni kemarin. Sampai dengan berakhirnya PSBB jilid 3 ini jumlah kasus positif covid terus bertambah. Berdasarkan informasi dari laman lawancovid-19.surabaya.go.id ; tanggal 14 Juli 2020 sebaran kasus virus corona dapat dilihat dalam tabel berikut:



Nampak dari gambar di atas bahwa sebaran virus corona secara kumulatif yang konfirmasi mencapai 7331 kasus, sedang kumulatif Pasien dalam Pengawasan sebanyak 5.966 kasus, dan yang berstatus sebagai ODP sebanyak 4.700 kasus. Memperhatikan kecenderungan semakin bertambahnya kasus covid di Surabaya pasca pemberlakuan kebijakan PSBB di Kota Surabaya dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut gagal dalam mencapai tujuan untuk mengurangi jumlah kasus covid di Surabaya.

Kegagalan kebijakan Pemerintah ini lebih disebabkan karena kurangnya dukungan dari masyarakat. Pedoman perilaku yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya saat pandemi covid ini kurang ditaati atau dengan kata lain masyarakat kurang disiplin. Hal ini seperti disampaikan Walikota Surabaya dalam jumpa Pers saat berakhirnya PSBB jilid 3 bahwa "*Jangan ditambah lagi, hanya karena kita tidak disiplin. Kita harus disiplin, tolong diperhatikan. Saya sudah membuat protokol kesehatan untuk semua tempat, tolong diikuti dan dipatuhi*" (surabaya.bisnis.com). Artinya perilaku masyarakat dalam menyikapi ketentuan atau kebijakan ini merupakan faktor penting bagi keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Dukungan masyarakat dalam implementasi kebijakan sangat diperlukan bagi efektifitas kebijakan.

### **Analisis Hambatan-hambatan Yang menyebabkan Kegagalan Kebijakan.**

Seperti disinggung pada bagian terdahulu constrain yang menyebabkan kegagalan kebijakan dalam penanganan covid di Kota Surabaya adalah ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan pandemi covid-19. Ketidakpatuhan, ketidakdisiplinan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang membatasi ruang gerak mereka pada masa pandemi covid-19 ini tentu bukan tanpa alasan. Apa yang dipandang penting dalam suatu masyarakat belum berarti penting bagi masyarakat lainnya. Persoalan Virus corona dalam satu masyarakat bisa dianggap hal yang sangat penting karena akan berdampak pada kesehatannya dan bahkan menentukan hidup matinya. Pada kelompok masyarakat yang memiliki pandangan demikian, maka pada masa pandemi covid-19 dimana terdapat kebijakan yang membatasi mereka (PSBB) untuk tidak keluar rumah jika tidak perlu mereka patuh. Kepatuhan mereka terhadap kebijakan itu akan totalitas ketika tidak membawa dampak ekonomi bagi dirinya. Artinya ketika kepatuhan itu tidak menimbulkan pendapatannya berkurang, mereka tidak masalah. Akan menjadi persoalan ketika kepatuhan terhadap kebijakan itu berpengaruh negatif terhadap penghasilannya, maka tentu mereka akan berfikir seribu kali terlebih mereka memiliki keluarga yang masih menjadi tanggung jawabnya. Satu dua hari tidak masalah, tetapi dalam jangka waktu yang cukup lama apalagi tidak jelas waktunya, kondisi ini akan membahayakan dirinya dan keluarganya. Terlebih konsekuensi atas kepatuhannya itu tidak ada kompensasinya guna menjaga kelangsungan hidupnya, maka sudah bisa dipastikan kepatuhan mereka adalah kepatuhan yang semu. Dalam Teori Watak, Edward Spranger yang dikutip dari Budiono (2007) membagi manusia itu dalam enam golongan, yaitu: a) Manusia Ekonomis; b) Manusia politik; c) Manusia Sosial; d) Manusia Teoritis; e) Manusia Seni; dan f) Manusia Religius.

Dalam Teori Watak ini; manusia yang digolongkan sebagai manusia ekonomis; pendorong terkuat setiap perbuatannya ialah mencari uang. Pantang baginya untuk berbuat sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan. Kaitan dengan kasus kebijakan yang membatasi mereka untuk beraktivitas di luar rumah, maka masyarakat yang termasuk dalam golongan manusia ekonomis ini akan merasa terganggu dengan kebijakan tersebut. Apalagi kelompok masyarakat yang memang kalau tidak keluar tidak mendapat penghasilan tentu merasa sangat terganggu dengan kebijakan tersebut. Pasti pilihannya lebih baik keluar dari pada tidak mendapatkan penghasilan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Mereka akan tidak peduli dengan pandemi corona dengan segala dampaknya. Pilihan-pilihan rasional masyarakat ini dapat menghasilkan dan merintanginya dukungannya terhadap implementasi kebijakan, yang mengakibatkan kebijakan tidak efektif.

Dalam perspektif masyarakat lainnya terkait kegagalan dari kebijakan ini adalah lemahnya kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat ini penting bagi efektifitas kebijakan, karena sangat naif jika kewajiban dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan ini bergantung pada birokrasi. Keterbatasan jumlah, ruang dan waktu yang tersedia bagi birokrasi sangat tidak memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan. Aktivasi masyarakat untuk menjalankan fungsi ini dalam pelaksanaan kebijakan akan dapat mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh birokrasi. Saling mengingatkan diantara anggota dalam suatu kelompok masyarakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan protokol kesehatan sebagai bagian kebijakan adalah hal yang sangat mungkin untuk dilakukan. Untuk kepentingan ini perlu menggunakan pendekatan saling asah, saling asih dan saling asuh. Dalam praktek dimasyarakat kita harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Kita perlu meningkatkan kepedulian terhadap situasi pandemi covid-19. Hal ini penting dalam menyongsong era New Normal.

Menyongsong era New Normal ini, perlu penyamaan persepsi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Persepsi yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang bertolak belakang dengan tujuan kebijakan New Normal. Sosialisasi dan edukasi tentang hal ini penting untuk dilakukan terhadap semua elemen masyarakat. Hal penting lainnya dalam pemberlakuan New Normal ini adalah memastikan kesiapan infrastruktur di semua tempat kegiatan yang menjadi tempat berkumpulnya orang. Pengalaman selama ini telah memberikan pelajaran yang berharga bagi upaya untuk penanganan penyebaran virus corona. Contoh tempat berkumpulnya orang yang selama ini lepas dari pantauan adalah pasar-pasar tradisional. Kerumunan orang banyak sekali dengan tanpa mengindahkan jarak dan tanpa masker tidak ada pengaturan antar pedagang dan pembeli, semua berjalan secara alami. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena besar sekali kemungkinan terjangkitnya virus corona ini.

### **Prakondisi Alternatif Menyongsong New Normal.**

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adi Sasmita mengatakan, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. “Secara sosial, kita pasti akan mengalami sesuatu bentuk new normal atau kita harus beradaptasi dengan beraktivitas, dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan menghindari kerumunan, serta bekerja, bersekolah dari rumah.(Bramasta, 2020)

Mendasarkan pada pengertian new normal seperti dikemukakan di atas, bagi masyarakat hal ini bukan hal yang baru sama sekali. Tatanan perubahan perilaku masyarakat sejak pandemi covid-19 ini masuk di Indonesia sudah dibuat sejak awal oleh pemerintah. Bahkan pemberlakuan kebijakan PSBB merupakan fondasi yang menguatkan dalam merubah perilaku masyarakat dalam masa pandemi covid-19 ini. Sehingga pada new normal ini merupakan masa kepastian dan penekanan-penekanan bagi masyarakat untuk berubah perilakunya dalam menjalankan kehidupan sehari dengan produktif. Masa pembelajaran bagi masyarakat selama ini untuk menjalani kehidupan dengan protokol kesehatan terjadi dan berproses. Kemungkinan terjadinya pelanggaran perilaku oleh masyarakat ketika pemberlakuan new normal ini memang mungkin terjadi. Oleh karenanya dalam menyongsong pemberlakuan new normal ini, maka pemerintah perlu

melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap semua langkah dan hasil penanganan pandemi covid-19 ini oleh semua Gugus Tugas dan semua *stakeholders* yang terkait.

Aspek lain yang juga menarik untuk dikemukakan selama pandemi covid-19 di Indonesia ini adalah menyangkut komunikasi dan informasi. Bahwa ini beredar informasi di media sosial maupun media yang lainnya yang kredibilitasnya diragukan yang memberi informasi menyesatkan terkait dengan pemahaman Covid-19 ini menyangkut cara penularan, penyebarannya dan cara menghindarinya. Juga pemberitaan yang provokatif tentang kematian seseorang yang selalu divonis karena covid-19 yang membuat masyarakat resah dan ketakutan. Dengan demikian, maka dalam kaitan dengan new normal perlu dipastikan komunikasi, informasi yang akurat dari pihak yang berwenang dan edukasi yang merata pada semua lapisan masyarakat.

Memperhatikan masyarakat yang pada masa pandemi kurang perhatian terhadap situasi pandemi dan cenderung berbuat semaunya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, dalam arti mereka tidak memperhatikan kaidah protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, maka penanganannya perlu memberdayakan komunitas masyarakat setempat sebagai pelopor penegak disiplin. Untuk menjalankan fungsi sebagai pelopor maka perlu menjadikan dirinya sebagai contoh panutan, promotor dan mengajak bergerak bersama seluruh elemen masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan.

## Referensi

- Budiono, Kabul. 2007. *Nilai-Nilai Kepribadian dan Kejuangan Bangsa Indonesia*. Alfabeta. Bandung.
- Bramasta, Dandy Bayu. 2020. Mengenal Apa Itu New Normal di Tengah Pandemi Corona. [www.kompas.com](http://www.kompas.com). 20 Mei 2020
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Whashington, D.C.: Congressional Quarterly Inc.
- Fatia, Sarah Nurul.2020. "Kasus Virus Corona Indonesia per 13 Juli 2020 Tambah 1.282 Orang".[www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01594886](http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01594886). 13 Juli 2020, 15:40 WIB (diakses 15 Juli 2020)
- Farisa, Fitria Chusna.2020. Survei Publik lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat. [nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com).12 juli.2020. Diakses 14 juli 2020
- Putri, Zunita.2020. Gugus tugas keluarkan anggaran penanganan corona Rp. 2,9 triliun ini rinciannya. [News.detik.com](http://News.detik.com). Senin 13 Juli 2020(diakses 14 Juli 2020)
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/12/18121301/survei-publik-lebih-percaya-gugus-tugas-dan-pemda-dibanding-pemerintah-pusat?page=all>(diakses, 14 Juli 2020)
- <https://www.beritasatu.com/nasional/654229-anggaran-penanganan-covid19-surabaya-sudah-mencapai-rp-819-m> (diakses, 14 Juli 2020)
- <https://surabaya.bisnis.com/read/20200609/531/1250142/psbb-surabaya-berakhir-riema-warga-jangan-semorono-dan-disiplin> (diakses, 14 Juli 2020)
- <https://surabaya.tribunnews.com/2020/07/15/update-zona-merah-di-surabaya-15-juli-2020-tambaksari-makin-tinggi-244-kasus-covid-19> (diakses, 14 Juli 2020)
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/update-kasus-covid-19-nasional-10-juli-bertambah-1611-total-72347-positif.html> (diakses, 14 Juli 2020)
- <https://www.jawapos.com/surabaya/10/05/2020/pasien-meningkat-psbb-surabaya-tak-efektif-atau-pemkot-gencar-tes/>(diakses, 14 Juli 2020)

<https://palu.tribunnews.com/2020/07/05/sebaran-covid-19-indonesia-minggu-5-juli-2020-7-provinsi-nihil-kasus-baru-5-wilayah-alami-lonjakan>(diakses, 14 Juli 2020)

<https://palu.tribunnews.com/2020/07/07/update-covid-19-indonesia-selasa-7-juli-2020-tambah-1268-kasus-angka-kesembuhan-mencapai-30-ribu>(diakses, 14 Juli 2020)

<https://humas.surabaya.go.id/2020/03/17/wali-kota-risma-minta-berbagai-stakeholder-buat-protokol-pencegahan-covid-19/>(diakses, 14 Juli 2020)

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/20/063100865/mengenal-apa-itu-new-normal-di-tengah-pandemi-corona->(diakses, 14 Juli 2020)

# PERAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA

Dwi Suhartini dan Yulita Dwi Nuraini

---

**Pengutipan:** Suhartini, D. Nuraini, Y. D. (2020). Peran Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Manusia Seutuhnya. In Kriswibowo, A. & Nawangsari E. R. (Eds.), *Potret Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi tantangan Pandemi Covid-19*. Surabaya: Penerbit Prodi Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur.

---

Topik gender merupakan suatu hal yang menarik untuk diperbincangkan bahkan menjadi suatu hal yang penting untuk diteliti. Namun, khususnya di Indonesia menjadi suatu hal yang menarik untuk didiskusikan, karena Indonesia menganut budaya patriarki yang mengedepankan peran laki-laki daripada perempuan. Marzuki, (2017) menyatakan bahwa kajian gender tetap menjadi hal yang menarik dan aktual. Hal ini dikarenakan masyarakat di negara Indonesia masih banyak yang masih belum mengetahui persoalan tentang gender sehingga masih banyak kesenjangan dan ketidakadilan terhadap gender.

Sari (2020) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan 2045 sebagai Tahun Indonesia Emas, sebagai target terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan lelaki. Kesetaraan, lanjutnya, adalah bagaimana perempuan dan lelaki sama-sama mendapatkan empat hal, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan mendapatkan manfaat. Kesetaraan dalam keluarga dimulai dengan kesetaraan dalam pendidikan dan masyarakat menganggap bahwa anak perempuan tidak boleh mengejar pendidikan yang lebih tinggi<sup>1</sup>.

Fenomena tersebut merupakan awal dari permasalahan yang bergulir di masyarakat, hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman dari arti gender itu sendiri yang rancu. Gender dikatakan sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. Pemikiran tersebut menjadi salah, ketika peran gender itu dapat dipertukarkan oleh konstruksi sosial dan lingkungannya, sehingga Merriam dan Webster, (2013) menyatakan bahwa gender merupakan ciri atau sifat yang dihubungkan dengan jenis kelamin tertentu, baik berupa kebiasaan, budaya, maupun perilaku psikologi, bukan perbedaan secara biologis. Suhartini, dkk (2019) menambahkan bahwa gender adalah peran laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan karena dikonstruksi oleh lingkungannya, bukan perbedaan secara biologis.

Nurhaeni (2010) menyatakan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki pada dasarnya dipengaruhi dua teori yaitu *nature* dan teori *nurture*. Pengikut teori *nature* beranggapan ada perbedaan psikologis yang disebabkan faktor biologis, sedangkan pengikut teori *nurture* beranggapan ada perbedaan yang tercipta melalui proses belajar dari lingkungannya, diperjelas Kreitner dan Kinicki (2011) menyatakan ada perbedaan kepribadian antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh pandangan *nature* dan *nurture*. Kail (2007) menunjukkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki ditinjau dari perkembangan fisik, kemampuan intelektual, perilaku personal dan sosial. Ketiga perbedaan tersebut menggunakan pendekatan teori *nature*, yang banyak dipengaruhi unsur biologisnya.

---

<sup>1</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/ketidakesetaraan-gender-masih-tinggi-di-indonesia>

Berdasarkan teori *nature* dan *nuture* tersebut yang membuat persepsi tentang gender menjadi berbeda ditinjau dari aspek perbedaan biologis dan perbedaan peran yang dikonstruksi oleh lingkungannya. Namun, perbedaan pemikiran tersebut menjadi perdebatan jika dikaitkan dengan budaya patriarki itu sendiri yang menyatakan bahwa perempuan cenderung lemah dan emosional, sedangkan laki-laki lebih kuat dan rasional. Hal inilah yang mendorong adanya marginalisasi peran perempuan dalam berbagai situasi sosial yang ada, mulai dari kesempatan dalam pendidikan, karir dan berpolitik. Hal yang seharusnya ada keseimbangan yang harmonis dan bekerjasama dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Permasalahan gender juga dikaitkan dengan aspek biologis yang membentuknya sejak dalam penciptaan manusia. Wood (2007) menyatakan bahwa karakter manusia dipengaruhi unsur biologis yang ditandai adanya kromosom X dan Y, kegiatan hormonal, dan spesialisasi otak. Unsur biologis tersebut yang akan mempengaruhi kualitas individu pada proses berpikir, fitur tubuh dan keterampilan motorik. Pada umumnya otak pria dikembangkan lobus kiri yang mengendalikan cara berpikir linier, menggunakan informasi sekuensial, abstrak, penalaran analitik. Perempuan menggunakan lobus kanan, sehingga cenderung memiliki kemampuan dalam berimajinasi dan artistik, holistik, berpikir intuitif, tugas-tugas visual dan spasial.

Wood (2007) juga mengungkapkan bahwa perbedaan gender bukan hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungannya seperti pengaruh interpersonal dan budaya. Perbedaan gender dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dimana individu tersebut berinteraksi dengan lingkungan, sehingga akan mendorong adanya perbedaan gender yang dikonstruksi secara sosial. Hal inilah yang memunculkan pentingnya kesetaraan gender. Pemikiran tersebut menggambarkan bahwa perempuan juga dapat berperan sebagai laki-laki ketika diberi tanggung jawab sebagai pimpinan yang harus berpikir secara rasional dan bersikap tegas dalam pengambilan keputusan, contoh, ibu Tri Rismaharini sebagai walikota Surabaya, Sri Mulyani sebagai Menteri keuangan Indonesia. Kondisi ini, akan berbalik ketika laki-laki yang melakukan pekerjaan sebagai desainer atau makeup artis, seperti Ivan Gunawan yang karena tuntutan pekerjaannya harus bersikap lembut dan gemulai layaknya perempuan.

Untuk itu, perlu adanya kesetaraan gender, baik dalam akses pekerjaan, pendidikan, partisipasi dalam kehidupan keluarga dan karir. Fenomena yang berkembang dimasyarakat bahwa perempuan juga bisa sebagai pencari nafkah, perempuan mampu berkarir sebagai pimpinan manajerial dan berpolitik. Harus dibuang jauh pemikiran patriarki, karena perempuan dapat setara dengan laki-laki ketika diberi kesempatan untuk berkarya. Hal ini dipicu oleh pemikiran bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Oleh karena itu, manusia harus memiliki hak asasi yang adil tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki maupun perempuan seperti halnya hak untuk menentukan hidup secara bebas dan hak untuk berpendapat. Namun, Aldianto, dkk (2015) menyatakan bahwa zaman sekarang masih sering kali dianggap perempuan itu lemah dan hanya mampu bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya hal yang berada diluar kehidupan tersebut dianggap tidak menjadi penting. Kaum perempuan juga sering mendapat perlakuan yang diskriminatif dilingkungan sosialnya.

Fenomena yang ada diperkuat dari hasil penelitian. Hal ini dipicu dari hasil penelitian yang kontradiktif. Kreitner dan Kinicki (2011) menjelaskan dari penelitian

Wilson, telah membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam keterampilan manajerial antara manajer laki-laki dan manajer perempuan. Hasil penelitian tersebut memberikan makna bahwa perempuan mempunyai kesamaan dalam memainkan peran sebagai pimpinan seperti laki-laki. Demikian juga, Gibson dkk. (2012) menunjukkan bahwa karyawan laki-laki dan perempuan memiliki perilaku kerja yang sama, namun demikian dari hasil penelitian juga menyebutkan bahwa ada perbedaan gender dalam hal cara berkomunikasi. Hal inilah yang mendorong bahwa perempuan dianggap lemah dalam berkomunikasi. Berikut ada beberapa perbedaan gender dalam berkomunikasi:

Kretier dan Kinicki (2011) menyatakan bahwa perbedaan komunikasi antara perempuan dan laki-laki banyak didorong oleh perbedaan biologis sehingga laki-laki cenderung berkomunikasi lebih agresif, lebih sering mengintrupsi dan menyembunyikan emosinya, lebih detail akan dijelaskan perbedaannya sebagai berikut:

1. Laki-laki kurang menyukai bertanya untuk menggali informasi atau meminta pengarahan karena akan menunjukkan rendahnya pengetahuan mereka.
2. Didalam pengambilan keputusan, perempuan kurang percaya diri, sedangkan laki-laki cenderung percaya diri.
3. Perempuan cenderung lebih suka meminta maaf walaupun tidak melakukan kesalahan, sedangkan laki-laki cenderung menghindari untuk meminta maaf karena menjatuhkan posisi mereka.
4. Perempuan cenderung menerima kesalahan dengan cara yang halus sesuai situasi, sedangkan laki-laki cenderung mengabaikan kesalahan.
5. Perempuan cenderung menerima kritikan dengan cara positif, sedangkan laki-laki menerima kritikan secara langsung.
6. Perempuan mengatakan terimakasih walaupun tidak dibutuhkan, sedangkan laki-laki menghindari kata terimakasih sebagai tanda kelemahannya.
7. Perempuan cenderung bertanya "bagaimana menurutmu" untuk membangun kesepakatan, sedangkan laki-laki sering menganggap bahwa pertanyaan itu sebagai tanda ketidak mampuan dan kurang kepercayaan.
8. Perempuan cenderung memberikan pengarahan secara tidak langsung, kemungkinan teknik tersebut dilakukan karena bingung, kurang percaya diri dari pada laki-laki.
9. Laki-laki cenderung mengambil ide diawal dari pada perempuan dan mengklaimnya, sedangkan perempuan cenderung mengikuti proses tanpa protes.
10. Perempuan menggunakan volume suara yang lembut untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan laki-laki menggunakan volume suara yang keras untuk menarik perhatian dan mempertahankan pengawasannya.

Berdasarkan penejelasan perbedaan komunikasi antara perempuan dan laki-laki, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan tersebut dipicu oleh unsur biologis manusia yang mempengaruhi psikologinya. Fenomena tersebut yang mempengaruhi pemikiran di masyarakat bahwa perempuan kurang mempunyai keberanian dalam menyampaikan pendapat, sehingga perempuan dianggap kurang pas diberi peran sebagai pimpinan. Namun, hal itu akan terbantahkan, ketika perempuan diberi tanggungjawab sebagai pimpinan. Perempuan yang mendapat kesempatan sebagai pimpinan akan dibentuk lingkungan dan sosialnya untuk berani menyampaikan gagasannya seperti laki-laki. Contohnya, Bu Risma, Megawati, Sri Mulyani dan masih banyak lagi.

Hal menarik lainnya adalah bahasan stereotipe, merupakan pelemban dari sekelompok orang. Adanya stereotipe mengakibatkan ketidakadilan khususnya kaum perempuan yang direkatkan pada mereka. Contohnya, anggapan bahwa jika perempuan berdandan adalah tanda untuk memancing lawan jenis untuk mendekatinya, akibatnya pada setiap kasus kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Kondisi ini sering mengeksploitasi perempuan untuk dijadikan produk iklan tertentu yang menonjolkan sisi fisik perempuan, contoh pameran mobil. Hal ini bertujuan menarik minat konsumen untuk melihat pameran tersebut dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut.

Faktor lain yang mendorong pendapat bahwa gender merupakan jenis kelamin sosial berupa atribut maskulin atau feminim yang merupakan konstruksi sosial budaya. Khaza'i, (2013) yang menjelaskan hasil penelitian Humm dan Maggie, (2007) temuannya tentang perbedaan kontras lintas budaya pada kasus primitif di *New Guinea (Arapesh, Mundugoor, dan Tahembuli)* dalam penyebutan maskulinitas dan feminitas yang berdasarkan sifat, peran, ciri dan kebiasaan yang disangkutpautkan dengan masing - masing gender, bahkan didalam temuannya sebuah tatanan masyarakat yang tidak mengenal batasan gender juga dapat berlaku dengan tanpa hambatan, sehingga Bem (1981) menyatakan peran gender ada empat, yaitu: maskulin, feminisme, androgini, dan tidak tergolongkan. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Tipe Maskulin, yaitu manusia yang memiliki sifat laki-laki yang tinggi dan sifat perempuan yang lebih rendah. Oleh karena itu maskulin merupakan sifat yang pada umumnya ditunjukkan untuk lelaki.
2. Tipe Feminim, yaitu manusia yang memiliki sifat kewanitaanya yang lebih tinggi dan sifat laki-laknya yang lebih rendah. Dengan demikian feminim merupakan sifat yang umumnya menggambarkan seorang perempuan.
3. Tipe Androgin, yaitu manusia yang sifat laki-laki dan kewanitaanya yang tinggi. Dimana manusia tersebut selain memiliki pemikiran maskulin dan feminitas akan tetapi dapat menunjukkan sikap ekspresif dan instrumental.
4. Tipe Tidak Tergolongkan (*Undifferentiated*), yaitu manusia yang memiliki sifat laki-laki maupun perempuan yang lebih rendah. Tingginya karakteristik maskulin dan feminim yang diinginkan pada suatu individu pada saat yang bersamaan. Individu yang androgini contohnya adalah seorang pria yang tegas (sifat maskulin) tetapi dia juga mempunyai sifat mengasihi (sifat feminim) dan seorang perempuan yang bersifat dominan (sifat maskulin) tetapi sensitive terhadap perasaan orang lain (sifat feminim).

Berdasarkan beberapa permasalahan yang sudah dibahas, maka perlu adanya kesetaraan gender yang mengkondisikan saat keadaan dimana siklus laki-laki dan perempuan harmonis, setara dan seimbang. Kesetaraan gender mengusahakan dimana laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam merealisasikan hak-hak dalam kontribusi pada budaya, sosial ekonomi dan perkembangan politik sehingga dapat menikmati hasil dari perkembangan tersebut. Keadilan dan kesetaraan gender dapat dilakukan dengan hal berikut:

1. Mencoba menghormati dan menerima semua perbedaan dari laki-laki dan perempuan.
2. Mendiskusikan bagaimana cara mengubah sudut pandang orang-orang terhadap perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan.

3. Melihat kemampuan dan bakat masing-masing warga negara baik dari laki-laki dan perempuan dalam memecahkan problematika dan mempersiapkan masa depannya.
4. Memperjuangkan hak asasi manusia dimana gender sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masalah itu.
5. Mengusahakan perkembangan dan penegakan keadilan gender di masyarakat.
6. Menanamkan pendidikan dalam masyarakat karena dengan pendidikan masyarakat menerima norma-norma, pengetahuan, dan kemampuan.

Berdasarkan penjelasan tentang konsep gender yang sudah dibahas, maka gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi pola pikir atau sifat yang dapat dipertukarkan secara sosial maupun kultural. Perempuan dapat memainkan peran yang dimiliki laki-laki ketika kondisi dapat mendukungnya, sebaliknya laki-laki juga dapat memerankan peran yang dimiliki dimana kondisi mendukungnya. Apabila manusia berpedoman dengan teori *nature* yang melihat gender dari segi aspek biologisnya menjadikan perempuan sedikit mempunyai hak untuk berpendapat dari pada laki-laki dikarenakan dalam kepemimpinan perempuan lebih menggunakan perasaan kebenaran hati, bukan logika seperti laki-laki. Akan tetapi pada zaman saat ini pandangan tentang teori *nature* sudah jarang dipergunakan. Karena adanya teori *nurture*, hal ini dapat membukakan seluruh mata dan hati perempuan agar mau merubah pandangan bahwa seorang perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki.

Pendapat demikian diperkuat atau didukung dari beberapa hasil penelitian yang mengangkat topik gender yang dihubungkan dengan dampak dalam penyusunan informasi. Dibuktikan bahwa perempuan mempunyai perilaku positif dalam menyuguhkan informasi keuangan yang lebih baik dan mempunyai kebaranian seperti laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan dapat mengerjakan pekerjaan yang dilakukan laki-laki ketika kondisi lingkungan atau sosial mendukungnya. Seperti hasil penelitian dari Gul, dkk (2019) dan Srinidhi, dkk (2011) menjelaskan bahwa direktur perempuan dapat menghasilkan informasi laba yang lebih berkualitas. Gulzar dan Wang (2011) menemukan bahwa direktur perempuan cenderung tidak melakukan manajemen laba. Yuhertiana (2011) juga membuktikan dalam hasil penelitiannya bahwa kepala dinas perempuan lebih beretika dibanding kepala dinas laki-laki dalam menyusun anggaran.

Dalam kasus *whistleblowing* (pengungkapan kecurangan) seorang perempuan yang bergabung pada Enron diakhir 1993, saat menjabat *Vice President of Enron*, Sherron Watkins mengendus banyaknya praktek-praktek kecurangan dalam keuangan perusahaan, sedangkan di Indonesia muncul nama kartini perempuan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia yang berani menguak kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) di Provinsi Riau jaksa meminta ibu Sri Mulyani jangan takut dan dirinya akan diposisikan sebagai saksi pengungkap (*whistleblower*) dalam kasus tersebut.

Untuk itu, telah terbukti dari hasil penelitian dan teori yang mendasarinya bahwa kesetaraan gender wajib dan harus direalisasikan mulai dari sekarang sampai menuju ke masa Indonesia emas di tahun 2045. Perempuan mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan laki-laki. Perempuan juga lebih beretika dalam menghasilkan informasi, maka dari itu, perempuan harus diberi porsi yang sama dengan laki-laki dalam hal empat hal, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan mendapatkan manfaat. Kondisi demikian akan meningkatkan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pandangan tentang gender dapat menyetarakan antara kaum lelaki dan perempuan, karena keduanya

harus bergotong royong dalam kesejawatan dan keharmonisan dalam berkeluarga, berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Hal yang tidak dapat diingkari adalah kodrat perempuan tetap menjadi seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya.

## Referensi

- Aldianto, Rudi, Jasruddin dan Hidayah Quraisy (2015). Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Volume III No. 1 Mei 2015 ISSN e-2477-0221 p-2339-2401
- Bem, S. L. (1981). *Gender Schema Theory: A cognitive Account of Sex Typing*. Psychological Review.
- Gul, F. A., C. Min, dan B. Srinidhi. (2010) Gender Diversity on US Corporate Boards and Cost of Capital. *Working paper*, The Hong Kong Polytechnic University.
- Gulzar, M.A. dan Wang, Zongjun. (2011) “Corporate Governance Characteristics and Earnings Management: Empirical Evidence From Chinese Listed Firms”. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*. ISSN 2162-3082. Vol. 1, No. 1.
- Haspels, Neliem dan Suriyasarn, Busakorn. 2005. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Perburuhan Internasional. <https://www.batamnews.co.id/berita-36903-sri-sulyani-jadi-whistleblower-kasus-korupsi-add-lancang-kuning.html>
- Kail, Robert. V & Cavanaugh. J. C. (2007). *Human Development: A life Span View* 2th ed. United States: Wadsworth Thomson Learning.
- Khuza’i. (2013) Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol.11, No. 1 (Maret 2013)
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. 2014. *Perilaku Organisasi*. Edisi 9. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Marzuki. (2007) Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender. *Jurnal Civis*. Vol. 4, No. 2
- Merriam-Webster (2013) 11th Collegiate Dictionary, (Ver. 3.0; Merriam- Webster, Inc.,
- Nurhaeni, Ismi Dwi. A. 2010. *Kebijakan Publik Pro Gender*, UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS.
- Sari, Rohika Kurniadi. (2020) Ketidaksetaraan Gender Masih Tinggi di Indonesia <https://www.voaindonesia.com/a/ketidaksetaraan-gender-masih-tinggi-di-indonesia-5316082.html>
- Suhartini, D., Sari, R. P., & Riadi, E. (2019). Konsekuensi Budgetary Slack : Perspektif Gender, *journal of Accounting Science*, 3(1), 37–48.
- Srinidhi, Bin, Ferdinand. A.G., dan Judy.T. (2011) “Female Directors and Earnings Quality”. *Contemporary Accounting Research*. Vol. 28 No. 5. pp. 1610–1644
- Wood, Julia T. 2007. *Gendered Lives, Communication, Gender and Culture*, USA: Wadsworth Cengage Learning.
- Yuhertiana, Indrawati. (2011) “A Gender Perspective of Budgetary Slack in East Java Local Government”. *International Research Journal of Finance and Economics*. Issue 78. EuroJournals Publishing. Inc.

## REVIEW BUKU

### MEDIAMORPHOSIS: UNDERSTANDING NEW MEDIA BY ROGER FIDLER<sup>1</sup>

Zainal Abidin Achmad

---

**Pengutipan:** Achmad, Z. A. (2020). Review Buku: Mediamorphosis: Understanding New Media by Roger Fidler. In Kriswibowo, A. & Nawangsari E. R. (Eds.), *Potret Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi tantangan Pandemi Covid-19*. Surabaya: Penerbit Prodi Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur.

---

#### **Ringkasan**

Gagasan dan temuan dalam buku ini sangat berguna untuk mendapatkan konteks dalam memikirkan masa depan media, suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh para akademisi, praktisi media, dan masyarakat umum yang menyadari tentang semakin pentingnya peranan media komunikasi pada masa mendatang. Lebih lanjut, paparan berbagai temuan Fidler dalam buku ini sangat akurat dan tepat, karena terlahir dari riset dengan database yang sangat kaya dan dilatarbelakangi pengalaman Fidler yang panjang sebagai praktisi media dan pengambil kebijakan di perusahaan media.

Buku ini berisi tentang prediksi dan kenyataan perubahan teknologi media dan teknologi komunikasi yang digunakan manusia. Buku ini bukan berisi tentang tutorial dan tuntunan teknis, tetapi berisi tentang evaluasi teknologi komunikasi di masa kini dan gambaran perkembangan alternatif teknologi komunikasi di masa depan. Roger Fidler secara detail menguraikan sejarah kemunculan teknologi media, perubahan bentuk dan dampaknya pada struktur masyarakat. Sorotan terutama adalah pada perkembangan bentuk populer dari media mainstream seperti koran, majalah, buku, televisi dan radio.

Isi pokok bahasan dalam buku ini antara lain: prinsip mediamorphosis, domain media komunikasi, peran bahasa dalam mediamorfosis media, teknologi yang berkembang di tiga era mediamorphosis, konteks budaya di tiga era mediamorphosis, kegagalan berkembang media dan *lesson learnt*, pengaruh mediamorphosis di ranah komunikasi interpersonal, pengaruh dan bentuk mediamorphosis dalam ranah penyiaran, mediamorphosis dalam ranah dokumen dan perkembangan *hype* dan realitas.

Apabila memperhatikan cara bertutur dan isi buku, Fidler bertindak seakan menjadi sejarawan sekaligus sebagai seorang yang visioner. Kemampuan sejarawan dapat dilihat dari paparan historis kelahiran-kelahiran media mainstream dalam kehidupan manusia. Kemampuan seorang visioner dapat dilihat dari berbagai prediksi dan usulan berbagai skenario media yang futuristik. Gambaran media-media yang ditampilkan bukan sekadar dari fiksi dan imajinasi, tetapi berasal dari observasi yang cermat terhadap fenomena dan kondisi di masa lalu dan kemungkinan implikasi logis di masa depan.

Kehadiran buku ini, bagi Fidler dianggap sebagai kewajiban untuk menerbitkannya bagi masyarakat. Sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk bekerja, dan mengejar karir untuk masa depannya. Kemampuannya dalam pengembangan teknologi cetak koran merupakan keahlian langka. Pada saat komputerisasi cetak koran hadir, Fidler

---

<sup>1</sup> Hasil review ini menjadi bagian dari teori pendukung bagi Disertasi yang berjudul *Pergeseran Relasi Antara Pendengar Radio dengan Institusi Radio dalam Masyarakat Jaringan (Studi Etnografi Virtual pada Radio-radio Budaya di Jawa Timur yang Bermediamorfosis)*, Program Studi S3 Ilmu Sosial, FISIP, Universitas Airlangga, 2020.

yang juga dikenal sebagai ahli desain koran mengembangkan teknologi pewarnaan terkomputerisasi. Perusahaan selalu mendukung divisi riset dan pengembangan yang dilakukan Fidler. Salah satunya adalah pengembangan percobaan *videotext* melalui *viewtron*. Sebuah terobosan teknologi yang banyak dipuji tetapi mengalami kegagalan dalam pemasaran.

Sosok Roger Fidler yang memiliki jiwa inovatif, berulang kali dan pantang menyerah memperkenalkan berbagai gagasannya yang orisinal untuk mengembangkan dan mengangkat isu-isu media di masa depan. Mediamorphosis adalah upaya untuk memadukan berbagai serpihan pikiran dan visinya untuk dipahami dan menjadi koheren. Sebagian buku ini juga berisi visi kemarahan Fidler karena beberapa kegagalannya untuk membawa perubahan, walaupun dia dikenal berpengalaman dan memiliki pengetahuan langsung tentang dunia media.

Beberapa ramalan Fidler yang dilakukannya tahun 2000 tentang kehadiran berbagai teknologi di masa depan, beberapa tahun berikutnya menjadi kenyataan. Misalnya akan ada sebuah *headset* multimedia yang mampu melakukan *teleportasi* manusia ke dalam realitas "*metaverse*" virtual. Ramalan itu menjadi kenyataan dengan ditemukannya headset virtual reality pada tahun 2010. Ramalan lain yang menjadi kenyataan adalah tentang manusia yang memanfaatkan *web global cybercommunities* untuk belanja, bekerja dan bermain. Semakin kabur batasan antara yang nyata dan virtual, seolah manusia "terbang" dari situs ke situs, berhenti untuk teleconference dan video mail, atau kemudian berubah bentuk di dunia virtual sebagai *avatar* atau identitas online khusus yang menjaga privasi dan anonimitas mereka. Sedangkan berbagai *Big Server* akan menawarkan dan menampilkan video interaktif, menyediakan musik TV dan film *on-demand*.

Konsep mediamorphosis ini pertama kali diperkenalkan Roger Fidler, Direktur Knight Ridder tentang New Media, pada tahun 1990 dalam judul artikelnya tentang masa depan koran. Roger Fidler diakui secara internasional sebagai perintis media baru dan visioner. Dia terkenal karena visinya mengenai surat kabar digital dan perangkat membaca yang bersifat *mobile*, pada tahun 1981. Pada tahun 1994, tim periset di laboratoriumnya memproduksi sebuah video berjudul "koran tablet: sebuah visi untuk masa depan" yang menunjukkan bagaimana orang mungkin suatu hari membaca koran dan majalah di tablet. Sebuah terobosan yang mengaitkan dirinya sebagai sosok yang sebenarnya "menemukan" iPad lebih dulu daripada Steve Jobs.

Pemaparannya soal mediamorphosis bertujuan untuk mengurangi kengerian masyarakat terhadap kemungkinan penemuan teknologi-teknologi media baru di masa depan. Pendapatnya selalu mendasarkan pada pemahaman historis struktur media untuk mengenali potensi pengaruh teknologi terhadap bentuk media *mainstream*: koran, majalah, televisi, dan radio. Mediamorfosis adalah transformasi media komunikasi, yang biasanya ditimbulkan akibat hubungan timbal balik yang rumit antara berbagai kebutuhan yang dirasakan, tekanan persaingan dan politik, serta berbagai inovasi dan teknologi. Menurut Fidler, mediamorfosis bukanlah sekadar teori atau cara berpikir yang terpadu tentang evolusi teknologi media komunikasi. Mediamorfosis mendorong kita untuk memahami semua bentuk sebagai bagian dari sebuah system yang saling terkait, dan mencatat berbagai kesamaan dan hubungan yang ada antara bentuk bentuk yang muncul di masa lalu, masa sekarang, dan yang sedang dalam proses kemunculannya (Fidler, 1997). Media baru tidak akan muncul begitu lama. Dan ketika bentuk bentuk media komunikasi

yang baru muncul, bentuk bentuk yang terdahulu biasanya tidak mati–terus berkembang dan beradaptasi (Achmad, 2019, 2020; Achmad and Ida, 2019).

Apa yang dimaksud dengan New Media? Terry Flew mendefinisikan New Media sebagai kombinasi dari format 3Cs yaitu *computing and information technology* (IT), *communication networks*, dan *digitize media and information content*. Media baru konsisten dengan pembelajaran teknologi media yang merujuk pada kebutuhan untuk menyadari bagaimana mediasi dalam komunikasi lewat format teknologi mengubah komunikasi dalam praktek social (Flew, 2005).

Sedangkan Lievrouw dan Livingstone mengobservasi bahwa ada beberapa cara berpikir tentang media baru yang perlu untuk dimasukkan dalam tiga elemen, yaitu: alat yang memungkinkan atau memperluas kemampuan kita untuk berkomunikasi. Kegiatan komunikasi dan prakteknya dikaitkan dalam perkembangan dan penggunaan alat alat tersebut, arahan sosial dan organisasi yang membentuk alat alat dan praktik media baru (Lievrouw and Livingstone, 2006).

### **Konsep Mediamorfosis**

Secara umum, Fidler memaparkan tiga konsep mediamorfosis yaitu: pertama adalah *koevolusi*. Sifat sifat dasar media diwujudkan dan diteruskan melalui kode-kode komunikator yang kita sebut bahasa. Bahasa, tanpa harus dibandingkan satu sama lain, telah menjadi agen perubahan yang paling berpengaruh dalam rangkaian evolusi manusia. perkembangan bahasa lisan dan tulisan melahirkan dua transformasi besar, atau mediamorfosis, dalam system komunikasi manusia. Mediamorfosis ketiga yang siap mempengaruhi evolusi komunikasi dan peradaban secara radikal adalah bahasa digital. Bahasa ini merupakan lingua franca computer dan jaringan telekomunikasi global. Domain domain komunikasi. Sejak kelahiran bahasa tulis, berbagai bentuk media terus berkoevolusi dalam tiga jalur yang berbeda, yang disebut domain. Bahasa digital telah mentransformasikan bentuk bentuk media komunikasi yang ada. Inilah agen perubahan yang paling bertanggungjawab atas pengaburan perbedaan perbedaan diantara domain domain historis komunikasi.

Kedua adalah *konvergensi*, yang selalu menjadi esensi evolusi dan proses mediamorfosis. Konvergensi berskala besar dalam industry media dan telekomunikasi, mungkin hanya terjadi sekali. Namun bentuk bentuk media yang ada saat ini pada kenyataannya merupakan hasil dari konvergensi konvergensi berskala kecil yang tidak terhitung banyaknya, yang seringkali terjadi sepanjang waktu. Konvergensi lebih menyerupai persilangan atau perkawinan, yang menghasilkan transformasi atas masing masing entitas yang bertemu dan penciptaan entitas baru. Tim Dwyer mendefinisikan konvergensi media sebagai proses dimana berbagai teknologi yang baru digabungkan dengan media media yang telah ada dan berbagai industri komunikasi serta budaya yang berkembang (Dwyer, 2010). Contoh di Indonesia adalah konvergensi hiburan yang dilakukan Transmedia adalah mytrans.com, yang menggabungkan media televisi dan media internet. Bila selama ini kita menikmati acara televisi dengan duduk diam disatu tempat sambil memandangi layar televisi, kini ada cara berbeda yang ditawarkan. Berbagai acara yang ditayangkan di TransTV dan Trans7 bisa disaksikan melalui gadget berupa smart atau mobile phone ataupun perangkat lain. Cukup dengan terkoneksi pada jaringan internet. Ada juga produk lain yaitu DetikTV (tv.detik.com), yang menggabungkan media cetak, media televisi, dan internet.

Ketiga adalah kompleksitas. Untuk memahami kompleksitas, kiat dapat menelusuri kemunculan teori *chaos*. *Chaos* adalah komponen penting perubahan. Tanpanya, alam semesta akan menjadi tempat kematian dan kehidupan menjadi tidak mungkin. Dari kondisi chaos, lahir gagasan gagasan baru yang mentransformasikan dan menghidupkan berbagai sistem. Prinsip utama teori chaos kontemporer adalah gagasan bahwa kejadian kejadian yang terkesan tidak signifikan atau variasi variasi awal yang remeh dalam sistem yang mengalami chaos. Seperti cuaca dan ekonomi, dapat memicu peningkatan eskalasi kejadian kejadian tak terduga yang akhirnya mengarah pada kejadian yang membawa dampak bencana besar. Sistem-sistem yang mengalami chaos pada dasarnya anarkis. Sistem-sistem itu menunjukkan ketidakpastian yang polanya nyaris tak berujung dengan jangka waktu yang tidak terduga. Hal ini juga menjelaskan mengapa tidak seorangpun mampu memprediksi secara akurat teknologi teknologi media baru dan bentuk bentuk komunikasi manakah yang akhirnya akan sukses dan manakah yang akan gagal.

Salah satu unsur yang dapat melahirkan kemunculan teknologi baru adalah sistem yang adaptif dan kompleks. Kekayaan interaksi yang terdapat dalam sistem kehidupan, memungkinkannya menjalani pengorganisasian diri secara spontan. Dengan kata lain, sistem yang kompleks bersifat adaptif, yaitu bahwa sistem-sistem itu hanya merespon kejadian secara pasif. Sistem-sistem tersebut secara aktif berusaha mengarahkan apapun yang terjadi untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa semua bentuk media hidup dalam dunia yang dinamis dan saling tergantung. Ketika muncul tekanan eksternal dan penemuan baru, setiap bentuk komunikasi dipengaruhi oleh proses pengorganisasian diri yang muncul secara spontan. Sama seperti spesies yang berkembang demi kelangsungan hidup yang lebih baik, demikian jugalah yang dilakukan bentuk bentuk komunikasi dan perusahaan perusahaan media yang ada. Proses inilah yang menjadi esensi mediamorfosis.

### **Prinsip-prinsip Dasar Mediamorfosis**

Radio AM yang tidak sepenuhnya tenggelam akibat kemunculan radio FM, dan justru mengadopsi teknologi dan strategi pemasaran baru, menggambarkan prinsip kunci mediamorfosis. Contoh lain adalah ketika penyebaran TV semakin merajalela, radio, surat kabar, majalah dan film mendapat hantaman keras. Namun pada kenyataannya masing masing mereka terbukti ulet dan dapat beradaptasi. Hal ini menggambarkan akibat wajar yang penting dalam prinsip mediamorfosis, yaitu bentuk bentuk komunikasi yang ada harus berubah dalam menghadapi kemunculan media baru, karena kalau tidak, satu satunya pilihan adalah mati. Pers cetak juga diperkirakan akan mati ketika muncul televisi dan internet saat ini, nyatanya hingga sekarang pers cetak masih sanggup bertahan (Achmad, 2014).

Dari ketiga konsep tadi, Fidler kemudian menjabarkannya dalam 6 prinsip dasar mediamorfosis, yaitu: (1) Koevolusi dan koeksistensi, artinya semua bentuk media komunikasi hadir dan berkembang bersama dalam system yang adaptif dan kompleks, yang terus meluas. Begitu muncul dan berkembang, setiap bentuk baru dalam beberapa waktu dan hingga tingkat yang beraneka ragam, mempengaruhi perkembangan setiap bentuk yang lain. Salah satu contoh adalah media online detikcom. Setelah sukses sebagai portal berita, kini mereka merintis kanal detiktv yang merupakan konvergensi internet dan televisi, dan sekarang menjadi milik transcorps. (2) Metamorfosis, artinya media baru

tidak muncul begitu saja dan terlepas dari yang lain. Semuanya muncul secara bertahap dari metamorphosis media terdahulu. Ketika bentuk yang lebih baru muncul, bentuk bentuk terdahulu cenderung beradaptasi dan terus berkembang, bukan mati. Di Indonesia, contoh yang bisa kita lihat, adalah Kompas. Sebagai salah satu media cetak terbesar, Kompas membuka portal internet, dan memberikan perhatian yang cukup besar atas ini. Tempo juga memiliki situs berita tempointeraktif.com (Achmad, 2020) (3) Pewarisan, artinya bentuk bentuk media komunikasi yang bermunculan mewarisi sifat sifat dominan dari bentuk bentuk sebelumnya. Sifat sifat ini terus berlanjut dan menyebar melalui kode kode komunikator yang disebut bahasa. (4) Kemampuan Bertahan, artinya semua bentuk media komunikasi dan perusahaan media komunikasi dan perusahaan media dipaksa untuk beradaptasi dan berkembang agar tetap dapat bertahan dalam lingkungan yang berubah. Satu satunya pilihan lain adalah mati. Salah satu contoh adalah majalah berita mingguan terkenal, Newsweek yang ditutup pada 30 Desember 2012 dan fokus dalam format online (mulai aktif pada 4 Januari 2013), yang diberi nama Newsweek Global. (5) Peluang dan Kebutuhan, artinya media baru tidak diadopsi secara luas lantaran keterbatasan keterbatasan teknologi itu sendiri. Pasti selalu ada kesempatan dan alasan alasan social, politik, dan atau ekonomi yang mendorong teknologi media baru untuk berkembang. (6) Pengadopsian yang tertunda, artinya teknologi teknologi media baru selalu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang diperkirakan untuk mencapai kesuksesan bisnis. Teknologi teknologi itu cenderung membutuhkan sedikitnya satu generasi manusia (20-30 tahun) untuk bergerak maju dari rancangan konsep hingga perluasannya pengadopsian atasnya.

### **Domain-domain Media Komunikasi**

Domain media komunikasi merupakan sarana untuk menggali dan membandingkan kualitas kualitas yang ada dalam masing masing cabang utama sistem komunikasi manusia. Roger Fidler mengelompokkannya dalam 3 domain yaitu (1). Domain Interpersonal, termasuk bentuk komunikasi lisan atau ekspresif satu lawan satu yang isinya tidak terstruktur atau dipengaruhi oleh perantara perantara eksternal. Juga termasuk komunikasi komunikasi antara manusia dengan computer yang bertindak sebagai pengganti manusia. (2) Domain Penyiaran, termasuk bentuk bentuk komunikasi audio atau visual dari yang sedikit kepada yang banyak dengan perantara, isinya sangat terstruktur dan disajikan kepada hadirin secara urut dari awal sampai akhir dalam lokasi lokasi yang relatif tetap dan dalam periode waktu yang terjadwal dan ditentukan sebelumnya. (3) Domain Dokumen, termasuk bentuk bentuk komunikasi tekstual dan atau visual dari yang sedikit kepada yang banyak dengan perantara yang isinya dikemas dan disajikan kepada individu individu terutama melalui media portable. Juga termasuk bentuk bentuk elektronik berbasis halaman yang ditempatkan dalam jaringan computer, misalnya World Wide Web.

Karakteristik yang mencirikan domain domain ini telah terbentuk selama ribuan tahun oleh dua agen perubahan yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Dalam setiap metamorfosis yang mengikuti perkembangan dan penyebaran kedua agen tersebut, selalu muncul media baru. Dan media yang sudah ada mengalami perubahan didalam masing masing domain. Tapi sejak tahun 1970an, penyebaran bahasa digital yang terjadi dengan cepat dalam ketiga domain tersebut telah memberi kita suatu babak baru yang radikal dalam mempercepat evolusi dan ekspansi sistem komunikasi manusia. Suatu babak yang

disebut sebagai era rekayasa digital. Walau ciri ciri gabungan yang muncul dari rekayasa digital agak berkurang perbedaannya, mereka masih akan mempengaruhi asas media morfosis media. Yaitu transformasinya akan dipengaruhi oleh saling pengaruh yang rumit antara kebutuhan kebutuhan yang muncul, tekanan tekanan kompetitif dan politis dan inovasi social dan teknologis.

### **Time Line Komunikasi Manusia**

Berikut adalah perjalanan kronologis perkembangan komunikasi manusia dan perbedaan tahapan mediamorphosis sesuai masing-masing era. Tahap pertama adalah bahasa ekspresif dan penggunaan alat-alat komunikasi sederhana, yang baru dikenal dan diterapkan oleh *Homo Sapiens Sapiens* (manusia modern). Tahap kedua adalah mulai dikenalnya bahasa lisan dan dikategorikan Fidler sebagai Mediamorfosis era pertama. Kemunculannya ditandai dengan ditemukannya lukisan goa di Eropa selatan pada akhir zaman es. Ditandai pula oleh kemunculan komunitas-komunitas besar berbasis agrikultural pada zaman perunggu yang dimulai dari Asia kecil.

Tahap ketiga adalah bahasa tulisan dan dikategorikan sebagai mediamorfosis kedua. Tahap ini ditandai dengan kemunculan kekaisaran kekaisaran kuno yang mengembangkan teknologi dokumen; buku tulisan tangan dan perpustakaan. Di Romawi kemudian dibangun sistem jalan dan transportasi dan berkembanglah layanan pengiriman pos. Ditandai pula dengan pengembangan seni cetak dan kertas bubur kayu di Asia (China dan Arab). Berkembang pula kertas bubur kayu di Eropa. Renaisans Eropa yang bermula dari Italia, penemuan surat kabar, buku berita tulisan tangan, berkembangnya seni mencetak di Eropa, berkembangnya majalah dan buku cetakan, hingga munculnya revolusi industri.

Tahap keempat adalah munculnya bahasa digital, yang dikategorikan sebagai mediamorfosis ketiga. Kehidupan manusia berkembang sangat cepat sejalan dengan temuan-temuan di bidang teknologi. Ditemukannya komunikasi radio, gambar hidup atau film, telepon jarak jauh antar benua, radio siaran, mesin faksimili, televisi siaran, *computer mainframe*, televisi kabel, kabel telepon lintas benua, surat elektronik, satelit, komunikasi gelombang cahaya, video game; mikroprosesor, personal computer, notebook, *video cassette recorder*, mesinfax digital, *walkman*, *compact disc*, radio dan TV digital, *virtual reality*, *video conference*, *World Wide Web*, audio dan video *streaming*, *fiber optic* dan masih banyak lagi.

### **Prediksi Tahap Mediamorphosis Lanjutan**

Dalam periode yang sangat singkat, mediamorfosis ketiga yang dimulai dari agen perubahan teknologi yang kuat, telah mendapat pengaruh besar terhadap hampir semua individu, masyarakat, dan budaya. Gagasan manusia tentang jarak, waktu, dan realitas telah diubah secara radikal oleh bentuk bentuk media baru yang baru saja muncul. Persaingan memperebutkan konsumen dan uang dari iklan terus terjadi dengan begitu sengitnya (Achmad and Alamiyah, 2015). Semua perusahaan media berjuang bukan saja menghadapi satu sama lain, tetapi juga menghadapi tata ekonomi yang berubah, pesaing pesaing baru yang kuat, peningkatan keragaman sosial, ekonomi dan rasial, sistem pendidikan yang selalu berubah dan kekurangbiasaaan membaca, dan publik yang semakin tidak percaya terhadap media massa. Salah satunya adalah masalah media *cyber*.

Semua ini membawa kita pada tahap metamorphosis besar. Walau telah berlangsung lebih dari satu abad, teknologi media cyber yang penting masih baru saja melintas dari tahap pertama dan sedang menuju ke tahap kedua untuk memasuki masyarakat. Paul Saffo seorang peramal teknologi ternama menyatakan bahwa selama lima abad terakhir, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk lahirnya ide ide baru hingga sepenuhnya masuk ke masyarakat adalah sekitar 30 tahun. Bahwasanya dalam sepuluh tahun ke depan, kita akan memasuki tahap ketiga, ketika media cyber akan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari (Saffo, 1992).

Bagi perusahaan media massa yang sudah mapan, tahap berikutnya dari mediamorfosis besar ketiga pastilah akan menyakitkan. Sebuah masa yang sama yang dihadapi para pembuat dan pemasok kereta satu abad silam. Ketika mobil bertenaga bensin pertama muncul pada awal tahun 1890an, hanya sedikit pembuat kereta yang percaya kendaraan tersebut akan menggantikan kereta kereta yang ditarik kuda. Sebagian besar berpendapat bahwa mobil hanyalah barang mainan orang kaya. Dan jalan jalan yang memenuhi syarat dan stasiun pengisian bensin memerlukan beberapa generasi untuk membangunnya. Namun apa yang terjadi? Dalam tiga dasawarsa, kebanyakan perusahaan yang membuat kereta dan perlengkapannya telah berubah menjadi pembuat mobil. Ada juga yang beralih ke pekerjaan lain, bahkan bangkrut.

## Daftar Pustaka

- Achmad, Z. A. (2014) *Perbandingan Sistem Pers dan Sistem Pers di Indonesia*. 2nd edn. Surabaya: Lutfansah.
- Achmad, Z. A. (2019) 'Integrasi Program Dakwah dan Budaya: Studi Etnografi Virtual Mediamorfosis Radio Nada FM Sumenep Madura', *Jurnal Komunikasi Islam*, 09(2), pp. 238–263. doi: 10.15642/jki.2019.9.2.239-263.
- Achmad, Z. A. (2020) *Pergeseran Relasi Antara Pendengar Radio dengan Institusi Radio dalam Masyarakat Jaringan (Studi Etnografi Virtual pada Radio-radio Budaya di Jawa Timur yang Bermediamorfosis)*. Universitas Airlangga.
- Achmad, Z. A. and Alamiyah, S. S. (2015) 'Relation Between Political Economic of Media with the Strategies for Radio Positioning to Maintain the Existence of Commercial Radio (Case Study of JJFM Radio in Surabaya)', in *International Conference on Democracy and Accountability (ICoDA)*. Surabaya: Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga, pp. 188–193.
- Achmad, Z. A. and Ida, R. (2019) 'The shifting role of the listeners in the mediamorphosis process of culture radio: A case study of Jodhipati 106.1 FM', *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 32(3), p. 240. doi: 10.20473/mkp.v32i32019.240-250.
- Dwyer, T. (2010) *Media Convergence*. Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill, Open University Press.
- Fidler, R. (1997) *Mediamorphosis: Understanding New Media*. Thousand Oaks: Pine Forge Press.
- Flew, T. (2005) *New Media: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Lievrouw, L. and Livingstone, S. (2006) *The Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTs*. London: SAGE Publications.
- Saffo, P. (1992) 'Paul Saffo and the 30 year rule', *Design World*, pp. 16–23.



## *Biodata Para Penulis*



**Dr. Budiman Widodo, M.Si** lahir di Boyolali, pada 16 Januari 1960. Masuk jurusan Administrasi Negara FISIPOL-UGM lulus 1985, skripsi dengan judul:” Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Inovasi Pertanian”. Mengambil program S2 Kependudukan-UGM lulus 1999 dengan tesis berjudul: “Pendapatan dan Kesempatan Kerja Industri Rumah Tangga di Pedesaan”. Pada tahun 2005 sampai 2008 mengambil program S2 UNDIP, Magister Administrasi Publik, dengan tesis berjudul: “Implementasi RUTRK-RDTRK Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya pada tahun 2008-2012 mengambil Program Doktor (S3) di FIA-UNIBRAW dengan disertasi berjudul: “Liberalisasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah”. Penulis sejak tahun 1986 mengabdikan diri sebagai Dosen Kopertis Wilayah 6 JATENG DPK ASMI-Solo hingga sekarang, dengan jabatan Lektor Kepala. Selama ini penulis aktif mengikuti berbagai seminar nasional sebagai peserta maupun pemakalah disamping menulis artikel di koran.



**Fesdila Putri Nurani lahir, S.TP, M.Sc**, lahir di Gresik pada 31 Mei 1988. Menghabiskan masa kecil di Gresik kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana pada jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Sempat mencicipi bekerja pada dunia industry pangan selama satu tahun, dan memutuskan melanjutkan pendidikan Master pada Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini mengajar pada UPN Veteran Jawa Timur pada program studi Teknologi Pangan. Aktif dalam penelitian dan memiliki beberapa publikasi ilmiah.



**Ahmad Saufi, S.Sos** Tercatat sebagai mahasiswa pada program studi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro. Studi yang diambil difokuskan pada kajian-kajian sosial, ekonomi dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga aktif mengikuti dan menjadi pemakalah diberbagai Konferensi Nasional seperti Konferensi Nasional Administrasi Negara yang diselenggarakan UPN-Veteran Surabaya (2019), Konferensi Nasional Ilmu Administasi-STIA LAN Bandung (2019), 2nd Slamet Riyadi Conference-Universitas Slamet Riyadi Surakarta (2020), dan International Conference Covid-19 and New Normal-Universitas Narotama Surabaya (2020). Penulis yang gemar bermain Badminton ini, bisa dihubungi melalui kotak email berikut [saufi\\_kayong2@yahoo.co.id](mailto:saufi_kayong2@yahoo.co.id).



**Reza Praditya Yudha, S.IKom., M.IKom;** Saat ini menjadi penerima beasiswa LPDP untuk studi S3 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan Dosen Universitas Gunadarma. Penerima beasiswa S1 Erasmus Mundus di Universidade do Minho-Portugal dan lulusan terbaik Universitas Muhammadiyah Malang serta penerima beasiswa BUDI Dikti untuk studi S2 di Universitas Diponegoro. Memiliki ketertarikan pada studi komunikasi media dan budaya.



**Erwin Kusumastuti, S.Th.I.,M.Pd** Lahir di Klaten, tahun 1992. Dosen Agama Islam di UPN Veteran Jatim sejak tahun 2017. Saat ini mengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pendidikan S1 Jurusan Tafsir Hadis diselesaikan tahun 2014 di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun yang sama melanjutkan studi S2 dengan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 2016. Penulis sampai dengan saat ini masih aktif menulis di media massa baik cetak maupun elektronik dan menulis di beberapa jurnal ilmiah serta melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Penulis sangat menyenangi bidang sosial keagamaan. Konsen penulis dalam bidang akhlak dan pendidikan karakter.



**Ratna Puspitasari, S.Sos., M.KP.** Lahir di Madiun, tahun 1971. Dosen Luar Biasa Administrasi Negara di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur sejak tahun 2012. Pernah bekerja di PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dari tahun 1991 sampai 1996. Pendidikan S1 jurusan Administrasi Negara diselesaikan tahun 2011 di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur. Pada tahun 2015 telah menyelesaikan studi S2 di Pascasarjana Magister Kebijakan Publik di Universitas Airlangga. Hingga saat ini masih mengajar sebagai dosen LB (Luar Biasa) Administrasi Negara di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur.



**Drs. Imam Ghozali. MM**, lahir di lamongan pada tanggal, 10 september 1965, jenjang pendidikan di madrasah ibtidaiyah dengok lamongan (1980) madrasah Tsanawiyah pondok pesantren taman pengetahuan kertosono ( 1983 ) madrasah Aliyah Rejoso peterongan jombang ( 1986 ) melanjutkan program sarjana di fakultas ilmu dakwah ( FIAD ) Universitas Muhammadiyah Surabaya lulus(1991 ) dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana universitas putra bangsa Surabaya ( 2003 ). Sekarang menjadi pengajar di Universitas pembangunan nasional “Veteran” jawa timur Surabaya mulai tahun 1992 sampai sekarang dan juga mengajar di Stikom Surabaya sebagai

Dosen Luar Biasa, mengajar di ITATS Surabaya, mengajar di Unmuh surabaya, sebagai ketua Ta,mir Masjid Baiturrahman surabaya, dan juga ketua Takmir masjid At-Taqwa jalan Simokerto 3/25 surabaya sampai sekarang, dan ketua majlis ekonomi pimpinan ranting muhammadiyah tempurejo cabang muhammadiyah mulyorejo Surabaya sampai sekarang.



**Drs. Saifuddin Zuhri. MSi** Lahir di Kudus 1970 dibesarkan dari keluarga sederhana. Masih sebagai penasehat kegiatan keagamaan Orang tua Almrhum H. Ali mukson dan Hj. Sukarti Alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya 1989 dan UNS Surakarta di Manajemen Komunikasi 2001 pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi 2007-2015, dilanjutkan menjabat sebagai Wakil Dekan III FISIP UPN Jawa Timur 2016-2018 dan saat ini Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Jawa Timur. Ia aktif sebagai penulis pada bidang Public Speaking, Komunikasi Pemasaran, Public Relations. Publikasi lebih lengkap dapat dilihat pada

google scholar E-mail: [saufuddin\\_zuhri.ilkom@upnjatim.ac.id](mailto:saufuddin_zuhri.ilkom@upnjatim.ac.id)



**Dr. Lukman Arif, M.Si** adalah dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur sejak Tahun 1994. Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Administrasi pada Tahun 2006 di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini dalam jabatan fungsional sebagai Associate Professor Kebijakan Publik. Mengampu Mata Kuliah Teori Administrasi Publik, Metode Penelitian, Birokrasi dan Kebijakan Publik. Concern pada dinamika masalah organisasi birokrasi dan kebijakan publik. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan manajemen sektor publik pada jabatan Dekan FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur periode 2016-2018



**Dr. Dra. Ec. Dwi Suhartini, M.Aks., CMA** lahir di Surabaya tanggal 15 Desember 1968. Profesi sebagai dosen Prodi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur di Surabaya. Pendidikan S1 ditempuh pada Program Studi Akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur di bidang akuntansi dan pendidikan S-2 bidang akuntansi ditempuh pada Program Pascasarjana UPN “Veteran” Jawa Timur. Pendidikan S3 bidang ilmu akuntansi pada program Pascasarjana Doktorat Universitas Airlangga Surabaya. Penulis sebagai pengampuh mata kuliah akuntansi biaya, akuntansi manajemen, etika profesi dan bisnis. Beberapa kali

memenangkan hibah penelitian dan pengabdian yang dibiayai DRPM RistekDikti dan Mandiri UPN Veteran Jatim. Aktif sebagai anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Anggota APPSAI (Asosiasi Pengelola Program Studi S2 Akuntansi Indonesia).



**Yulita Dwi Nuraini, S.Ak**, Lahir di Magetan Jawa Timur pada tanggal 2 juli 1997. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN Kandangan I Lulus tahun 2010, SMP Wijaya Putra Lulus tahun 2013 , SMA Wijaya Putra Lulus tahun 2016 dan Telah menyelesaikan Program S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada tahun 2020. Pernah menjadi tutor bimbingan belajar di lembaga Quantum Excellent pada tahun 2019. Pernah magang di Instansi Pemerintahan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II pada tahun 2019.



**Dr. Zainal Abidin Achmad, S.Sos., M.Si., M.Ed.** adalah dosen Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia. Ia memiliki pedalaman minat dalam bidang media and cultural studies, etnografi, sosiologi komunikasi dan riset media. Gelar sarjana (S.Sos.) diperoleh dari Ilmu Komunikasi, Universitas Airlangga Surabaya. Gelar master pertama (M.Si.) diperoleh dari Ilmu Ilmu Sosial, Universitas Airlangga Surabaya. Gelar master kedua (M.Ed.) diperoleh dari Bilingual Education, Rangsit University, Thailand. Sedangkan gelar doktor (Dr.) diperoleh dari Ilmu Sosial, Universitas

Airlangga, Surabaya. Ia lahir di Pacitan, pada tanggal 19 Mei 1973. Memiliki berbagai aktivitas profesi dan sosial seperti Ikatan Alumni Komunikasi Universitas Airlangga, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) Jawa Timur. Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Timur, Ikatan Alumni FISIP Universitas Airlangga, dan Ikatan Alumni Lemhannas RI (IKAL) Komisariat Provinsi Jawa Timur



ISBN 978-623-92037-2-6 (PDF)



9 786239 203726